



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

FINAL REPORT

ANALISIS PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

BAPPEDA

PROVINSI JAMBI

2019

JAMART

Tuntas 2021

Ringkasan Eksekutif

Sesuai dengan Tujuan pembangunan Provinsi Jambi jangka panjang yang tertuang dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2026 salah satu sasaran pokoknya adalah mewujudkan Jambi yang memiliki keunggulan kompetitif yang diarahkan kepada penguatan perekonomian daerah berbasis keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan system produksi, distribusi dan pelayanan serta memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis.

Penentuan komoditas unggulan merupakan langkah penting dalam menghadap globalisasi semua sektor di masa sekarang. Selain itu, dalam penentuan ranking komoditas unggulan merupakan suatu keharusan supaya sumberdaya pembangunan berhasil dimanfaatkan secara efisien dan terarah.

Komoditas unggulan yang dikelompokkan dalam komoditi “Basis” dan “Non-Basis”, Sektor/komoditi “Spesialisasi” dan “Non-Spesialisasi” perlu diketahui sehingga fokus arah pengembangan dapat terarah. Terdapat 13 komoditi basis dan 4 komoditi spesialisasi pada Kabupaten Kerinci, pada Kabupaten Merangin 6 jenis komoditi basis dan 2 komoditi spesialisasi, 2 jenis komoditi basis dan 1 komoditi spesialisasi, di Kabupaten Sarolangun, 6 jenis komoditi Basis dan 2 komoditi spesialisasi, pada Kabupaten Batang Hari, 3 jenis komoditi basis dan 1 komoditi spesialisasi pada Kabupaten Muaro Jambi, 6 jenis komoditi basis dan 2 komoditi spesialisasi Kabupaten Tanjung Jabung timur, pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat 3 jenis komoditi basis dan 3 komoditi spesialisasi, 2 jenis komoditi basis dan 2 komoditi spesialisasi pada Kabupaten Tebo, 2 jenis komoditi basis dan 2 komoditi spesialisasi pada Kabupaten Bungo, dan sebanyak 9 jenis komoditi basis dan 8 komoditi spesialisasi pada Kota Sungai Penuh.

Dari hasil nilai PSS pada sektor sekunder dan Tersier bernilai positif yang dapat juga diartikan bahwa Provinsi Jambi sudah memasuki provinsi maju. Karena suatu daerah dapat dikatakan maju apabila perekonomian sudah bergeser dari sektor primer kepada sektor lain.

Penetapan strategi pengembangan sumberdaya perkebunan secara berkelanjutan dengan Strategi **Strengths-Threats (ST)**, menggunakan pendekatan factor Internal dan eksternal yang berada dalam siklus agribisnis perkebunan dengan melihat Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan yang sedang dan akan dihadapi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan sehingga dokumen analisis pengembangan Sumberdaya Perkebunan Secara Berkelanjutan Provinsi Jambi Tahun 2019 ini dapat terselesaikan sesuai rencana dan terpenuhi sesuai jadwal kegiatan.

Analisis ini menggunakan biaya dari pelaksanaan pekerjaan Belanja Jasa Penyusunan Dokumen Analisis Pengembangan Sumber Daya Perkebunan Berkelanjutan kegiatan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Industri, Perdagangan, dan Dunia Usaha dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) Bappeda Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 yang merupakan langkah yang bisa dianggap strategis karena Sumberdaya Perkebunan Secara Berkelanjutan merupakan salah satu bagian dari strategi pembangunan dalam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sumber-sumber ekonomi itu sendiri. Sangat besar harapan, hasil dokumen analisis ini dapat pula menjadi langkah awal atau langkah lanjutan dari kegiatan yang sudah ada agar pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber daya pembangunan dapat lebih efisien dan terfokus.

Tim analisis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dan berpartisipasi baik mulai saat

penyusunan proposal, pengambilan data hingga dengan penyusunan dokumen "**Final Report**" ini.

Akhirnya semoga hasil ini bermanfaat sebagai dasar pengambilan kebijakan dan kita semua senantiasa diberi kekuatan dan petunjuk oleh Allah SWT untuk dapat mengemban tugas dan amanat dalam melaksanakannya

Jambi, November 2019

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	10
1.3. Manfaat	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Teori Perubahan Struktur Ekonomi.	11
2.2. Produk Domestik regional Bruto (PDRB)	11
2.3. Teori Basis Ekonomi.....	12
2.4. Sektor dan Komoditi Unggulan.....	12
2.5. Pengertian Perkebunan.....	16
2.6. Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.....	18
2.7. Analytical Hierarchy Process (AHP).....	19
2.8. Analisis SWOT	25
2.9. Pengertian Agribisnis	30
2.10. Kerangka Pikir.....	37
III. METODOLOGI	38
3.1. Tempat dan Waktu Analisis	38
3.2. Jenis dan Sumber Data.....	38
3.3. Teknis dan Model Analisis Data.....	39
3.3.1. Analisis Location Quotient (LQ)	39
3.3.2. Analisis Tipologi Klassen (Klassen Typology).....	41
3.3.3. Analisis Spesialisasi (SI)	43
3.3.4. Metode Pengambilan Keputusan Komoditi (AHP).....	44
3.3.5. Strategi pengembangan Perkebunan(SWOT).....	47
IV. ANALISIS PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PERKEBUNAN SECARA BERKELANJUTAN	52

4.1. Gambaran Umum	52
4.1.1. Kondisi geografis Provinsi Jambi.....	52
4.1.2. Kependudukan	54
4.2. Analisis Perekonomian.....	56
4.2.1. Analisis Location Quotient (LQ) Pertumbuhan Perekonomian	59
4.2.2. Analisis Shift Share	61
4.3. Analisis Basis dan Rumah Tangga Usaha Pertanian	76
4.4. Analisis Location Quotient (LQ) Komoditi Perkebunan	82
4.5. Analisis Penentuan Faktor-faktor penentuan komoditas sasaran secara berkelanjutan.....	90
4.6. Strategi Pengembangan Sumberdaya Perkebunan Secara Berkelanjutan	103
4.6.1. Analisis Matriks IFAS.....	103
4.6.2. Analisis Matriks EFAS	105
4.6.3. Strategi Pengembangan Sumberdaya Perkebunan Secara Berkelanjutan	110
V. Penutup	120
5.1. Kesimpulan	120
5.2. Saran.....	121
 DAFTAR PUSTAKA	 123
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Persentase Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Jambi Tahun 2017-2018	2
2. Jumlah tenaga kerja berdasarkan lapangan kerja utama pada kabupaten/kota Provinsi Jambi Tahun 2018	3
3. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jambi (miliar rupiah). .	5
4. Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian di Provinsi Jambi.	7
5. Matriks Perbandingan Berpasangan	24
6. Skala Saaty	24
7. Matriks SWOT	29
8. Luas Wilayah Dalam Provinsi Jambi	52
9. Jumlah Penduduk Provinsi Jambi 2016-2018	55
10. Perkembangan PDRB Provinsi Jambi Berdasarkan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018	57
11. Nilai Location Quotient PDRB 2010-2018	59
12. Hasil Regional Agregat Shift Share (RASS) (persen)	61
13. Proportional Shift share (PSS) Provinsi Jambi 2010-2018	61
14. Jumlah Penduduk yang bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama (AMS) Tahun 2018	63
15. Laju Pertumbuhan Sektorl Perekonomian Kabupaten Kerinci (dalam Miliar rupiah dan persen)	64
16. Laju Pertumbuhan Sektorl Perekonomian Kabupaten Merangin (dalam Miliar rupiah dan persen)	65
17. Laju Pertumbuhan Sektorl Perekonomian Kabupaten Sarolangun (dalam Miliar rupiah dan persen)	66
18. Laju Pertumbuhan Sektorl Perekonomian Kabupaten Batanghari (dalam Miliar rupiah dan persen)	67
19. Laju Pertumbuhan Sektorl Perekonomian Kabupaten Muaro Jambi (dalam Miliar rupiah dan persen)	68

20.	Laju Pertumbuhan Sektoral Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur (dalam Miliar rupiah dan persen).....	69
21.	Laju Pertumbuhan Sektoral Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat (dalam Miliar rupiah dan persen)	71
22.	Laju Pertumbuhan Sektoral Perekonomian Kabupaten Tebo (dalam Miliar rupiah dan persen).....	72
23.	Laju Pertumbuhan Sektoral Perekonomian Kabupaten Bungo (dalam Miliar rupiah dan persen).....	73
24.	Laju Pertumbuhan Sektoral Perekonomian kota Jambi (dalam Miliar rupiah dan persen).....	74
25.	Laju Pertumbuhan Sektoral Perekonomian kota Sungai Penuh (dalam Miliar rupiah dan persen).....	75
26.	Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Provinsi Jambi Menurut Sektor yang diusahakan, Jenis Usaha Utama dan Sumber penghasilan Utama Tahun 2018.....	78
27.	Luas dan jumlah Petani Komoditi Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2018	79
28.	LQ Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Kabupaten/Kota dan Subsektor yang diusahakan Tahun 2018	81
29.	Komoditi Perkebunan dengan Nilai LQ > 1 Pada Kabupaten Kerinci	82
30.	Komoditi Perkebunan dengan Nilai LQ > 1 Pada Kabupaten Merangin	83
31.	Komoditi Perkebunan dengan Nilai LQ > 1 Pada Kabupaten Sarolangun.....	84
32.	Komoditi Perkebunan dengan Nilai LQ > 1 Pada Kabupaten Batanghari.....	84
33.	Komoditi Perkebunan dengan Nilai LQ > 1 Pada Kabupaten Muaro Jambi.....	85
34.	Komoditi Perkebunan dengan Nilai LQ > 1 Pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur	86
35.	Komoditi Perkebunan dengan Nilai LQ > 1 Pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	87
36.	Komoditi Perkebunan dengan Nilai LQ > 1 Pada Kabupaten Tebo.....	87
37.	Komoditi Perkebunan dengan Nilai LQ > 1 Pada Kabupaten Bungo.....	87

38.	Komoditi Perkebunan dengan Nilai LQ > 1 Pada Kota Sungai Penuh.....	89
39.	Bobot Antar Kriteria	91
40.	Nilai Eigen Kriteria.....	92
41.	Eigen Value, Alternatif, Bobot dan Ranking Kabupaten Kerinci	93
42.	Eigen Value, Alternatif, Bobot dan Ranking Kabupaten Merangin	94
43.	Eigen Value, Alternatif, Bobot dan Ranking Kabupaten Sarolangun.....	95
44.	Eigen Value, Alternatif, Bobot dan Ranking Kabupaten Batanghari.....	96
45.	Eigen Value, Alternatif, Bobot dan Ranking Kabupaten Muaro Jambi.....	97
46.	Eigen Value, Alternatif, Bobot dan Ranking Kabupaten Tanjung Jabung Timur	98
47.	Eigen Value, Alternatif, Bobot dan Ranking Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	99
48.	Eigen Value, Alternatif, Bobot dan Ranking Kabupaten Tebo.....	100
49.	Eigen Value, Alternatif, Bobot dan Ranking Kabupaten Bungo.....	101
50.	Eigen Value, Alternatif, Bobot dan Ranking Kabupaten Kota Sungai Penuh.....	102
51.	Nilai Bobot dan Rating Untuk Faktor Internal	104
52.	Nilai Bobot dan Rating Untuk Faktor Eksternal	105

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Grafik Persentase Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Jambi Tahun 2014-2018.....	4
Gambar.2. Grafik Persentase Distribusi Sektor Pembentuk PDRB Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2018	6
Gambar 3. Struktur Hirarki yang Complete	22
Gambar 4. Struktur Hirarki yang Incomplete.....	22
Gambar 5. Grafik Analisis SWOT	27
Gambar 6. Kerangka Teoritis Pendekatan Masalah Pengembangan Sumberdaya Perkebunan Secara Berkelanjutan di Provinsi Jambi	37
Gambar 7. Tipologi Klassen	42
Gambar.8. Skema Hirarki Penentuan Komoditas Perkebunan	48
Gambar.9. Model Pola Strategis Analisis SWOT	51
Gambar.10. Persentase Pembagian Wilayah Provinsi Jambi.....	53
Gambar.11. Grafik Distribusi RTUP Sektor Pertanian Tahun 2018.....	77
Gambar.12. Grafik Distribusi Jumlah Petani SubSektor Perkebunan Tahun 2018.....	79
Gambar.13. Grafik Perkembangan Jumlah Petani Subsektor Perkebunan Tahun 2016-2018.....	80
Gambar.14. Bagan Kombinasi Strategi Kuantitati Pengembangan Sumberdaya Perkebunan Secara berkelanjutan Di Provinsi Jambi.....	106
Gambar.15. Kuadran Analisa SWOT Pengembangan Sumberdaya Perkebunan secara berkelanjutan di Provinsi Jambi	107

DAFTAR LAMPIRAN**Nomor**

1. PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 Provinsi Jambi.
2. PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 Kabupaten Kerinci
3. PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 Kabupaten Merangin
4. PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 Kabupaten Sarolangun
5. PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 Kabupaten Batang Hari
6. PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 Kabupaten Muaro Jambi
7. PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 Kabupaten Tanjung Jabung Timur
8. PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 Kabupaten Tanjung Jabung Barat
9. PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 Kabupaten Tebo
10. PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 Kabupaten Bungo
11. PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 Kota Jambi.
12. PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 Kota Sungai Penuh.
13. Produksi Komoditi Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2014-2018
14. Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2018
15. Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018
16. Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Sarolangun Tahun 2014-2018
17. Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Batang Hari Tahun 2014-2018

18. Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014-2018
19. Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-2018
20. Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014-2018
21. Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Tebo Tahun 2014-2018
22. Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Bungo Tahun 2014-2018
23. Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Kota Sungai Penuh Tahun 2014-2018

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah di Indonesia sejak adanya otonomi daerah harus terintegrasi antar berbagai sektor. Pembangunan perekonomian daerah tersebut dalam era globalisasi saat ini memiliki konsekuensi seluruh daerah di wilayah menghadapi persaingan yang semakin lama semakin ketat. Dan untuk itu perlu ada upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas potensi unggulan daerah termasuk sumberdaya alam dan kualitas sumberdaya manusia khususnya.

Pendekatan utama dalam mengatasi tantangan tersebut adalah melalui pengembangan komoditas unggulan dengan mengutamakan peningkatan daya saing sebagai dasar dalam pertumbuhan ekonomisuatu daerah.

Untuk mencapai kesuksesan pelaksanaan pemerintah daerah memerlukan komitmen yang kuat seiring dengan penetapan pemerintah daerah berdampak terhadap upaya pengembangan potensi daerah melalui kegiatan agribisnis dibidang perkebunan dan lembaga penunjang lainnya. Fokus kegiatan terhadap pembangunan pertanian akan menghasilkan sistem pertanian yang tangguh dan bermuara kepada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat Provinsi Jambi secara garis besar berada pada daerah pedesaan dan masih bergantung kepada usaha pertanian dan turunannya yang dapat kita lihat pada usaha dan mata lapangan pekerjaan utamanya sebagaimana data berikut :

Tabel 1. Persentase Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Jambi Tahun 2017-2018

Lapangan Pekerjaan Utama	2017	2018
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	48,56	47,35
Pertambangan dan Penggalian	2,08	2,58
Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik, Gas Air dan Pengelolaan/daur ulang sampah	5,35	5,43
Konstruksi dan Real Estate	5,14	5,46
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi/Perawatan Mobil dan Motor	14,70	15,43
Transportasi dan Pergudangan	3,37	3,02
Penyediaan Akomodasi, Makan Minum	3,92	3,75
Informasi dan Komunikasi	0,47	0,38
Jasa Keuangan	0,84	0,85
Jasa Perusahaan	0,51	0,89
Jasa Kemasyarakatan	12,28	12,15
Jasa Lainnya	2,77	2,71
Total	100	100

Sumber : BPS.2018

Terjadi pergeseran penurunan dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan terjadi kenaikan pada sektor pertambangan dan penggalian dan lainnya meskipun dalam angka yang relatif kecil.

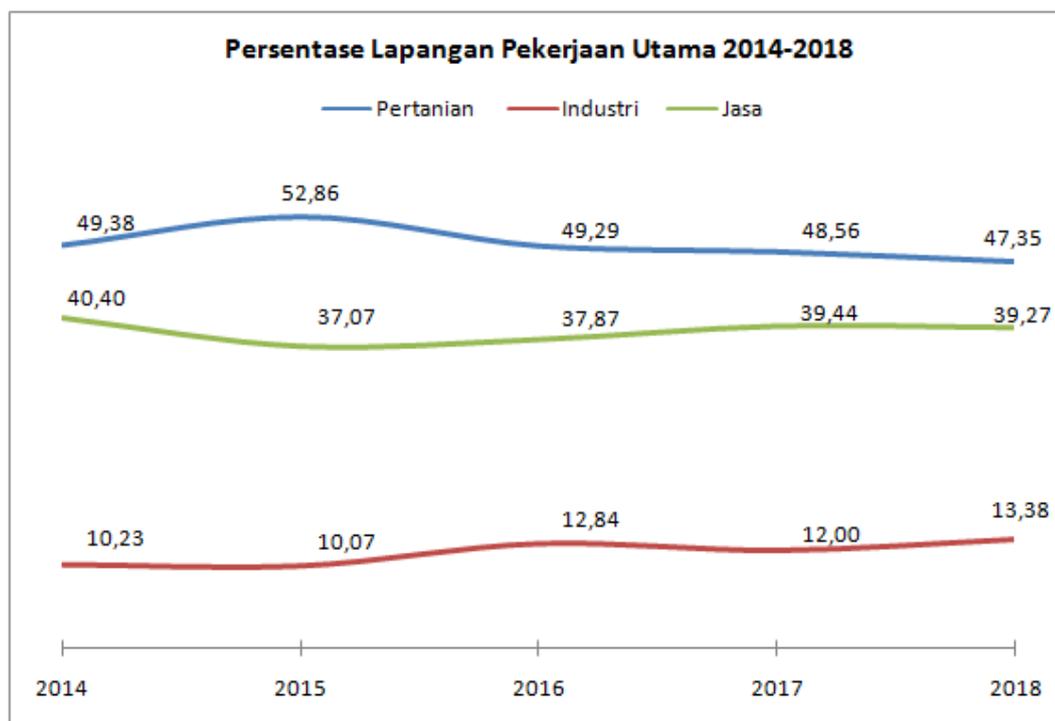
Sedangkan untuk komposisi penyebaran lapangan pekerjaan utama pada masing-masing kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel.2. Jumlah tenaga kerja berdasarkan lapangan kerja utama pada kabupaten/kota Provinsi Jambi Tahun 2018.

Lapangan Kerja Utama	Pertanian (A)	Industri (M)	Jasa (S)
KERINCI	78.690	11.107	35.212
MERANGIN	102.100	21.685	62.405
SAROLANGUN	75.862	18.980	40.656
BATANGHARI	59.643	21.207	41.571
MUARO JAMBI	91.089	39.416	63.167
TANJUNG JABUNG TIMUR	78.431	7.430	28.552
TANJUNG JABUNG BARAT	100.688	12.506	60.811
TEBO	119.261	16.560	38.919
BUNGO	90.705	24.947	56.705
KOTA JAMBI	9.138	49.274	219.390
KOTA SUNGAI PENUH	9.442	7.198	28.615
Provinsi Jambi	815.049	230.310	676.003
	47,35	13,38	39,27

Sumber: BPS.2018 (*) sumber analisis situasi ketenagakerjaan 2018)

Dari angka 1.721.362 jumlah tenaga kerja, sektor pertanian begitu mendominasi lapangan pekerjaan utama di semua kabupaten/kota di Provinsi Jambi kecuali Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh yang merupakan wilayah administrasi di Provinsi Jambi yang berstatus kota. Pola yang ada di Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh menggambarkan keadaan mirip dengan karakteristik perkotaan pada kota-kota lainnya di Indonesia. Sedangkan untuk kabupaten lainnya, lapangan pekerjaan utamanya mempunyai pola yang sama satu sama lainnya, yaitu didominasi oleh sektor pertanian (A), Sektor Jasa (S) berada pada urutan kedua dan disusul oleh sektor Industri (M).



Gambar.1. Grafik Persentase Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Jambi Tahun 2014-2018.

Rendahnya sektor industri di Provinsi Jambi diduga karena masih sedikitnya investasi yang masuk ke daerah yang jumlah sumber daya alamnya sangat melimpah. Infrastruktur yang ada sekarang ini belum mampu menarik investor untuk membuka usaha industri baru di Provinsi Jambi.

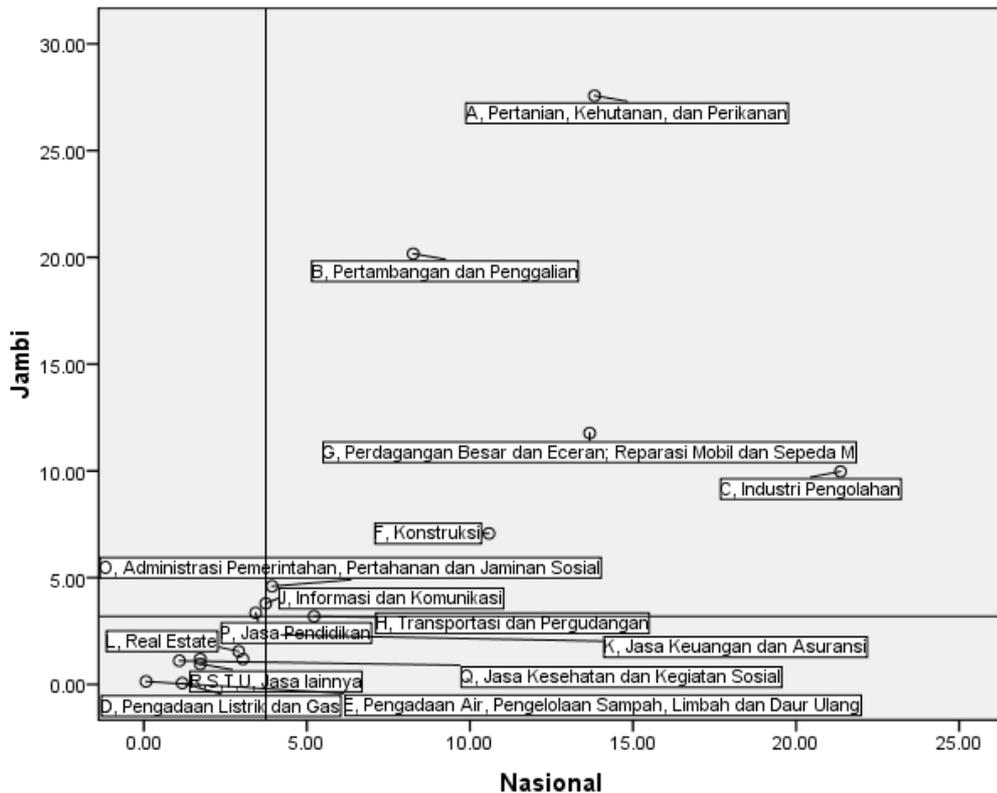
Sektor pertanian secara luas terdiri atas sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan menjadi penggerak utam (*prime mover*) perekonomian daerah di Provinsi Jambi atau PDRB menurut lapangan usaha menempati urutan pertama disusul pertambangan dan penggalian.

Tabel.3. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jambi (miliar rupiah).

Sektor PDRB	2018	Persen
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	57.452.771,10	27,57
B, Pertambangan dan Penggalian	42.030.573,70	20,17
C, Industri Pengolahan	20.780.569,00	9,97
D, Pengadaan Listrik dan Gas	133.134,40	0,06
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	282.858,00	0,14
F, Konstruksi	14.732.794,40	7,07
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24.516.937,60	11,77
H, Transportasi dan Pergudangan	6.648.321,60	3,19
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.483.447,60	1,19
J, Informasi dan Komunikasi	7.889.621,00	3,79
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	4.834.542,20	2,32
L, Real Estate	3.223.088,10	1,55
M,N, Jasa Perusahaan	2.489.706,50	1,19
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.588.200,10	4,60
P, Jasa Pendidikan	6.975.134,30	3,35
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.321.748,60	1,11
R,S,T,U, Jasa lainnya	1.995.111,40	0,96
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	208.378.559,60	100,00

Sumber BPS.2019

Kontribusi Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan sebesar 27,57 persen atau senilai 57.452.771 Milyar rupiah dari 208.378.559 milyar rupiah selama kurun waktu 5 tahun terakhir belum berubah, karena ketergantungan dan dukungan sumberdaya alam Provinsi Jambi yang melimpah dari sektor tersebut.



Gambar.2. Grafik Persentase Distribusi Sektor Pembentuk PDRB Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2018.

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan melebihi kontribusi sektor yang sama pada tingkat Nasional dengan perbandingan 27,57 persen dan 13,82 persen dan pada sektor pertambangan dan penggalian dengan perbandingan kontribusi sebesar 20,17 persen dan 8,26 persen. Nilai ini menunjukkan bahwa Provinsi Jambi masih didukung sektor primer yang bersumber dari sumber daya alam.

Jika dilihat dari peranan subkategori terhadap nilai tambah pertumbuhan dan peranan PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha, Sub kategori usaha pertanian, peternakan, perburuan dan pertanian merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha Pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 87,58 persen.

Tabel. 4. Peranan Subkategori terhadap Nilai Tambah Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian di Provinsi Jambi.

Lapangan Usaha/Industry	2018*
1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian.	87,58
a. Tanaman pangan	8,05
b. Tanaman Hortikultura	12,23
c. Tanaman Perkebunan	61,72
d. Peternakan	4,63
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	0,94
2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	4,18
3. Perikanan	8,24
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	100,00

Sumber : BPS.2018

Keberadaan komoditas unggulan pada masing-masing sektor-subsektor tersebut sangat menentukan perkembangan dan pertumbuhan dari masing-masing sektor –subsektor tersebut. Sehingga penentuan atau identifikasi komoditas unggulan mutlak dilaksanakan untuk menentukan fokus dan arah yang jelas dalam pengembangan dan pengelolaan komoditas unggulan pada sektor-subsektor tersebut. Secara umum penentuan dan penilaian terhadap suatu komoditas menjadi komoditas unggulan daerah didasarkan pada keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) yang dimiliki dari masing-masing komoditas-komoditas tersebut.

Jika ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka pembangunan ekonomi harus diutamakan pada sektor-sektor yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor-sektor di hulu dan hilirnya. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut adalah dengan mengembangkan potensi di sektor pertanian. Pengembangan ini sangat dimungkinkan dengan sumber daya alam melimpah yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan. Banyak ragam komoditas pertanian dan produk turunannya yang berpotensi dikembangkan menjadi produk unggulan. Selain itu, komoditas pertanian juga memiliki peranan

strategis yang tidak hanya dibutuhkan untuk memenuhi konsumsi dalam negeri saja, tetapi juga untuk di ekspor ke berbagai negara sebagai sumber tambahan devisa negara.

Dalam mewujudkan pertanian yang tangguh dan menjadi andalan perekonomian daerah, dimana visi terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif dan kreatif melalui pembangunan pertanian yang berbasis sumberdaya lokal.

Pembangunan perkebunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta berkeadilan diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat; meningkatkan penerimaan negara; menyediakan lapangan pkerja;meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing; memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sedangkan pembangunan perkebunan mempunyai fungsi : Ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional; Ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung, Fungsi Sosbud; sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Berdasarkan Statistik Perkebunan Provinsi Jambi 2017, luas total lahan perkebunan Provinsi Jambi seluas 1.936.145 Ha, terdiri 673.350 ha perkebunan karet, 1.039.920 ha perkebunan sawit, 45.924 ha perkebunan kayu manis, 118.695 ha perkebunan kelapa dalam, 27.166 ha perkebunan kopi, 20.985 ha perkebunan pinag, 2.432 ha perkebunan coklat dan sisanya lada, kemiri, cengkeh, aren, teh, tebu, nilem, pala, kapuk dan panili seluas 7.673 ha. Sektor perkebunan, khususnya sawit dan karet memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Provinsi Jambi

dengan kontribusi PDRB 58% dari kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. Tidak salah apa bila masyarakat mengatakan, jika harga sektor perkebunan khususnya karet, sawit, pinang dan coklat stabil bahkan naik, maka denyut jantung perekonomian Jambi berdetak kencang. Begitu pula sebaliknya bila harga komoditas perkebunan anjlok, maka sangat terasa sekali denyut jantung ekonomi masyarakat Jambi melemah.

Pada sisi lain, besarnya potensi sektor perkebunan di Provinsi Jambi belum sepenuhnya diiringi dengan pengembangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan baik pemilihan lahan, persiapan lahan dan dalam budidayanya sendiri. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab menurunnya produktivitas lahan pada jangka panjang, kerusakan lingkungan baik lahan, air udara dan erosi. Klaim beberapa negara tetangga, bahwa lahan perkebunan Jambi telah mengokupasi hutan lindung (*black campaign*) dan mengalih fungsikan lahan beririgasi menjadi lahan perkebunan sawit.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya perlu disusun dokumen analisis pengembangan sumber daya perkebunan berkelanjutan sebagai salah satu upaya menyediakan arah strategi dan kebijakan dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya perkebunan yang ramah lingkungan.

Perencanaan pembangunan ekonomi memerlukan dasar berpijak yang menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat, berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu disusun dokumen analisis pengembangan sumber daya perkebunan berkelanjutan sebagai salah satu upaya menyediakan arah strategi dan kebijakan dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya perkebunan yang ramah lingkungan dan secara berkelanjutan.

1.2. Tujuan

Maksud penyusunan dokumen ini adalah sebagai bahan perumusan kebijakan dalam pengembangan sumber daya perkebunan berkelanjutan, mengidentifikasi permasalahan serta sebagai informasi kepada pihak kepentingan dalam pengembangan sumber daya perkebunan berkelanjutan.

Adapun tujuan dari kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi sektor primer pendukung sektor skunder;
2. Mengidentifikasi jenis dan kuantitas produk unggulan pada sektor primer yang dibutuhkan sektor sekunder dan sektor tersier;
3. Mendorong terciptanya iklim usaha perkebunan dari sektor ulu dan hilir yang berbasis keunggulan lokal.

1.3. Manfaat

Selain sebagai sarana dan proses studi analisis mengenai pembangunan wilayah, juga diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten/kota agar kebijaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara tepat sesuai kondisi dan potensi wilayah. selain itu, akan mempermudah pemerintah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan daerah pada Wilayah Pembangunan masing-masing yang bermuara pada pertumbuhan wilayah yang lebih merata di bawah kontrol pemerintah daerah.
2. Memberikan masukan tentang analisis pembangunan wilayah di daerah studi analisis, sehingga dapat dijadikan tambahan informasi dalam pembangunan regional dan juga sebagai referensi bagi analisis- analisis selanjutnya.

BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Perubahan Struktur Ekonomi

Menurut Sukirno (1985) dalam perubahan struktur ekonomi ditandai dengan adanya perubahan persentase sumbangan berbagai sektor dalam pengembangan ekonomi, yang disebabkan intensitas kegiatan manusia dan perubahan teknologi secara umum. Perubahan struktur ekonomi ini dapat dipahami dari proses perubahan ekonomi tradisional ke arah ekonomi modern, dari ekonomi sub sisten ke ekonomi pasar dan dari ketergantungan ke ekonomi pasar.

Transformasi struktur ekonomi lazimnya ditandai dengan peralihan dan pergeseran dari kegiatan di sektor produksi primer pertanian dan pertambangan ke sektor produksi sekunder industri manufaktur dan konstruksi dan sektor-sektor tersier (jasa-jasa) (Djojohadikusumo, 1994). Perubahan struktur perekonomian akan mempengaruhi pola pembagian pendapatan antar penduduk dan antar sektor perekonomian, serta akan menyebabkan pemindahan alokasi tenaga kerja dari sektor yang produktivitasnya rendah ke sektor yang produktivitasnya tinggi.

2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi disuatu wilayah. Wilayah domestik suatu daerah yang meliputi daratan dan lautan yang berada didalam batas-batas geografis daerah tersebut. Pada PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. Produk Domestik Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor diwilayah itu (Tarigan, 2005).

2.3. Teori Berbasis Ekonomi

Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah ditentukan oleh besarnya kegiatan ekspor diwilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi kegiatan basis dan non basis. Hanya kegiatan basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah (Tarigan, 2005). Ricardson (1991) menjelaskan bahwa Teori basis ekonomi merupakan model yang relatif sederhana. Teori ini menyederhanakan suatu perekonomian regional terbagi menjadi dua sektor, sektor pertama adalah sektor basis (sektor ekspor) dan sektor kedua adalah sektor bukan basis (sektor lokal). Model teori ini menjelaskan struktur perekonomian suatu daerah atas dua sektor yaitu:

1. Sektor unggulan yaitu sektor atau kegiatan ekonomi yang melayani baik pasar domestik maupun pasar luar daerah itu sendiri, ini berarti daerah secara tidak langsung mempunyai kemampuan untuk mengekspor barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor tersebut ke daerah lain.
2. Sektor non unggulan yaitu sektor atau kegiatan yang hanya mampu melayani pasar di daerah itu sendiri.

2.4. Sektor dan Komoditi Unggulan

Sektor unggulan adalah sektor yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar. Sektor unggulan juga

memberikan nilai tambah dan produksi yang besar, memiliki *multiplier effect* yang besar terhadap perekonomian lain, serta memiliki permintaan yang tinggi baik pasar lokal maupun pasar ekspor.

Menurut Sambodo (2002) Sektor Unggulan merupakan sektor yang keberadaannya pada saat ini telah berperan besar kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah, karena mempunyai keunggulan-keunggulannya atau kriteria. Selanjutnya faktor ini berkembang lebih lanjut melalui kegiatan investasi dan menjadi tumpuhan kegiatan ekonomi. Hal ini didasarkan atas seberapa besarnya peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Komoditas adalah : (1) Barang dagangan utama, benda niaga, hasil bumi dan kerajinan setempat dapat dimanfaatkan sebagai komoditas ekspor; (2) Bahan Mentah yang dapat digolongkan menurut mutunya sesuai dengan standard perdagangan Internasional (F. Rahardi, 2004). Komoditas dibagi menjadi komoditas industri, komoditas pertambangan, komoditas hasil hutan, komoditas hasil laut, komoditas kayu, komoditas hasil kerajinan rakyat.

Komoditas Unggulan adalah komoditi potensial yang dipanang dapat dipersaingan dengan produk sejenis di daerah lain, karena disamping memiliki keunggulan komparatif, juga memiliki efisiensi usaha yang tinggi (Ely, 2014). Komoditas unggulan merupakan hasil usaha masyarakat yang memiliki peluang pemasaran yang tinggi dan menguntungkan bagi masyarakat. Beberapa kriteria dari komoditas unggulan adalah :

1. Mempunya daya saing yang tinggi di pasaran (keunikan/ciri spesifik, kualitas bagus, harga murah).
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang potensial dan dapat dikembangkan.

3. Mempunyai nilai tambah tinggi bagi masyarakat.
4. Secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan sumberdaya manusia.
5. Layak didukung oleh modal bantuan atau kredit.

Komoditas unggulan adalah komoditas andalan yang paling menguntungkan untuk diusahakan atau dikembangkan pada suatu daerah (Depkimpraswil, 2003). Keberadaan komoditas unggulan pada suatu daerah akan memudahkan upaya pengembangan agribisnis. Hanya saja, persepsi dan memposisikan kriteria serta instrumen terhadap komoditas unggulan belum sama. Akibatnya, pengembangan komoditas tersebut menjadi salah urus bahkan menjadi kontra produktif terhadap kemajuan komoditas unggulan dimaksud. Berikut adalah pengelompokan komoditas unggulan, sebagai rujukan untuk menempatkan posisi produk agro dari sisi teori keunggulan komoditas, antara lain :

1. Komoditas unggulan komparatif : komoditas yang diproduksi melalui dominasi dukungan sumber daya alam, di mana daerah lain tak mampu memproduksi produk sejenis. Atau pula, komoditas hasil olahan yang memiliki dukungan bahan baku yang tersedia pada lokasi usaha tersebut.
2. Komoditas unggulan kompetitif : komoditas yang diproduksi dengan cara yang efisien dan efektif. Komoditas tersebut telah memiliki nilai tambah dan daya saing usaha, baik dari aspek kualitas, kuantitas, maupun kontinuitas dan harga.
3. Komoditas unggulan spesifik : komoditas yang dihasilkan dari hasil inovasi dan kompetensi pengusaha. Produk yang dihasilkan memiliki keunggulan karena karakter spesifiknya.
4. Komoditas unggulan strategis : komoditas yang unggul karena memiliki peran penting dalam kegiatan sosial dan ekonomi.

Sebagai perbandingan, komoditas unggulan akan lebih mudah dan lebih rasional untuk dikembangkan jika memandang komoditas unggulan dari kebutuhan pasar. Dilihat dari sisi positif, jika mengelompokkan komoditas unggulan berdasarkan potensi pasarnya, mengingat ukuran keberhasilan komoditas unggulan dapat diukur dari perannya dalam memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha. Selain itu, memberikan kontribusi dalam pengembangan struktur ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adapun pengelompokan komoditas tersebut, dapat disusun sebagai berikut:

1. Komoditas unggulan pasar ekspor : komoditas yang telah mampu memenuhi persyaratan perdagangan di pasar ekspor. Ini menyangkut aspek keamanan, kesehatan, standard, dan jumlah yang memadai, sehingga komoditas tersebut diminati negara pengimpor.
2. Komoditas unggulan pasar tradisional : komoditas yang mampu memenuhi keinginan selera konsumen lokal, baik dari aspek cita rasa, bentuk, ukuran, kualitas harga, dan budaya lokal.
3. Komoditas unggulan pasar modern : komoditas yang telah memiliki daya saing tinggi dari aspek harga, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, serta biasa dibutuhkan oleh berbagai kalangan konsumen secara internasional.
4. Komoditas unggulan pasar industri : komoditas yang merupakan bahan baku utama industri manufaktur agro.
5. Komoditas unggulan pasar antar pulau : komoditas yang dibutuhkan oleh pasar antar pulau karena komoditas tersebut tak mampu diproduksi di pulau tersebut.
6. Komoditas unggulan pasar khusus : komoditas yang memang dipesan oleh pasar tertentu lengkap dengan spesifikasinya. (Yuhana, 2008).

2.5. Pengertian Perkebunan

Adapun definisi kebun menurut pendapat para ahli, antara lain adalah sebagai berikut;

Pengertian dan definisi yang digunakan dalam Buku Pembakuan Statistik Perkebunan 2007 mengacu pada UU No 18 Tahun 2004 mengenai Perkebunan serta Buku Konsep dan Definisi Baku Statistik Pertanian (BPS). Kebun adalah serangkaian kegiatan pertanian yang dilakukan untuk mengelola tanah dengan tanaman tertentu yang di sesuaikan dengan ekosistem sesuai. Sehingga sistem pengelolaan dilandaskan pada menejeman, pengetahuan, teknologi dan permodalan yang baik agar mampu mengeluarkan hasil yang maksimal.

Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan (2004); Definisi perkebunan adalah pengelolaan tanah yang dilakukan dengan kurun waktu semusim/tahunan sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dalam bidang pertanian.

Wayang (2004) Arti kebun adalah sumber daya tanaman yang mampu menghasilkan ketahan bagi alam dalam mencegah adanya isu pemansan global, sehingga diaharpkan dapat menjadi dorongan bagi semua pihak untuk dapat memanejementkan dengan baik.

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan, sedangkan tujuan pengelolaan perkebunan adalah:

- a) meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b) meningkatkan penerimaan negara;

- c) meningkatkan penerimaan devisa negara;
- d) menyediakan lapangan kerja;
- e) meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing;
- f) memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; dan
- g) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Perkebunan mempunyai tiga fungsi, yaitu:

- a) Ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional;
- b) Ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan
- c) Sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Lahan perkebunan adalah lahan usaha pertanian yang luas, biasanya terletak di daerah tropis atau subtropis, yang digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan (pertanian) dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal. Perkebunan dapat ditanami oleh tanaman industri seperti kakao, kelapa, dan teh. Dalam pengertian bahasa Inggris, “perkebunan” dapat mencakup plantation dan orchard. Ukuran luas perkebunan sangat relatif dan tergantung ukuran volume komoditas yang dipasarkannya. Namun demikian, suatu perkebunan memerlukan suatu luas minimum untuk menjaga keuntungan melalui sistem produksi yang diterapkannya. Selain itu, perkebunan selalu menerapkan cara monokultur, paling tidak untuk setiap blok yang ada di dalamnya. Ciri yang lainnya, walaupun tidak selalu demikian, adalah terdapat instalasi pengolahan atau pengemasan terhadap komoditi yang dipanen di lahan perkebunan itu, sebelum produknya dikirim ke pembeli.

Pelaku usaha perkebunan di Indonesia dibedakan atas dua golongan yaitu pekebun dan perusahaan perkebun. Pekebun adalah perorangan yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu, atau lebih dikenal dengan perkebunan rakyat. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan berbentuk badan hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas baik milik negara maupun swasta, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

Perbedaan keduanya dapat dilihat sbb:

Perkebunan Rakyat	Perkebunan Besar
<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lahan relatif sempit 2. Modal lemah 3. Tingkat teknologi tradisional 4. Pengolahan hasil konvensional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lahan besar 2. Modal kuat 3. Teknologi maju 4. Pengolahan hasil modern

2.6. Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Kelestarian lingkungan yang tidak dijaga, akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang, atau bahkan akan hilang.

Pembangunan berkelanjutan mengandung arti sudah tercapainya keadilan sosial dari generas ke generasi. Dilihat dari pengertian lainnya, pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan nasional yang melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem.

Kekhawatiran perkembangan perkebunan moderen akan dapat teratasi dengan mengembangkan konsep perkebunan berkelanjutan, yang pada intinya selain memperhatikan pemenuhan kebutuhan manusia yang selalu meningkat dan berubah, sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Perkebunan berkelanjutan merupakan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi terhadap perubahan teknologi dan kelembagaan, sehingga dapat menjamin pemenuhan dan pemuasan kebutuhan manusia secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang. Untuk itu, pembangunan di sektor perkebunan harus mampu mengkonservasi tanah, air, tanaman dan sumber genetik biomatang, tidak merusak lingkungan, secara teknis tepat guna, secara ekonomi layak dan secara sosial dapat diterima.

2.7. Analytical Hierarchy Process (AHP)

Metode AHP dikembangkan oleh Prof Thomas Lorie Saaty dari Wharton Business School di awal tahun 1970, yang sering digunakan untuk mencari ranking atau urutan prioritas dari berbagai alternatif dalam pemecahan suatu permasalahan. Pada dasarnya AHP adalah suatu teori umum untuk menemukan skala rasio, baik dari perbandingan berpasangan yang diskrit maupun kontinu.

Analytic Hierarchy Process (AHP) mempunyai landasan aksiomatik yang terdiri dari :

1. *Reciprocal Comparison*, yang mengandung arti bahwa matriks perbandingan berpasangan yang terbentuk harus bersiat berkebalikan. Misalnya, jika A adalah k kali lebih penting dari pada B maka B adana $1/k$ kali penting dari A.
2. *Homogeneity*, yaitu mengandung arti kesamaan dalam melakukan perbandingan misalnya, tidak dimungkinkan membandingkan jeruk

dengan bola tenis dalam hal rasa, akan tetapi lebih relevan jika membandingkan dalam hal berat.

3. *Depedence*, yang berarti setiap level mempunyai kaitan (*Complete hierarchy*) walaupun mungkin saja terjadi hubungan yang tidak sempurna (*incomplete hierarchy*).
4. *Expectation*, yang berarti menonjolkan penilaian yang bersifat ekspektasi dan preferensi dari pengambilan keputusan. Penilaian dapat merupakan data kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif.

Secara umum pengambilan keputusan dengan metode AHP didarakan pada langkah-langkah berikut:

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan.
2. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan kriteria-kriteria dan alternatif-alternatif pilihan yang ingin di ranking.
3. Membentuk matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi. relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing masing tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Perbandingan dilakukan berdasarkan pilihan atau *judgement* dari pembuat keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya.
4. Menormalkan data yaitu dengan membagi nilai dari setiap elemen di dalam matriks yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom.
5. Menghitung *eigen vector* dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai *eigen vector* merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk mensintesis pilihan dalam penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hirarki terendah sampai pencapaian tujuan.
6. Mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki.

7. Menguji konsistensi hirarki. Jika tidak memenuhi dengan $CR < 0,100$, maka penilaian harus diulang kembali.

Rasio Konsistensi (CR) merupakan batas ketidakkonsistenan (inconsistency) yang ditetapkan Saaty. Rasio Konsistensi dirumuskan sebagai perbandingan indeks konsistensi (RI). Angka pembanding pada perbandingan berpasangan adalah skala 1 sampai 9, di mana:

- a. Skala 1 = setara antara kepentingan yang satu dengan yang lainnya
- b. Skala 3 = kategori sedang dibandingkan dengan kepentingan lainnya
- c. Skala 7 = kategori amat kuat dibandingkan dengan kepentingan lainnya
- d. Skala 9 = kepentingan satu secara ekstrim lebih kuat dari kepentingan lainnya.
- e. Skala 2, 4, 6, 8 = Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang berdekatan, nilai ini diberikan bila ada dua kompromi di antara 2 pilihan.

Prioritas alternatif terbaik dari total rangking yang diperoleh merupakan rangking yang dicari dalam *Analytic Hierarchy Process*.

Prinsip dasar *Analytic Hierarchy Process* ;

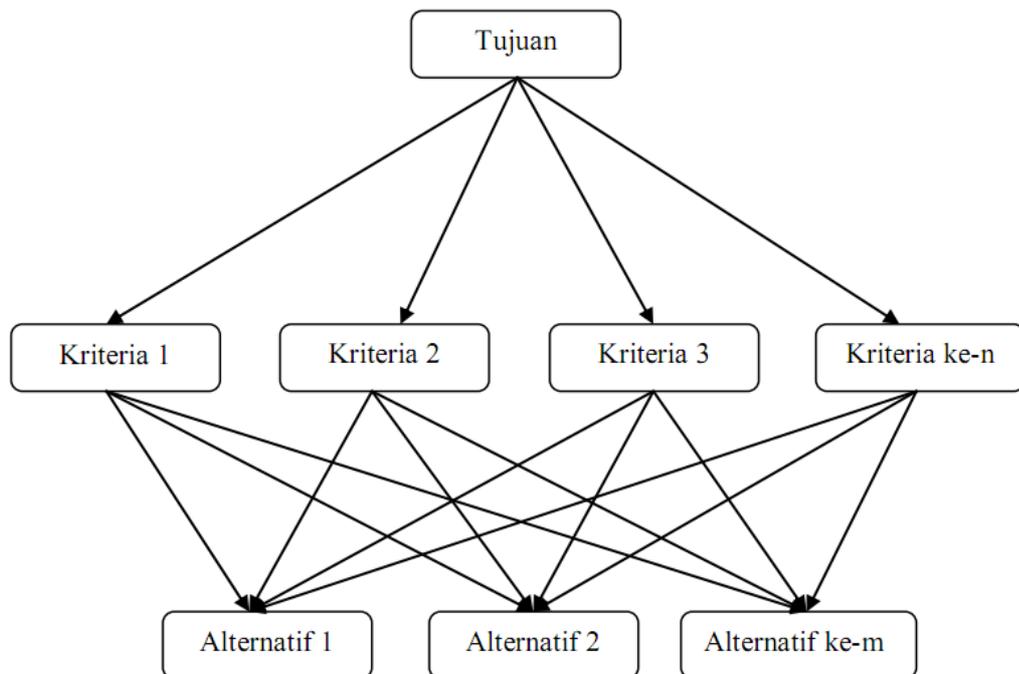
1. *Decomposition* ; Pengertian decomposition adalah memecahkan atau membagi problema yang utuh menjadi unsur-unsurnya ke bentuk hirarki proses pengambilan keputusan, di mana setiap unsur atau elemen saling berhubungan. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, pemecahan dilakukan terhadap unsur-unsur sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut, sehingga didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan yang hendak dipecahkan. Struktur hirarki keputusan tersebut dapat dikategorikan sebagai complete dan incomplete. Suatu hirarki keputusan disebut complete jika semua elemen pada suatu tingkat memiliki hubungan terhadap semua elemen yang ada pada tingkat berikutnya, sementara hirarki

keputusan incomplete kebalikan dari hirarki yang complete yakni tidak semua unsur pada masing-masing jenjang mempunyai hubungan (gambar 3 dan 4). Pada umumnya problem nyata mempunyai karakteristik struktur yang incomplete. Bentuk struktur dekomposition yakni :

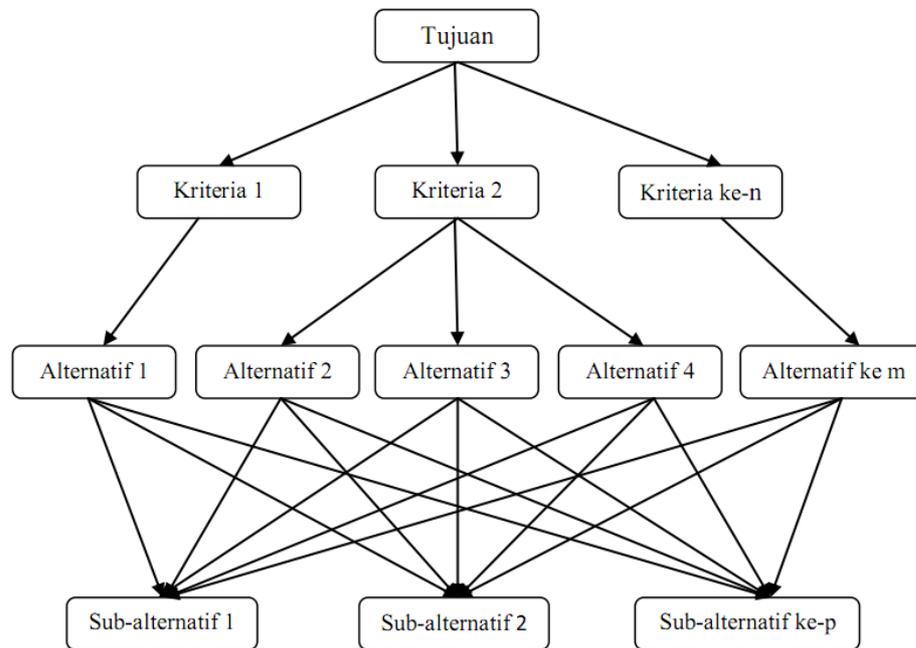
Tingkat pertama : Tujuan keputusan (Goal)

Tingkat kedua : Kriteria-kriteria

Tingkat ketiga : Alternatif-alternatif



Gambar 3. Struktur Hirarki yang Complete.



Gambar.4. Struktur Hirarki yang Incomplete

2. *Decomposition Judgement.* dilakukan dengan penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkatan di atasnya.
3. *Synthesis of Priority* ; dilakukan dengan menggunakan eigen vektor method untuk mendapatkan bobot relatif bagi unsur unsur pengambilan keputusan.
4. *Logical Consistency* merupakan karakteristik penting AHP. Hal ini dicapai dengan mengagresikan seluruh eigen vektor yang diperoleh dari berbagai tingkatan hirarki dan selanjutnya diperoleh suatu vektor composite tertimbang yang menghasilkan urutan pengambilan keputusan.

Tabel .5. Matriks Perbandingan Berpasangan

	A_1	A_2	...	A_n
A_1	a_{11}	a_{12}	...	a_{1n}
A_2	a_{21}	A_{22}	...	a_{2n}
:	:	:	:	:
A_m	a_{m1}	a_{m2}	...	a_{mn}

Nilai adalah nilai perbandingan elemen (baris) terhadap (kolom) yang menyatakan hubungan :

1. Seberapa jauh tingkat kepentingan A_1 (baris) terhadap kriteria C dibandingkan dengan A_1 (kolom) atau
2. Seberapa jauh dominasi A_1 (baris) terhadap A_1 (kolom) atau
3. Seberapa banyak sifat kriteria C terdapat pada A_1 (baris) dibandingkan dengan A_1 (kolom).

Nilai numerik yang dikenakan untuk seluruh perbandingan diperoleh dari skala perbandingan 1 sampai 9 yang telah ditetapkan oleh Saaty, seperti pada tabel berikut ini.

Tabel.6. Skala Saaty

Bobot	Kepentingan
1	Kedua elemen sama pentingnya. Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar (Equal)
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya, Pengalaman dan penilaian sedikit menyokong satu elemen dibandingkan elemen yang lainnya (Moderate)
5	Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya, Pengalaman dan penilaian sangat kuat menyokong satu elemen dibandingkan elemen yang lainnya (Strong)
7	Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya. Satu elemen yang kuat disokong dan dominan terlihat dalam praktek (Very Strong)
9	Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya. Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan (Very strong)
2,4,6,8	Nilai -nilai antara dua nilai pertimbangan pertimbangan yang berdekatan, Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi di antara 2 pilihan

2.8. Analisis SWOT

Untuk menganalisis profil suatu operasional organisasi, perusahaan dan lainnya akan digunakan pendekatan yaitu analisis SWOT. SWOT singkatan dari Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunity (Peluang), Threat (Tantangan). Analisis SWOT berisi evaluasi faktor internal perusahaan berupa kekuatan dan kelemahannya dan factor eksternal berupa peluang dan tantangan.

Menurut Rangkuti (2001), analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*).

Sebelum melakukan analisis, maka diperlukan tahap pengumpulan data yang terdiri atas tiga model yaitu :

a. Matrik Faktor Strategi Internal

Sebelum membuat matriks faktor strategi internal, kita perlu mengetahui terlebih dahulu cara-cara penentuan dalam membuat tabel IFAS.

- Susunlah dalam kolom 1 faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan).
- Beri rating masing-masing faktor dalam kolom 2 sesuai besar kecilnya pengaruh yang ada pada faktor strategi internal, mulai dari nilai 4 (sangat baik), nilai 3 (baik), nilai 2 (cukup baik) dan nilai 1 (tidak baik) terhadap kekuatan nilai "rating" terhadap kelemahan bersifat negatif, kebalikannya.
- Beri bobot untuk setiap faktor dari 0 sampai 1 pada kolom bobot (kolom 3). Bobot ditentukan secara subyektif, berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis perusahaan.

- Kalikan rating pada kolom 2 dengan bobot pada kolom 3, untuk memperoleh skoring pada kolom 4.
- Jumlah skoring (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategi internalnya.

Hasil identifikasi faktor kunci internal yang merupakan kekuatan dan kelemahan, pembobotan dan rating dipindahkan ke tabel Matrik Faktor Strategi Internal (IFAS) untuk dijumlahkan dan kemudian di perbandingkan antara total skor kekuatan dan kelemahan.

b. Matrik Faktor Strategi Eksternal

Sebelum membuat matrik faktor strategi eksternal, kita perlu mengetahui terlebih dahulu cara-cara penentuan dalam membuat tabel EFAS.

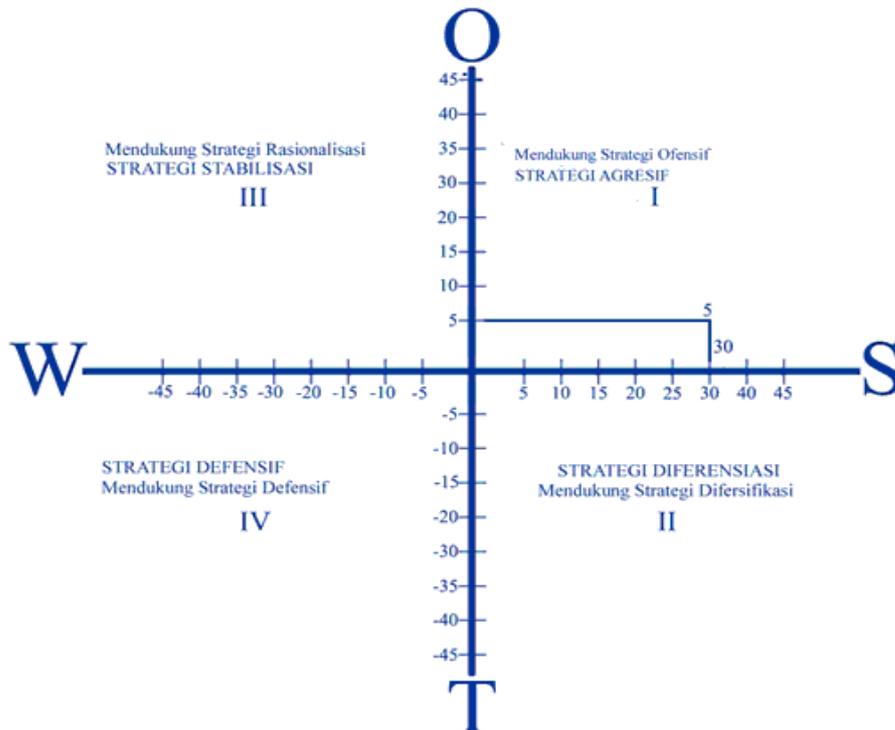
- Susunlah dalam kolom 1 faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman). - Beri rating dalam masing-masing faktor dalam kolom 2 sesuai besar kecilnya pengaruh yang ada pada faktor strategi eksternal, mulai dari nilai 4 (sangat baik), nilai 3 (baik), nilai 2 (cukup baik) dan nilai 1 (tidak baik) terhadap kekuatan nilai “rating” terhadap kelemahan bersifat negatif, kebalikannya.
- Beri bobot untuk setiap faktor dari 0 sampai 1 pada kolom bobot (kolom 3). Bobot ditentukan secara subyektif, berdasarkan pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis perusahaan.
- Kalikan rating pada kolom 2 dengan bobot pada kolom 3, untuk memperoleh skoring pada kolom 4.
- Jumlah skoring (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini

menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-faktor strategi eksternalnya.

Hasil identifikasi faktor kunci internal yang merupakan kekuatan dan kelemahan, pembobotan dan rating dipindahkan ke tabel Matrik Faktor Strategi Eksternal (EFAS) untuk dijumlahkan dan kemudian di perbandingkan antara total skor kekuatan dan kelemahan.

c. Matriks Posisi

Hasil analisis pada tabel matriks faktor strategi internal dan faktor strategi eksternal dipetakan pada matriks posisi dengan cara Sumbu horizontal (x) menunjukkan kekuatan dan kelemahan, sedangkan sumbu vertikal (y) menunjukkan peluang dan ancaman.



Gambar.5. Grafik Analisis SWOT

- Kuadran 1 : ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*Growth oriented strategy*).
- Kuadran 2 : Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar).
- Kuadran 3 : Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak, ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah- masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik (turn around).
- Kuadran 4 : Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal.

Alat untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.

Matrik ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif stretegis seperti yang dijelaskan dalam Tabel berikut:

Tabel. 7. Matriks SWOT

EFAS	IFAS	KEKUATAN (Strengths) Tentukan 1-10 faktor kekuatan internal	KELEMAHAN (Weakness) Tentukan 1-10 faktor kekuatan internal
PELUANG (Opportunities) Menentukan 1-10 faktor kekuatan internal		STRATEGI (SO) Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI (WO) Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
ANCAMAN (Threats) Tentukan 1-10 faktor kekuatan internal		STRATEGI (ST) Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI (WT) Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber : Rangkuti, 2001

Berdasarkan Matriks SWOT diatas maka didapatkan 4 langkah strategi yaitu sebagai berikut :

- a. Strategi SO Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- b. Strategi ST Ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.
- c. Strategi WO Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
- d. Strategi WT Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman (Rangkuti,2009).

2.9. Pengertian Agribisnis

Agribisnis berangkat dari kata *Agribusiness*, dimana *Agri=Agriculture* artinya pertanian dan *Business* berarti usaha atau kegiatan yang berorientasi profit. Jadi secara sederhana Agribisnis (*agribusiness*) adalah usaha atau kegiatan pertanian serta apapun yang terkait dengan pertanian berorientasi profit.

Istilah "*agribusiness*" untuk pertama kali dikenal oleh masyarakat Amerika Serikat pada tahun 1955, ketika John H. Davis menggunakan istilah tersebut dalam makalahnya yang disampaikan pada "*Boston Conference on Distribution*". Kemudian John H. Davis dan Ray Goldberg kembali lebih memasyarakatkan agribisnis melalui buku mereka yang berjudul "*A Conception of Agribusiness*" yang terbit tahun 1957 di Harvard University. Ketika itu kedua penulis bekerja sebagai guru besar pada Universitas tersebut. Tahun 1957, itulah dianggap oleh para pakar sebagai tahun kelahiran dari konsep agribisnis. Dalam buku tersebut, Davis dan Golberg mendefinisikan agribisnis sebagai berikut: "*The sum total of all operation involved in the manufacture and distribution of farm supplies: Production operation on farm: and the storage, processing and distribution of farm commodities and items made from them*". Berikut pengertian agribisnis sebagai suatu sistem menurut beberapa ahli :

Arsyad dan kawan-kawan menyatakan Agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Pertanian dalam arti luas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian.

E. Paul Roy memandang agribisnis sebagai suatu proses koordinasi berbagai sub-sistem. Koordinasi merupakan fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sub-sistem menjadi sebuah sistem.

Wibowo mengartikan agribisnis mengacu kepada semua aktivitas mulai dari pengadaan, prosesing, penyaluran sampai pada pemasaran produk yang dihasilkan oleh suatu usaha tani atau agroindustri yang saling terkait satu sama lain.

Agribisnis adalah kegiatan yang berhubungan dengan penanganan komoditi pertanian dalam arti luas, yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan masukan dan keluaran produksi (agroindustri), pemasaran masukan-keluaran pertanian dan kelembagaan penunjang kegiatan. Yang dimaksud dengan berhubungan adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian. (Downey and Erickson. 1987)

Sebagai subjek akademik, agribisnis mempelajari strategi memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pasca panen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Dengan definisi ini dapat diturunkan ruang lingkup agribisnis yang mencakup semua kegiatan pertanian yang dimulai dengan pengadaan penyaluran sarana produksi (*the manufacture and distribution of farm supplies*), produksi usaha tani (*Production on the farm*) dan pemasaran (*marketing*) produk usaha tani atau pun olahannya. Ketiga kegiatan ini mempunyai hubungan yang erat, sehingga gangguan pada salah satu kegiatan akan berpengaruh terhadap kelancaran seluruh kegiatan dalam bisnis. Karenanya agribisnis digambarkan sebagai satu sistem yang terdiri dari tiga subsistem, serta tambahan satu subsistem lembaga penunjang.

Secara konseptual sistem agribisnis dapat diartikan sebagai semua aktifitas, mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi (input) sampai dengan pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh usaha tani serta agroindustri, yang saling terkait satu sama lain. Dengan demikian sistem agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai subsistem yaitu:

A. Subsistem Agribisnis/Agroindustri Hulu

Meliputi pengadaan sarana produksi pertanian antara lain terdiri dari benih, bibit, makanan ternak, pupuk, obat pemberantas hama dan penyakit, lembaga kredit, bahan bakar, alat-alat, mesin, dan peralatan produksi pertanian. Pelaku-pelaku kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi adalah perorangan, perusahaan swasta, pemerintah, koperasi. Betapa pentingnya subsistem ini mengingat perlunya keterpaduan dari berbagai unsur itu guna mewujudkan sukses agribisnis. Industri yang menyediakan sarana produksi pertanian disebut juga sebagai agroindustri hulu (*upstream*).

B. Subsistem budidaya / usahatani

Usaha tani menghasilkan produk pertanian berupa bahan pangan, hasil perkebunan, buah-buahan, bunga dan tanaman hias, hasil ternak, hewan dan ikan. Pelaku kegiatan dalam subsistem ini adalah produsen yang terdiri dari petani, peternak, pengusaha tambak, pengusaha tanaman hias dan lain-lain.

C. Subsistem Agribisnis/agroindustri Hilir meliputi Pengolahan dan Pemasaran (Tata niaga) produk pertanian dan olahannya

Dalam subsistem ini terdapat rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan produk usaha tani, pengolahan, penyimpanan dan

distribusi. Sebagian dari produk yang dihasilkan dari usaha tani didistribusikan langsung ke konsumen didalam atau di luar negeri. Sebagian lainnya mengalami proses pengolahan lebih dahulu kemudian didistribusikan ke konsumen. Pelaku kegiatan dalam subsistem ini ialah pengumpul produk, pengolah, pedagang, penyalur ke konsumen, pengalengan dan lain-lain. Industri yang mengolah produk usahatani disebut agroindustri hilir (*downstream*). Peranannya amat penting bila ditempatkan di pedesaan karena dapat menjadi motor penggerak roda perekonomian di pedesaan, dengan cara menyerap/mencipakan lapangan kerja sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

D. Subsistem jasa layanan pendukung agribisnis (kelembagaan)

Subsistem jasa layanan pendukung agribisnis (kelembagaan) atau *supporting institution* adalah semua jenis kegiatan yang berfungsi untuk mendukung dan melayani serta mengembangkan kegiatan sub-sistem hulu, sub-sistem usaha tani, dan sub-sistem hilir. Lembaga-lembaga yang terkait dalam kegiatan ini adalah penyuluh, konsultan, keuangan, dan penelitian. Lembaga penyuluhan dan konsultan memberikan layanan informasi yang dibutuhkan oleh petani dan pembinaan teknik produksi, budidaya pertanian, dan manajemen pertanian. Untuk lembaga keuangan seperti perbankan, model ventura, dan asuransi yang memberikan layanan keuangan berupa pinjaman dan penanggungan risiko usaha (khusus asuransi). Sedangkan lembaga penelitian baik yang dilakukan oleh balai-balai penelitian atau perguruan tinggi memberikan layanan informasi teknologi produksi, budidaya, atau teknik manajemen mutakhir hasil penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan pandangan bahwa agribisnis sebagai suatu sistem dapat terlihat dengan jelas bahwa subsistem-subsistem tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu dengan yang lain. Subsistem

agribisnis hulu membutuhkan umpan balik dari subsistem usaha tani agar dapat memproduksi sarana produksi yang sesuai dengan kebutuhan budidaya pertanian. Sebaliknya, keberhasilan pelaksanaan operasi subsistem usaha tani bergantung pada sarana produksi yang dihasilkan oleh subsistem agribisnis hilir. Selanjutnya, proses produksi agribisnis hilir bergantung pada pasokan komoditas primer yang dihasilkan oleh subsistem usahatani. Subsistem jasa layanan pendukung, seperti telah dikemukakan, keberadaannya tergantung pada keberhasilan ketiga subsistem lainnya. Jika subsistem usahatani atau agribisnis hilir mengalami kegagalan, sementara sebagian modalnya merupakan pinjaman maka lembaga keuangan dan asuransi juga akan mengalami kerugian.

Dalam hal pengelolaan sub sistem agribisnis diatas memerlukan penanganan/manajerial. Maka kekhususan manajemen agribisnis antara lain dapat dinyatakan sebagaimana berikut :

1. Keanekaragaman jenis bisnis yang sangat besar pada sektor agribisnis yaitu dari para produsen dasar sampai para pengirim, perantara, pedagang borongan, pemproses, pengepak, pembuat barang, usaha pergudangan, pengangkutan, lembaga keuangan, pengecer, kongsi bahan pangan, restoran dan lainnya.
2. Besarnya jumlah agribisnis, secara kasar berjuta-juta bisnis yang berbeda telah lazim menangani aliran dari produsen sampai ke pengecer.
3. Cara pembentukan agribisnis dasar di sekeliling pengusaha tani. Para pengusaha tani ini menghasilkan beratus-ratus macam bahan pangan dan sandang (serat).
4. Keanekaragaman yang tidak menentu dalam hal ukuran agribisnis, dari perusahaan raksasa sampai pada organisasi yang di kelola oleh satu orang.

5. Agribisnis yang berukuran kecil dan harus bersaing di pasar yang relative bebas dengan penjual yang berjumlah banyak dan pembeli yang lebih sedikit.
6. Falsafah hidup tradisional yang dianut oleh para pekerja agribisnis cenderung membuat agribisnis lebih berpandangan konservatif dibanding bisnis lainnya.
7. Kenyataan bahwa agribisnis cenderung berorientasi pada masyarakat, banyak di antaranya terdapat dikota kecil dan pedesaan, dimana hubungan antar perorangan penting dan ikatan bersifat jangka panjang.
8. Kenyataan bahwa agribisnis yang sudah menjadi industri raksasa sekali pun sangat bersifat musiman.
9. Agribisnis bertalian dengan gejala alam.
10. Dampak dari program dan kebijakan pemerintah mengena langsung pada agribisnis. Misalnya harga gabah sangat dipengaruhi oleh peraturan pemerintah.

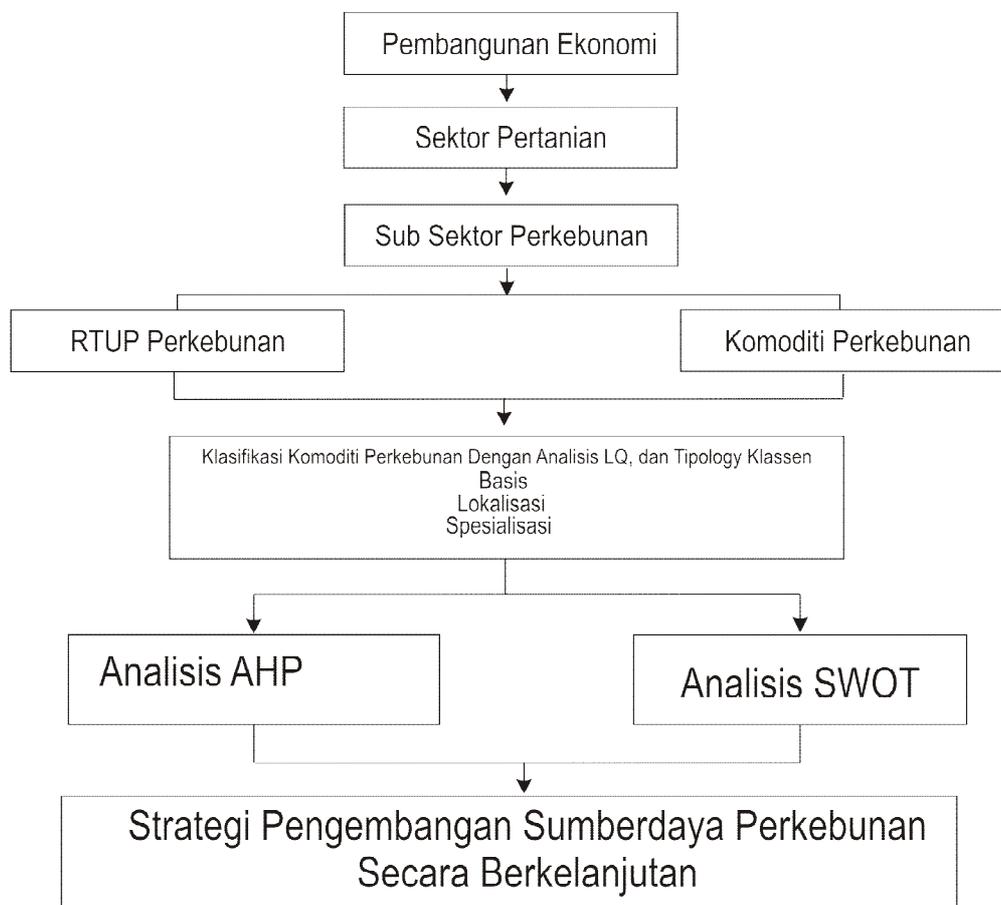
Apabila subsistem usahatani dimodernisasi / dikembangkan, maka akan membentuk sebuah sistem agribisnis. Dimana subsistem usahatani akan mempunyai keterkaitan erat ke belakang (*backward linkage*) yang berupa peningkatan kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi, dan kaitan ke depan (*forward linkage*) yang berupa peningkatan kegiatan pasca panen (terdiri dari pengolahan dan pemasaran produk pertanian dan olahannya). Jika subsistem usahatani digambarkan sebagai proses menghasilkan produk-produk pertanian di tingkat primer (biji, buah, daun, telur, susu, produk perikanan, dan lain-lain), maka kaitannya dengan industri berlangsung ke belakang (*backward linkage*) dan ke depan (*forward linkage*). Kaitan ke belakang berlangsung karena usahatani memerlukan input seperti bibit dan benih berkualitas, pupuk, pestisida, pakan ternak, alat dan mesin pertanian, modal, teknologi, serta manajemen. Sedangkan keterkaitan erat ke depan dapat diartikan bahwa

suatu industri muncul karena mempergunakan hasil produksi budidaya/usahatani sebagai bahan bakunya, atau bisa juga suatu produk agroindustri digunakan untuk bahan baku industri lainnya. Kaitan ke depan berlangsung karena produk pertanian mempunyai berbagai karakteristik yang berbeda dengan produk industri, antara lain misalnya: musiman, tergantung pada cuaca, membutuhkan ruangan yang besar untuk menyimpannya (*Bulky / voluminous*), tidak tahan lama/mudah rusak (*perishable*), harga fluktuatif, serta adanya kebutuhan dan tuntutan konsumen yang tidak hanya membeli produknya saja, tapi makin menuntut persyaratan kualitas (atribut produk) bila pendapatan meningkat. Selanjutnya kaitan ke belakang ini disebut juga agroindustri Hulu (*Up stream*) dan kaitan ke depan disebut agroindustri hilir (*Down stream*).

Keterkaitan berikutnya adalah kaitan ke luar (*outside linkage*), ini terjadi karena adanya harapan agar system agribisnis dapat berjalan/berlangsung secara terpadu (*integrated*) antar subsistem. Kaitan ke luar ini berupa lembaga penunjang kelancaran antar subsistem. Organisasi pendukung agribisnis merupakan organisasi sebagai pendukung atau penunjang jalannya kegiatan agribisnis yakni dalam hal untuk mendukung dan melayani serta mengembangkan kegiatan subsistem hulu, sub-sistem usaha tani, dan sub-sistem hilir. Organisasi pendukung agribisnis ini biasa disebut juga dengan organisasi jasa pendukung agribisnis. Seluruh kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis, seperti lembaga keuangan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga transportasi, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintah (kebijakan fiskal dan moneter, perdagangan internasional, kebijakan tata-ruang, serta kebijakan lainnya).

2.9. Kerangka Pikir

Untuk pendekatan masalah yang seperti diuraikan di atas, maka analisis pengembangan sumberdaya perkebunan secara berkelanjutan di Provinsi Jambi menggunakan suatu kerangka pikir teoritis dengan pendekatan produksi komoditi perkebunan sebagaimana bagan di bawah ini;



Gambar 6. Kerangka Teoritis Pendekatan Masalah Pengembangan Sumberdaya Perkebunan Secara Berkelanjutan di Provinsi Jambi

BAB. III

METODOLOGI

3.1. Tempat dan Waktu Analisis

Analisis Pengembangan Sumber Daya Perkebunan Secara Berkelanjutan di Provinsi Jambi ini dilaksanakan dari Bulan Oktober – November 2019 dan bertempat dalam wilayah Provinsi Jambi dengan lingkup Kabupaten/Kota .

No	Item Kegiatan	Bulan Oktober				Bulan November			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	DesainKegiatan	■	■						
2.	Pengumpulan data, informasi dan literature	■	■						
3.	Pengolahan data awal analisis tahap I	■	■	■	■				
4.	PenyusunanLaporan Pendahuluan			■	■	■	■		
5.	PresentasiLaporan Pendahuluan					■	■		
6.	Survei					■	■		
7.	Penyusunan Laporan Akhir					■	■	■	■
8.	LaporanAkhir							■	■

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam analisis ini menggunakan data sekunder yang telah dikumpulkan dan diperoleh dalam bentuk studi kepustakaan dan mencatat dari buku literature, serta jurnal jurnal yang berhubungan dengan masalah yang sedang dianalisis. Sumber sumber data yang digunakan tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Jambi berupa data *time series* dari Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku 2010 menurut lapangan usaha dari periode tahun 2014–2018 (lima tahun). Sedangkan data primer digunakan untuk analisa strategi pengembangan.

3.3. Teknik dan Model Analisis Data

Analisis dilaksanakan dengan metode analisis deskriptif yaitu menggambarkan kondisi objek analisis apa adanya. Metode analisis bersifat kualitatif dan kuantitatif. secara deskriptif digunakan alat analisis yaitu: Analisis Location Quotient (LQ), Tipologi Klassen, Analisis Indeks Spesialisasi (SI), Analisis Hierarki Process dan Analisis Matriks SWOT. Pengumpulan data sekunder maupun primer dilakukan dengan cara : wawancara dengan responden, focus discussion group, studi pustaka untuk mendapatkan referensi dan informasi pendukung analisis ini.

Metode analisis bersifat kualitatif dan kuantitatif. secara deskriptif digunakan alat analisis yaitu: Analisis Location Quotient (LQ), Tipologi Klassen, Analisis Indeks Spesialisasi (SI), Analisis Hierarchy Process dan Analisis Matriks SWOT. Pengumpulan data sekunder maupun primer dilakukan dengan cara : wawancara dengan responden, *focus discussion group*, studi pustaka untuk mendapatkan referensi dan informasi pendukung analisis ini.

3.3.1. Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk menentukan subsektor unggulan, ekonomi basis suatu wilayah dan komoditi basis wilayah. Penggunaan pendekatan LQ dimanfaatkan untuk menentukan sebaran komoditas atau melakukan identifikasi wilayah yang berdasarkan potensinya. Kelebihan metode ini dalam mengidentifikasi komoditas unggulan antara lain adalah penerapannya sederhana, mudah dan tidak memerlukan program pengolahan data yang rumit. Kelemahannya adalah data yang digunakan harus akurat dan range yang lama. Hasil olahan LQ tidak banyak manfaat jika data yang digunakan tidak valid. Oleh karena itu data yang digunakan perlu diklarifikasi dahulu dengan beberapa sumber data lainnya sehingga mendapatkan konsistensi data yang akurat

(Hendayana.2003). Dalam analisis ini digunakan data yang dikeluarkan instansi resmi pemerintahan yaitu Biro Pusat Statistik.

Berdasarkan pemahaman terhadap teori ekonomi basis, teknik LQ relevan digunakan sebagai metode dalam menentukan komoditas unggulan khususnya dari sisi penawaran (produksi atau populasi). Untuk komoditas yang berbasis lahan seperti tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, perhitungannya didasarkan pada lahan pertanian (area tanam atau area panen), dan produksi atau produktivitas. Sedangkan untuk komoditas pertanian yang tidak berbasis lahan seperti usaha ternak, dasar perhitungannya digunakan jumlah populasi (ekor).

Adapun rumus Location Quotient (LQ) sebagai berikut :

$$LQ = \left(\frac{pi}{pt} \right) / \left(\frac{Pi}{Pt} \right)$$

Dimana :

LQ = Location Quotient

pi = Produksi jenis komoditas i pada tingkat kabupaten/kota

pt = Produksi total komoditas pada tingkat kabupaten/kota

Pi = Produksi jenis komoditas i pada tingkat Provinsi Jambi

Pt = Produksi Total komoditas pada tingkat wilayah Provinsi Jambi

Dari hasil perhitungan analisis Location Quotient dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Jika $LQ > 1$; maka komoditas yang bersangkutan ditingkat kabupaten/kota lebih berspesialisasi atau lebih dominan dibandingkan di tingkat provinsi. Komoditas ini dalam perekonomian ditingkat kabupaten/kota memiliki keunggulan komparatif dan dikategorikan sebagai komoditas "Basis".

2. Jika $LQ = 1$; maka komoditas yang bersangkutan baik ditingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi memiliki tingkat spesialisasi atau dominan yang sama.
3. Jika $LQ < 1$; maka komoditas yang bersangkutan ditingkat kabupaten/kota kurang berspesialisasi atau kurang dominan dibandingkan di tingkat provinsi. Komoditas ini dalam perekonomian ditingkat kabupaten/kota tidak memiliki keunggulan komparatif dan dikategorikan sebagai komoditas “Non-Basis”.

3.3.2. Analisis Tipologi Klassen (Klassen Typology)

Menurut Klassen, alat analisis tipologi wilayah digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing – masing daerah. Analisis ini bertujuan untuk melakukan klasifikasi sektor-sektor dalam perekonomian wilayah dengan mempertimbangkan pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap sektor yang sama di tingkat wilayah yang lebih tinggi (propinsi).

Tipologi Klassen juga merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sektor, subsektor, usaha/industri, atau komoditas unggulan atau prioritas suatu daerah. Dalam analisis Klassen ini akan diperoleh informasi perbandingan antara kontribusi dan pertumbuhan sektor maupun subsektor ekonomi.

Tipologi kelas dalam analisis ini membandingkan tingkat dan laju pertumbuhan produksi komoditi Perkebunan Provinsi Jambi dalam suatu wilayah:

Laju pertumbuhan Produksi komoditi	Produksi Provinsi	
	$y_i > y$	$y_i < y$
$r_i > r$	Prima (I)	Maju Tapi Tertekan (II)
$r_i < r$	Potensial (III)	Terbelakang (IV)

Gambar 7. Tipologi Klassen

Keterangan:

r_i : Laju pertumbuhan subsektor pertanian i wilayah

r : Laju pertumbuhan subsektor pertanian i daerah

y_i : Kontribusi sektor pertanian i wilayah

y : Kontribusi sektor pertanian i daerah

Ada empat tipologi yang menjelaskan posisi suatu sektor atau subsektor ekonomi dalam analisis Klassen, yaitu:

- Tipologi I (Sektor Prima): Sektor ini merupakan sektor yang maju dan tumbuh pesat, yaitu sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan dan kontribusi terhadap produksi Perkebunan yang lebih tinggi dibanding tingkat pertumbuhan dan kontribusi sektor yang sama pada produksi Perkebunan Propinsi. (*high growth and income*).
- Tipologi II (Sektor area Berkembang; Maju tapi tertekan; tertekan (*high income but low growth*)).
- Tipologi III: Sektor area potensial ; Berkembang dengan cepat; atau masih dapat berkembang dengan pesat (*high growth but low income*)
- Tipologi IV: Sektor area tertinggal; yang relatif tertinggal . (*low growth and low income*).

3.3.3. Analisis Spesialisasi (SI)

Analisis Spesialisasi (SI) berfungsi untuk melihat spesialisasi produksi perkebunan di Kabupaten/Kota terhadap jenis komoditi tertentu.

Analisis ini tergolong juga analisis ekonomi wilayah yang digunakan untuk mengkaji spesialisasi suatu wilayah dalam komoditas agribisnis menurut Baruwadi (2008:2).

Koefisien spesialisasi diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$S I = \left(\frac{v_i}{v_t} - \frac{V_i}{V_t} \right) \times 100$$

- SI = Spesialisasi Indeks
 v_i = produksi total produksi komoditi perkebunan jenis i di tingkat kabupaten/kota i
 v_t = produksi total produksi komoditi perkebunan di tingkat kabupaten/kota i
 V_i = produksi total produksi komoditi perkebunan jenis i di tingkat Provinsi.
 V_t = produksi total komoditi perkebunan Provinsi Jambi

Kesimpulan :

- SI > 1 = Terjadinya spesialisasi produksi komoditi di kabupaten/kota i secara relatif dibandingkan dengan daerah lain dalam wilayah Provinsi Jambi.
- SI < 1 = Tidak terjadinya spesialisasi produksi komoditi di Kabupaten/kota i dibandingkan dengan daerah lain dalam wilayah Provinsi Jambi

3.3.4. Metode Pengambilan Keputusan Komoditi (AHP)

Proses hirarki analitik (analytical hierarchy process, AHP) merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan dalam menyelesaikan persoalan kesisteman, mencakup penentuan prioritas pilihan-pilihan dengan banyak kriteria. Saaty (1993), menyatakan bahwa AHP adalah penyederhanaan suatu situasi yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam bagian-bagian komponennya, menata bagian atau variabel itu ke dalam suatu susunan hirarki, memberi nilai numerik pada pertimbangan subyektif tentang relative pentingnya setiap variabel, dan mensintesis berbagai pertimbangan tersebut untuk menetapkan variabel yang mana yang memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil pada situasi tersebut.

Dalam hal ini, untuk pemecahan masalah yang menggunakan AHP, beberapa prinsip yang harus dipahami adalah prinsip pemecahan (decomposition), prinsip penilaian komparatif (*comparative judgement*), prinsip sintesa prioritas (*synthesis of priority*), dan prinsip konsistensi logis (*logical consistency*). Marimin (2004), menyatakan terdapat 4 (empat) prinsip dasar dari kerja Analitik Hirarki Proses (AHP), seperti dijelaskan di bawah ini:

1. **Penyusunan Hirarki;** Penyusunan hirarki adalah menguraikan persoalan yang akan diselesaikan, diuraikan menjadi unsur melalui prinsip pemecahan (*decomposition*), yaitu kriteria dan alternatif, kemudian disusun menjadi struktur hirarki.
2. **Penilaian Kriteria dan Alternatif;** Kriteria dan alternatif dinilai melalui perbandingan berpasangan (*comparative judgement*). Marimin (2004) yang mengutip Saaty (1993), untuk berbagai persoalan skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat.
3. **Penentuan Prioritas;** Untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*). Nilai-nilai perbandingan relative kemudian diolah untuk menentukan

peringkat relatif dari seluruh alternatif. Baik kriteria kualitatif maupun kuantitatif, dapat dibandingkan sesuai dengan *judgement* yang ditentukan untuk menghasilkan bobot dan prioritas. Bobot atau prioritas dihitung dengan manipulasi matriks atau melalui penyelesaian persamaan matematik.

4. **Konsistensi Logis** Konsistensi memiliki dua makna, yaitu; (1) Pertama adalah objek-objek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi, dan (2) Kedua adalah menyangkut tingkat hubungan antara objek-objek yang didasarkan pada kriteria tertentu.

Menurut Saaty (1993), keuntungan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan metode AHP, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberi satu model tunggal yang mudah dimengerti dan fleksibel untuk berbagai permasalahan yang tidak terstruktur, memadukan pendekatan deduktif dan pendekatan sistem, dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam suatu sistem dan mengelompokkan unsur yang serupa dalam setiap tingkat;
- b. Memberi suatu skala untuk mengukur hal-hal dan mewujudkan metode penetapan prioritas;
- c. Melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan berbagai prioritas, menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan setiap alternatif;
- d. Mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai factor sistem dan memungkinkan organisasi memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan-tujuan mereka, serta mensintesis hasil yang representatif dari berbagai penelitian; dan
- e. Memungkinkan organisasi memperhalus definisi suatu permasalahan dan memperbaiki pertimbangan serta pengertian melalui pengulangan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka metode ini dipandang sangat tepat dalam memecahkan berbagai persoalan yang ingin diketahui karena bersifat fleksibel dalam pemanfaatannya dan dapat digunakan untuk kepentingan penelitian. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam metode AHP (Saaty,1993) :

1. Identifikasi sistem, yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan dan menentukan solusi yang diinginkan. Identifikasi dilakukan dengan cara mempelajari referensi dan berdiskusi dengan para pakar/ ahli yang memahami permasalahan, sehingga diperoleh konsep yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.
2. Penyusunan struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan sub tujuan, aktor, kriteria, dan kemungkinan alternatif-alternatif pada tingkatan kriteria paling rendah yang merupakan hasil pra-survey dan diskusi dengan key-persons yang berkompeten terhadap masalah pengelolaan perkebunan.

Tujuan dalam analisis ini adalah menyusun strategi dan kebijakan pengelolaan perkebunan di Provinsi Jambi. Kriteria yang diperoleh dari hasil pra-survey dan wawancara dengan key-persons yang berkompeten dalam masalah pengelolaan perkebunan adalah:

1. Upaya menyusun strategi dan kebijakan pengelolaan perkebunan dipandang dari aspek ekologi;
2. Upaya menyusun strategi dan kebijakan pengelolaan perkebunan dipandang dari aspek sosial;
3. Upaya menyusun strategi dan kebijakan pengelolaan perkebunan dipandang dari aspek ekonomi;
4. Upaya menyusun strategi dan kebijakan pengelolaan perkebunan dipandang dari aspek kelembagaan;

Dari penyusunan kriteria pengelolaan didapat 5 kriteria yaitu :

- A1. Program Pemerintah; (aspek kelembagaan)
- A2. Biaya Penanaman dan Perawatan; (aspek sosial-ekonomi)
- A3. Harga Jual Produk; (aspek ekonomi)
- A4. Resistance (daya dukung/daya tahan komoditi); (aspek ekologi)
- A5. Umur Produktiitas komoditi. (aspek ekonomi)

Penilaian dalam membandingkan antara satu kriteria dengan kriteria yang lain adalah bebas satu sama lain, dan hal ini dapat mengarah pada ketidak konsistensian. Indeks konsistensi dari matrik ber ordo n dapat diperoleh dengan rumus:

$$CI = (\lambda \text{ maks}-n) / (n-1) \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

CI = Indeks Konsistensi (*Consistency Index*)

λ maks = Nilai *eigen* terbesar dari matrik berordo n

Nilai *eigen* terbesar didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah kolom dengan *eigen vector*. Batas ketidakkonsistensian diukur dengan menggunakan rasio konsistensi (CR), yakni perbandingan indeks konsistensi (CI) dengan nilai pembangkit random (RI). Nilai ini bergantung pada ordo matrik n .

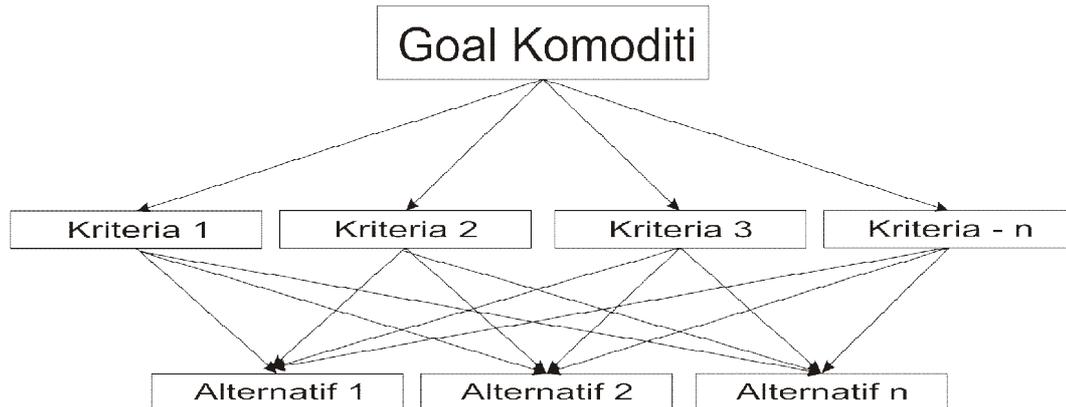
Rasio konsistensi dapat dirumuskan :

$$CR = CI/RI \dots\dots\dots(2)$$

Bila nilai CR lebih kecil dari 10%, ketidakkonsistensian pendapat masih dianggap dapat diterima.

Jika $CR > 0,10$ (10%) maka berarti ada ketidakkonsistenan saat menetapkan skala perbandingan sepasang kriteria, jika hal ini terjadi, dapat dipastikan bahwa solusi hasil metode AHP menjadi tidak berarti bagi pengguna.

Setelah mendapatkan penilaian kriteria, maka untuk menyelesaikan tujuan analisis (goal), dihitung dengan membandingkan antara alternatif ; dalam hal ini alternati komoditi diambil dari hasil Komoditi Spesialisasi (Nilai SI > 1) pada perhitungan sebelumnya.



Gambar. 8. Skema Hirarki Penentuan Komoditas Perkebunan

3.3.5. Strategi pengembangan Perkebunan (SWOT)

Setelah diperoleh komoditas hortikultura unggulan pada setiap daerah yang berpotensi di kembangkan di Provinsi Jambi, kemudian dilakukan analisis SWOT untuk mengetahui Strategi-strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan komoditas unggulan tersebut secara ramah lingkungan dimana sebelumnya ditentukan dahulu faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi unit analisa tersebut.

Untuk mencapai visi dan misi maka perlu dikaji tentang strategi dan arah kebijakan pengembangan agribisnis Hortikultura Provinsi Jambi. Penyusunan strategi dan arah kebijakan ini selaras dengan misi, sasaran dan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana telah di jelaskan dalam bab sebelumnya. Untuk mengetahui permasalahan pembangunan daerah kabupaten/kota akan dianalisis terlebih dahulu dengan menggunakan analisis SWOT, yaitu analisis yang mencermatikekuatan (*strengths*),

kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan atau ancaman (*threats*) secara bersama-sama.

SWOT sendiri merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadidi Provinsi Jambi yang mencakup lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Faktor lingkungan internal adalah merupakan faktor yang dalam waktu singkat bisa diadakan perubahan atau dikelola (*manageable atau controllable*) di Provinsi Jambi. Lingkungan internal mencakup kekuatan dan kelemahan, sedangkan lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman yang dalam waktu singkat tidak dapat dikelola dan dikendalikan.

A. Tahap pengumpulan data

Tahap ini merupakan suatu kegiatan pengklasifikasian dan pra analisis. Pada tahap ini data dibedakan menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal.

Data internal berasal dari dalam para pelaku agribisnis hortikultura di Provinsi Jambi. Tahap ini menggunakan dua model matriks faktor strategi internal. Adapun matriks faktor strategi disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Pada kolom satu disusun kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan.
- b) Pada kolom dua diberi bobot terhadap masing-masing faktor, mulai dari 1,0 (paling penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting), jumlah bobot untuk semua faktor kekuatan dan kelemahan sama dengan 1,0.
- c) Nilai bobot diperoleh dari rata-rata masing-masing pertanyaan dibagi dengan total rata-rata pertanyaan yang diberikan oleh responden.

- d) Pada kolom tiga diberi skala rating mulai dari 4 (*Outstanding*) sampai dengan 1 (*Poor*),

Matrik Faktor Strategi Internal (IFAS)

Faktor Strategis Internal		Bobot	Rating	Skor (Bobot Rating)
	KEKUATAN	x	x	x
	Sub Total Kekuatan	x		x
	KELEMAHAN	x	x	x
	Sub Total Kelemahan	x		x
	Total Eksternal (SO)	1,00		x

Matrik Faktor Strategi Eksternal (EFAS)

Faktor Strategis Eksternal		Bobot	Rating	Skor (Bobot Rating)
	PELUANG	x	x	x
	Sub Total Peluang	x		x
	TANTANGAN	x	x	x
	Sub Total Tantangan	x		x
	Total Eksternal (SO)	1,00		x

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis adalah matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini dapat menghasilkan 4 set kemungkinan alternatif strategis.

Melalui analisis SWOT itu, dapat dirumuskan empat strategi utama, sebagaimana terlihat dari bagan di bawah ini.

Faktor Internal (IFAS) Faktor Eksternal (EFAS)	KEKUATAN Strengths (S)	KELEMAHAN Weaknesses (W)
PELUANG Opportunities(S)	STRATEGI S - O	STRATEGI W - O
TANTANGAN Threats(S)	STRATEGI S - T	STRATEGI W - T

Gambar. 9. Model Pola Strategis Analisis SWOT

Berdasarkan bagan diatas, strategi *pertama* menggunakan kekuatan untuk meraih peluang (S-O), strategi *kedua* menekan kelemahan untuk meraih peluang (W-O), strategi *ketiga* menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan (S-T) dan yang *keempat* adalah strategi menekan kelemahan untuk mengatasi tantangan (W-T)

Melalui analisis demikian, strategi yang dibuat diharapkan bisa lebih maksimal di dalam mendayagunakan apa yang ada untuk kepentingan masa depan, karena didasarkan pada kondisi lingkungan yang riil. Hal ini disebabkan oleh adanya kombinasi untuk memaksimalkan potensi dan meminimalisasi kelemahan. Dengan demikian, strategi itu juga mencakup upaya mengatasi berbagai masalah dan memperbaiki serta meningkatkan potensi yang ada. Konsekuensinya, model analisis demikian akan membawa manfaat yang lebih baik didalam perumusan strategi pembangunan Provinsi Jambi.

BAB. IV

ANALISIS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERKEBUNAN
SECARA BERKELANJUTAN

4.1. Gambaran Umum

4.1.1. Kondisi Geografis Provinsi Jambi

Dengan memiliki luas wilayah 53.435 Km², Provinsi Jambi terdiri dari 9 Kabupaten dan 2 Kota administratif, luas daratan 50.160,05 Km² dan luas perairan sebesar 3.274,95 Km². 45° terletak antara 00 55' BT°10' sampai 1040° 45' LS dan antara 1010° sampai 20 di antara jajaran bukit barisan dengan luas terbesar Kabupaten Merangin dan terkecil Kota Jambi dimana dengan potensi lahan dengan masing-masing luas sebagai berikut ;

Tabel. 8. Luas Wilayah dalam Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Persen (%)
1	Kerinci	3.355,27	6,69
2	Merangin	7.679,00	15,31
3	Sarolangun	6.184,00	12,33
4	Batanghari	5.804,00	11,57
5	Muaro Jambi	5.326,00	10,62
6	Tanjung Jabung Timur	5.445,00	10,86
7	Tanjung Jabung Barat	4.649,85	9,27
8	Tebo	6.461,00	12,88
9	Bungo	4.659,00	9,29
10	Kota Jambi	205,43	0,41
11	Kota Sungai Penuh	391,50	0,78
Total		50.160,05	100

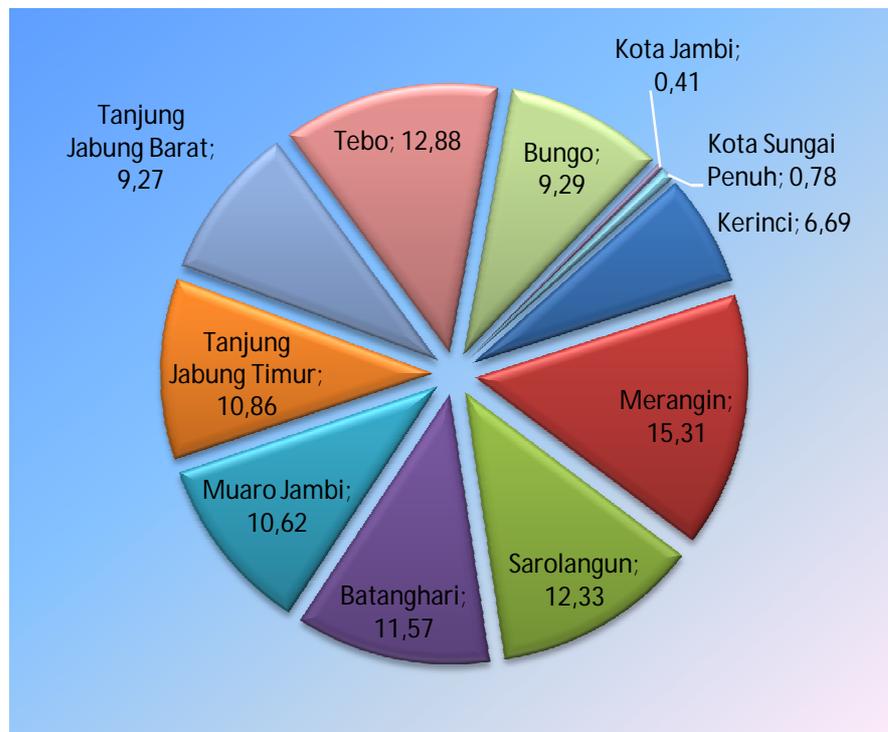
Sumber : BPS.2018

Topografi Provinsi Jambi bagian timur umumnya merupakan rawa-rawa wilayah barat pada umumnya tanah daratan (lahan kering) dengan topografi bervariasi dari datar, bergelombang sampai berbukit. Secara

spesifik daerah hulu merupakan bentangan pegunungan Bukit Barisan, sebagian diantaranya bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Jenis tanah secara umum didominasi oleh Podsolik Merah Kuning (PMK) 44,56%. Jenis tanah lainnya adalah Latosol, termasuk Regosol (18,67%), Gley Humus (10,74%) sisanya organosol.

Sebagian besar wilayah Provinsi Jambi beriklim tipe B berdasarkan klasifikasi *Schmidt* dan *Ferguson* dengan bulan basah antara 8-10 bulan dan bulan 2-4 bulan. Rata-rata curah hujan adalah 179-279 mm pada bulan basah dan 68-106 mm pada bulan kering dengan ketinggian antara 3- 938 M diatas permukaan laut.

Secara administratif, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan pada Tahun 2017 sebanyak 141 kecamatan, 1.375 desa dan 187 kelurahan.



Gambar.10. Persentase pembagian Wilayah Provinsi Jambi.

Luas wilayah terbesar di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin sebesar 7.679 Km² atau sebesar 15,31 persen dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing sebesar 6.461 Km² dan 6.184 Km².

Provinsi Jambi memiliki banyak sungai besar diantaranya; Sungai Batang Hari, Sungai Batang Asai, Sungai Bulian, Batang Tembesi, Batang Tebo, Sungai danau bangko, Sungai Serengam, Sungai Kahidupan kaor Sungai Singkati-gedang, Sungai Singoan, Sungai Pengabuan, Sungai Kumpe dan lainnya dan banyaknya anak-anak sungai yang mengelilingi provinsi Jambi.

4.1.2. Kependudukan

Jumlah Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2018 sebanyak 3.570.272 jiwa mengalami pertumbuhan sebesar 1,57 persen dimana pada tahun sebelumnya Tahun 2017 sebanyak 3.515.017 selama kurun waktu jumlah penduduk dengan data jumlah penduduk sebagaimana tabel dibawah ini;

Tabel.9. Jumlah Penduduk Provinsi Jambi 2016-2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Ribuan)		
		2016	2017	2018
1	Kerinci	235.802	236.782	237.791
2	Merangin	372.205	377.905	383.480
3	Sarolangun	284.201	290.231	295.985
4	Batanghari	263.896	266.971	269.966
5	Muaro Jambi	410.337	421.179	432.305
6	Tanjung Jabung Timur	215.316	216.777	218.413
7	Tanjung Jabung Barat	316.811	352.527	328.343
8	Tebo	337.022	343.003	348.760
9	Bungo	351.878	359.590	367.182
10	Kota Jambi	583.487	591.134	598.103
11	Kota Sungai Penuh	87.971	88.918	89.944
Jumlah		3.458.926	3.515.017	3.570.272
Pertumbuhan (persen)			1,62	1,57
Kepadatan per Km² Jiwa				71,18

Sumber : BPS (Data diolah)

Secara pertumbuhan terlihat peningkatan terbesar dalam jumlah penduduk adalah Kabupaten Muaro Jambi dengan pertumbuhan 5,35 persen selama kurun waktu Tahun 2016-2018, sebagaimana kita ketahui bahwa kabupaten ini merupakan daerah buffer Kota Jambi yang semakin lama semakin meningkat dalam perkembangan perekonomian dan perpindahan penduduk menuju kota. Dan alternative pengembangan kawasan mengarah kepada kabupaten tersebut, sedangkan pertumbuhan penduduk terkecil pada Kabupaten Kerinci dengan angka 0,84 persen.

Berdasarkan data sensus kesejahteraan rakyat (BPS.2018) persentase penduduk Provinsi Jambi menempati wilayah perkotaan sebesar 50,61 untuk laki-laki, 49,39 untuk perempuan, sedangkan di perdesaan laki-laki sebesar 51,22 persen, perempuan sebesar 48,78 persen dengan total perbandingan seluruh penduduk Provinsi Jambi berdasarkan jenis kelamin laki-laki 51,02 persen dan perempuan sebanyak 48,98 persen.

4.2. Analisis Perekonomian

Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sector Primer ke Sektor Sekunder dan Tersier. Atau kata lainnya dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Salah satu cara mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan masyarakat dengan melihat angka-angka Pendapatan Nasional/regional.

Produk Domestika Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (Provinsi) merupakan gambaran kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu dengan pendekatan produksi dan penggunaannya dan dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaan. PDRB pada sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas aktivitas produksinya.

Dalam tulisan ini digunakan adalah PDRB harga konstan (riil) yang dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun. PDRB Provinsi Jambi selama kurun waktu Tahun 2014-2018 mengalami rata-rata peningkatan sebesar 5,24 persen sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 10. Perkembangan PDRB Provinsi Jambi Berdasarkan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Persen)

Sektor PDRB	2014	2015	2016	2017	2018	Rerata
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,19	5,21	6,40	4,98	4,99	6,36
B, Pertambangan dan Penggalian	3,82	(0,02)	0,40	2,88	5,15	2,45
C, Industri Pengolahan	3,83	3,91	2,93	3,46	3,73	3,57
D, Pengadaan Listrik dan Gas	(13,33)	7,24	5,66	3,08	5,56	1,64
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,16	4,32	4,75	3,43	4,74	4,08
F, Konstruksi	9,24	5,47	5,82	7,30	6,65	6,89
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,35	10,06	7,80	5,99	6,81	8,20
H, Transportasi dan Pergudangan	8,00	6,27	9,46	6,57	5,30	7,12
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16,91	6,24	7,71	8,09	7,36	9,26
J, Informasi dan Komunikasi	7,86	9,13	8,51	7,59	7,36	8,09
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	3,89	2,63	7,50	3,80	1,79	3,92
L, Real Estate	2,95	3,23	4,68	5,02	5,59	4,29
M,N, Jasa Perusahaan	4,98	5,35	6,64	6,00	5,40	5,67
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,08	6,81	4,45	3,32	4,83	6,30
P, Jasa Pendidikan	1,85	6,24	6,48	4,97	5,54	5,02
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,00	10,34	7,50	6,10	6,06	9,00
R,S,T,U, Jasa lainnya	5,12	7,17	6,34	5,33	5,42	5,88
PERTUMBUHAN PDRB (%)	7,07	4,42	4,75	4,70	5,28	5,24

Sumber : BPS.Provinsi Jambi. (Data diolah)

Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi secara periode mengalami fluktuasi mulai tahun awal pengamatan dari tahun sebelumnya meningkat sebesar 7,07 persen, namun mengalami penurunan tajam pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2015 berkisar di angka 4 persen dan pada akhir tahun pengamatan terlihat peningkatan yang signifikan yakni sebesar 5,28 persen.

Dilihat dari rata-rata pertumbuhan per sektor, pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yakni 9,26 persen dan diikuti sektor Jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,00 persen dan terkecil pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar

1,64 persen diikuti sector pertambangan dan penggalian sebesar 2,45 persen.

Untuk mengetahui pengaruh dan pergeseran basis ekonomi, maka sektor pembentuk PDRB di bagi menjadi 4 sektor dimana;

Sektor Primer terdiri dari : A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B, Pertambangan dan Penggalian

Sektor Sekunder terdiri dari : C, Industri Pengolahan
D, Pengadaan Listrik dan Gas
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F, Konstruksi

Sektor Tersier terdiri dari; G, Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H, Transportasi dan Pergudangan
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
J, Informasi dan Komunikasi
K, Jasa Keuangan dan Asuransi
L, Real Estate

Sektor Jasa terdiri dari : M,N, Jasa Perusahaan
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P, Jasa Pendidikan
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
R,S,T,U, Jasa lainnya

4.2.1. Analisis *Location Quotient* (LQ) Pertumbuhan Perekonomian

Analisis *Location Quotient* atau LQ digunakan untuk menentukan besarnya peran suatu sektor, komoditi atau komponen di suatu wilayah tertentu terhadap sektor, komoditi atau komponen lain yang sama pada wilayah luas atau wilayah lain. Analisis ini dapat dijadikan pertimbangan penentuan kebijakan atau pengembangan di masa mendatang. Adapun Nilai LQ PDRB menurut harga konstan menurut lapangan usaha sektor Tahun 2010-2018 sebagaimana tabel 11 di bawah ini;

Tabel.11. Nilai *Location Quotient* PDRB 2010-2018

Sektor PDRB	LQ							
	Primer		Sekunder		Tersier		Jasa	
	2010	2018	2010	2018	2010	2018	2010	2018
Kerinci	1,02	1,06	0,54	0,54	1,13	1,07	1,42	1,40
Merangin	1,03	1,03	0,79	0,83	1,09	1,08	1,02	1,00
Sarolangun	1,10	1,11	0,86	0,96	0,86	0,78	0,98	0,99
Batang Hari	1,02	1,09	1,11	1,02	0,79	0,71	1,12	1,13
Muaro Jambi	1,03	1,09	1,25	1,22	0,76	0,68	0,87	0,85
Tanjab Timur	1,49	1,47	0,53	0,62	0,34	0,43	0,53	0,61
Tanjab Barat	1,22	1,29	1,34	1,25	0,34	0,35	0,52	0,52
Tebo	1,12	1,22	0,78	0,75	0,90	0,79	0,93	0,83
Bungo	0,89	0,87	0,92	1,04	1,39	1,29	0,94	0,94
Kota Jambi	0,14	0,07	1,22	1,19	2,66	2,61	1,94	1,79
Kota Sungai Penuh	0,14	0,13	0,78	0,76	2,62	2,47	2,74	2,57

Ket: Nilai dengan LQ > 1 = Basis, LQ < 1 = Non Basis

Sumber :BPS (Data diolah)

Aktivitas perekonomian regional digolongkan dalam dua sektor kegiatan yaitu aktivitas basis dan non basis. Kegiatan basis merupakan kegiatan ekspor (barang dan jasa) keluar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan, sedangkan kegiatan non basis merupakan kegiatan berorientasi lokal yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan

masyarakat dalam batas wilayah perekonomian yang bersangkutan (Nugroho,2004).

Perkembangan sektor pada masing-masing kabupaten/kota terjadi dinamis, pada sektor Primer, terjadi Kenaikan nilai pada mayoritas daerah kecuali pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bungo, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Sektor Primer sering dijadikan sektor unggulan bagi daerah yang memiliki sumber daya alam dan potensinya dalam mendukung perekonomian, kecuali pada kota administrasi seperti Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh.

Pada sektor sekunder atau lebih sering disebut sektor industri,sektor produktif terjadi kenaikan nilai pada kabupaten Merangin, Sarolangun, Tanjab Timur dan Bungo dan sisanya mengalami penurunan. Hal ini bisa terjadi kerana masih belum banyaknya pihak ketiga atau investasi yang menyentuh ke wilayah ini atau juga adanya suatu inflasi ekonomi atau kebijakan lainnya.

Sektor Tersier terjadi kenaikan nilai LQ pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, sektor yang merupakan sektor penunjang kemajuan suatu daerah, apabila sektor ini menghasilkan nilai yang tinggi dapat diartikan daerah itu sudah bisa dikatakan daerah dalam keadaan berkembang dan Maju.

Sektor Jasa merupakan sektor pelengkap kehidupan terjadi kenaikan pada daerah Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Tanjung Jabung TImur, dan Bungo.

4.2.2. Analisis Shift Share

Hasil Perhitungan Nilai *Regional Agregat Shift Share (RASS)*

Nilai *Regional Agregat Shift Share (RASS)* digunakan untuk mengetahui seberapa cepat atau seberapa lambatya perubahan perekonomian di tingkat yang lebih luas (Provinsi Jambi) (Lihat Lampiran 1.) Berdasarkan hasil perhitungan RASS pada table ... dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Jambi selama periode 2010-2018 sebesar 58,72 persen.

Tabel.12. Hasil Regional Agregat Shift Share (RASS) (Persen)

Provinsi Jambi	2010-2018	
	RASS	Persen (%)
	0,59	58,72

Sumber : BPS.Data diolah

Nilai RASS didasarkan pada perhitungan selisih antara jumlah PDRB Provinsi Jambi 2010 dengan Jumlah PDRB tahun 2018 dibagi dengan jumlah PDRB Povinsi Jambi Tahun 2010, nilai Ra sama dengan nilas RSS yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi meningkat sebesar 53.210.004 Milyar.

Karena hasil dari perhitungan RASS (pertumbuhan ekonomi) di atas adalah positif, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan perekonomian Provinsi Jambi selama periode tersebut bisa dikategorikan “Cepat”. Hal ini dikarenakan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing-masing sektor mayoritas semakin meningkat dengan nilai spesialisasi pergeseran sektor sebagaimana tabel berikut:

Tabel.13. Proportional Shift share (PSS) Provinsi Jambi 2010-2018

Sektor	PSS (%)	Penjelasan
Primer	-10,32	
Sekunder	9,57	Spesialisasi
Tersier	21,71	Spesialisasi
Jasa	-4,06	

Dari hasil di atas, dapat terlihat nilai PSS pada sektor sekunder dan Tersier bernilai positif yang dapat juga diartikan bahwa Provinsi Jambi sudah memasuki provinsi maju. Karena suatu daerah dapat dikatakan maju apabila perekonomian sudah bergeser dari sektor primer kepada sektor lain.

Dalam hal sumber pendapatan masyarakat Provinsi Jambi yang mempengaruhi pendapatan regional masih didominasi dari Sektor Pertanian dan sub subsektor perkebunan, dari jumlah angkatan kerja sejumlah 1.790.437 jiwa dengan angka pekerja 1.721.362 jiwa dan diantara jumlah angka pekerja tersebut, Sektor Pertanian merupakan sektor yang paling banyak digeluti oleh sebagian besar penduduk di Provinsi Jambi dengan angka 47,35 persen atau 815.049 jiwa (* sumber analisis situasi ketenagakerjaan 2018), namun angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dimana sector pertanian mengambil porsi sebesar 48,56 persen.

Dominasi sektor pertanian yang biasa disingkat sektor A, semakin menurun meskipun dalam angka kecil dalam persentase lapangan pekerjaan utama dan pada dasarnya sector Industri, meliputi sector pertambangan, industri, listrik, air, gas dan konstruksi yang sering disingkat juga sector M dan sector S merupakan singkatan sector perdagangan, angkutan, pergudangan, keuangan, jasa perusahaan dan jasa kemasyarakatan mengalami kenaikan atau peningkatan sebagaimana pada data table di bawah ini;

Tabel.14. Jumlah Penduduk yang bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Pekerjaan Utama (AMS) Tahun 2018.

Lapangan Kerja Utama	Pertanian (A)	Industri (M)	Jasa (S)	Jumlah
KERINCI	78.690	11.107	35.212	125.009
MERANGIN	102.100	21.685	62.405	186.190
SAROLANGUN	75.862	18.980	40.656	135.498
BATANGHARI	59.643	21.207	41.571	122.421
MUARO JAMBI	91.089	39.416	63.167	193.672
TANJUNG JABUNG TIMUR	78.431	7.430	28.552	114.413
TANJUNG JABUNG BARAT	100.688	12.506	60.811	174.005
TEBO	119.261	16.560	38.919	174.740
BUNGO	90.705	24.947	56.705	172.357
KOTA JAMBI	9.138	49.274	219.390	277.802
KOTA SUNGAI PENUH	9.442	7.198	28.615	45.255
Provinsi Jambi	815.049	230.310	676.003	1.721.362
2018 Persen (%)	47,35	13,38	39,27	100,00
2017 Persen (%)	48,56	12,00	39,44	100,00
2016 Persen (%)	49,29	12,84	37,87	100,00

Sumber : BPS.2018 (Data diolah)

Pergeseran struktur pekerjaan dan perekonomian masyarakat di Provinsi Jambi sedang berlangsung, transisi ini tidak mungkin dihindari karena tuntutan globalisasi.

Sektor pertanian sangat begitu mendominasi di semua kabupaten/kota di Provinsi Jambi kecuali Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh yang hampir menggambarkan keadaan karakteristik perkotaan lain di wilayah Indonesia. Pada wilayah perkotaan, dominasi sector Jasa paling berkembang, sedangkan sector pertanian dengan porsi kecil.

Peningkatan aktivitas ekonomi diberbagai daerah tidak terlepas dari pembangunan-pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, untuk mengetahui laju pergeseran antar sektor kita dapat melihat perkembangan antar sektor sebagai berikut;

a. Kabupaten Kerinci

Sektor Primer pada Kabupaten Kerinci sangat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan Provinsi Jambi pada sektor ini yaitu 1.155.392 Milyar dengan nilai terkecil sektor sekunder. Sehingga dapat diartikan bahwa PDRB Regional Provinsi Jambi mempengaruhi PDRB Kabupaten Kerinci sebesar 87,11 persen.

Tabel.15. Laju Pertumbuhan Sektoral Perekonomian Kabupaten Kerinci (dalam Miliar rupiah dan persen)

Sektor Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan					
	National Share	Proportional Share (Mix/Bauran)	Differential Shift	Pertumbuhan ekonomi	Pergeseran Bersih	%
	KPN	KPP	KPW	PE	PB	
Primer	1.155.392,29	53.792,76	33.437,43	1.242.622,48	87.230	50,65
Sekunder	201.551,39	88.216,92	(30.984,23)	258.784,08	57.233	10,55
Tersier	464.210,42	155.224,00	11.237,34	630.671,76	166.461	25,71
Jasa	315.937,60	(18.947,19)	24.272,42	321.262,83	5.325	13,09
Total	2.137.091,70	278.286,49	37.962,96	2.453.341,15	316.249	100
Persen	87,11	11,34	1,55	100,00		

Sumber : BPS (data diolah)

KPP > 0 ; Spesialisasi Tumbuh Cepat ; KPP < 0 ; Spesialisasi Tumbuh Lambat
 KPW > 0 ; Memiliki Daya Saing (*Comparative advantage*); KPW < 0 ; Tidak Memiliki Daya Saing
 PB > 0 ; Sektor tersebut progresif ; PB < 0 Sektor tersebut mundur

Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP) sebagai pengaruh kedua menjelaskan bahwa sektor tersier mengalami kenaikan tertinggi dengan nilai 155.224 Milyar dan mengalami penurunan kontribusi pada sektor jasa, sehingga dapat diartikan bahwa sektor tersier sangat baik atau harus dikembangkan lagi di Kabupaten ini.

Kabupaten Kerinci masih didominasi dari sektor primer dengan kenaikan sebesar 50,65 persen atau 87,230 milyar dimana sektor primer memiliki nilai KPW atau Differential Shift 33.437,43 Milyar dan memiliki nilai negatif pada sektor sekunder. Hal ini dapat diartikan bahwa sektor sekunder tidak/belum memiliki daya saing dibandingkan sektor lain.

b. Kabupaten Merangin

Kabupaten Merangin memiliki semua Sektor baik Primer, sekunder, tersier maupun jasa yang dipengaruhi dan mempengaruhi PDRB regional, dengan melihat pada tabel dibawah ini

Tabel.16. Laju Pertumbuhan Sektoral Perekonomian Kabupaten Merangin (dalam Miliar rupiah dan persen)

Sektor Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan					
	National Share	Proportional Share (Mix/Bauran)	Differential Shift	Pertumbuhan ekonomi	Pergeseran Bersih	%
	KPN	KPP	KPW	PE	PB	
Primer	1.867.968,45	63.441,65	(284.066,84)	1.647.343,26	(220.625)	45,99
Sekunder	475.317,18	115.516,64	34.254,96	625.088,78	149.772	17,45
Tersier	715.450,32	245.302,83	24.192,34	984.945,50	269.495	27,50
Jasa	364.093,26	(23.797,81)	(16.021,57)	324.273,88	(39.819)	9,05
Total	3.422.829,22	400.463,31	(241.641,10)	3.581.651,42	158.822	100,00
Persen	95,57	11,18	(6,75)	100,00		

Sumber : BPS (data diolah)

KPP > 0 ; Spesialisasi Tumbuh Cepat ; KPP < 0 ; Spesialisasi Tumbuh Lambat
 KPW > 0 ; Memiliki Daya Saing (*Comparative advantage*); KPW < 0 ; Tidak Memiliki Daya Saing
 PB > 0 ; Sektor tersebut progresif ; PB < 0 Sektor tersebut mundur

Dari Tabel.16., sektor-sektor yang memiliki nilai *komponen Proportional shift share* positif pada sektor primer, sekunder dan tersier, sedangkan sektor jasa yang memiliki nilai *komponen Proportional shift share* negatif berarti laju pertumbuhannya lambat.

Sedangkan pada KPW yang memberikan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonominya yang disajikanyaitu Provinsi Jambi. Sektor Primer dan Jasa memilii nilai *differensial shift* negatif yan berarti memiliki daya saing rendah, dan sebaliknya pada sektor sekunder dan tersier bernilai positif berarti memiliki daya saing dengan nilai terbesar pada sektro sekunder 33.254 Milyar rupiah.

Berdasarkan analisis Shift share pertumbuhan ekonomi memiliki nilai positif pada semua sektor, artinya dapat dikatakan Kabupaten Merangin memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dengan sumbangan terbesar tetap pada sektor Primer yaitu 45,99 persen.

c. Kabupaten Sarolangun

Semua Sektor baik Primer, sekunder, tersier maupun jasa di Kabupaten Sarolangun dipengaruhi dan mempengaruhi PDRB regional, bernilai positif dan lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel.17. Laju Pertumbuhan Sektoral Perekonomian Kabupaten Sarolangun (dalam Miliar rupiah dan persen)

Sektor Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan					
	National Share	Proportional Share (Mix/Bauran)	Differential Shift	Pertumbuhan ekonomi	Pergeseran Bersih	%
	KPN	KPP	KPW	PE	PB	
Primer	2.223.980,38	(320.465,70)	(29.249,08)	1.874.265,60	(349.715)	49,98
Sekunder	572.978,22	280.562,17	(18.206,89)	835.333,50	262.355	22,27
Tersier	628.142,02	218.162,09	(169.493,62)	676.810,50	48.668	18,05
Jasa	388.072,32	(24.509,21)	421,82	363.984,94	(24.087)	9,71
Total	3.813.172,95	153.749,36	(216.527,77)	3.750.394,54	(62.778)	100,00
Persen	101,67	4,10	(5,77)	100,00		

Sumber : BPS (data diolah)

KPP > 0 ; Spesialisasi Tumbuh Cepat ; KPP < 0 ; Spesialisasi Tumbuh Lambat
 KPW > 0 ; Memiliki Daya Saing (*Comparative advantage*); KPW < 0 ; Tidak Memiliki Daya Saing
 PB > 0 ; Sektor tersebut progresif ; PB < 0 Sektor tersebut mundur

Dari Tabel.17, sektor-sektor yang memiliki nilai *komponen Proportional shift share* positif pada sektor sekunder dan tersier, nilai positif ini mengindikasikan sektor yang sama yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian di tingkat regional, sedangkan sektor primer dan jasa yang memiliki nilai komponen *komponen Proportional shift share* negatif berarti laju pertumbuhannya lambat.

Sedangkan pada KPW yang memberikan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang disajikan yaitu Provinsi Jambi. Sektor Primer, sekunder dan tersier memiliki nilai *differensial shift* negatif yang berarti memiliki daya saing rendah, dan sebaliknya pada sektor jasa bernilai positif berarti memiliki daya saing dengan nilai terbesar pada sektor jasa 421,82 Milyar rupiah.

Berdasarkan analisis Shift share pertumbuhan ekonomi Kabupaten memiliki nilai positif pada semua sektor, artinya dapat dikatakan Kabupaten Sarolangun memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik dengan sumbangan terbesar tetap pada sektor Primer yaitu 49,98 persen.

d. Kabupaten Batang Hari

Semua Sektor baik Primer, sekunder, tersier maupun jasa di Kabupaten Batanghari dipengaruhi dan mempengaruhi PDRB regional, bernilai positif dan lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel.18. Laju Pertumbuhan Sektoral Perekonomian Kabupaten Batang Hari (dalam Miliar rupiah dan persen)

Sektor Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan					
	National Share	Proportional Share (Mix/Bauran)	Differential Shift	Pertumbuhan ekonomi	Pergeseran Bersih	%
	KPN	KPP	KPW	PE	PB	
Primer	2.156.744,70	(62.808,28)	301.760,58	2.395.697,00	238.952	55,44
Sekunder	783.425,66	101.877,54	(127.407,96)	757.895,24	(25.530)	17,54
Tersier	607.727,98	212.451,14	(123.257,90)	696.921,22	89.193	16,13
Jasa	468.757,83	(33.701,92)	35.716,36	470.772,27	2.014	10,89
Total	4.016.656,17	217.818,48	86.811,08	4.321.285,73	304.630	100,00
Persen	92,95	5,04	2,01	100,00		

Sumber : BPS (data diolah)

KPP > 0 ; Spesialisasi Tumbuh Cepat ; KPP < 0 ; Spesialisasi Tumbuh Lambat
 KPW > 0 ; Memiliki Daya Saing (*Comparative advantage*); KPW < 0 ; Tidak Memiliki Daya Saing
 PB > 0 ; Sektor tersebut progresif ; PB < 0 Sektor tersebut mundur

Hasil analisis *shift share* pada Tabel.18, sektor-sektor yang memiliki nilai *komponen Proportional shift share* positif pada sektor sekunder dan tersier, nilai positif ini mengindikasikan sektor yang sama yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian di tingkat regional, sedangkan sektor primer dan jasa yang memiliki nilai *komponen Proportional shift share* negatif berarti laju pertumbuhannya lambat.

Sedangkan pada KPW yang memberikan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan

perekonomian yang disajikan yaitu Provinsi Jambi. Sektor Primer dan Jasa memiliki nilai *differensial shift* Positif yang berarti memiliki daya saing, . dengan nilai terbesar pada sektor primer 301.760 Milyar rupiah. Dari sektor yang dianalisis pergeseran bersih dan bersifat progresif terdapat pada sektor primer, tersier dan jasa, sedangkan sekunder memiliki pergeseran bersih negatif atau kemunduran, hal ini dapat dikatakan juga sektor industri belum dapat menunjang sektor primer tersier dan jasa meskipun pertumbuhan ekonomi sektor sekunder bernilai 757.895 Milyar rupiah.

e. Kabupaten Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi pada semua Sektor baik Primer, sekunder, tersier maupun jasa di dipengaruhi dan mempengaruhi PDRB regional, bernilai positif dan lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel.19. Laju Pertumbuhan Sektoral Perekonomian Kabupaten Muaro Jambi (dalam Miliar rupiah dan persen)

Sektor Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan					
	National Share	Proportional Share (Mix/Bauran)	Differential Shift	Pertumbuhan ekonomi	Pergeseran Bersih	%
	KPN	KPP	KPW	PE	PB	
Primer	2.984.738,42	(157.960,62)	482.852,01	3.309.629,81	324.891	54,22
Sekunder	1.202.873,94	47.580,86	168.679,36	1.419.134,16	216.260	23,25
Tersier	802.704,73	259.468,74	(159.583,28)	902.590,19	99.885	14,79
Jasa	498.810,50	(42.622,99)	16.683,51	472.871,02	(25.939)	7,75
Total	5.489.127,59	106.466,00	508.631,59	6.104.225,18	615.098	100,00
Persen	89,92	1,74	8,33	100,00		

Sumber : BPS (data diolah)

KPP > 0 ; Spesialisasi Tumbuh Cepat ; KPP < 0 ; Spesialisasi Tumbuh Lambat
 KPW > 0 ; Memiliki Daya Saing (*Comparative advantage*); KPW < 0 ; Tidak Memiliki Daya Saing
 PB > 0 ; Sektor tersebut progresif ; PB < 0 Sektor tersebut mundur

Sektor-sektor yang memiliki nilai *komponen Proportional shift share* positif pada sektor sekunder dan tersier, nilai positif ini mengindikasikan sektor yang sama yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian di tingkat regional dengan nilai terbesar pada sektor tersier

sebesar 259.467 Milyar rupiah, sedangkan sektor primer dan jasa yang memiliki nilai komponen *komponen Proportional shift share* negatif berarti laju pertumbuhannya lambat.

Namun yang terjadi sebaliknya pada KPW, sektor tersier belum dapat memiliki daya saing dibandingkan dengan sektor lainnya. Sedangkan pergeseran bersih terdapat pertumbuhan yDari sektor yang dianalisis pergeseran bersih ng prosesif pada tiga sektor yaitu primer,sekunder dan tersier, sedangkan sektor jasa mengalami kemunduran.

f. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan nilai komponen *National share* semua Sektor baik Primer, sekunder, tersier maupun jasa dipengaruhi dan mempengaruhi PDRB regional, bernilai positif seperti terlihat pada tabel berikut ini

Tabel.20. Laju Pertumbuhan Sektorial Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur (dalam Miliar rupiah dan persen)

Sektor Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan					
	National Share	Proportional Share (Mix/Bauran)	Differential Shift	Pertumbuhan ekonomi	Pergeseran Bersih	%
	KPN	KPP	KPW	PE	PB	
Primer	5.874.257,88	(1.745.549,74)	(1.520.646,48)	2.608.061,67	(3.266.196)	57,46
Sekunder	699.174,11	89.657,52	1.371,30	790.202,93	91.029	17,41
Tersier	493.835,28	183.742,26	107.028,94	784.606,48	290.771	17,29
Jasa	411.384,52	(53.683,05)	(1.778,01)	355.923,46	(55.461)	7,84
Total	7.478.651,79	(1.525.833,00)	(1.414.024,25)	4.538.794,54	(2.939.857)	100,00
Persen	164,77	(33,62)	(31,15)	100,00		

Sumber : BPS (data diolah)

KPP > 0 ; Spesialisasi Tumbuh Cepat ; KPP < 0 ; Spesialisasi Tumbuh Lambat
 KPW > 0 ; Memiliki Daya Saing (*Comparative advantage*); KPW < 0 ; Tidak Memiliki Daya Saing
 PB > 0 ; Sektor tersebut progresif ; PB < 0 Sektor tersebut mundur

Hasil analisis *shift share* pada Tabel. 20., sektor-sektor yang memiliki nilai *komponen Proportional shift share* positif pada sektor sekunder dan tersier, nilai positif ini mengindikasikan sektor yang sama yang tumbuh

lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian di tingkat regional, sedangkan sektor primer dan jasa yang memiliki nilai komponen *komponen Proportional shift share* negatif berarti laju pertumbuhannya lambat.

Sedangkan pada KPW yang memberikan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang disajikan yaitu Provinsi Jambi. Sektor sekunder dan tersier memiliki nilai *differensial shift* Positif yang berarti memiliki daya saing, dengan nilai terbesar pada sektor tersier 107.028 Milyar rupiah. Dari sektor yang dianalisis pergeseran bersih dan bersifat progresif terdapat pada sektor sekunder dan tersier, sedangkan primer dan jasa sekunder memiliki pergeseran bersih negatif atau kemunduran. Pergeseran Bersih bernilai negati sangat besar dipengaruhi oleh sektor primer dengan porsi kontribusi PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 57,46 persen. Meskipun nilai sektor sekunder dan jasa memiliki nilai positif pada *pertumbuhan ekonomi*.

Kesimpulan analisis ini pada sektor Primer yang sangat mempengaruhi PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

g. Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan nilai komponen *National share* semua Sektor baik Primer, sekunder, tersier maupun jasa dipengaruhi dan mempengaruhi PDRB regional, bernilai positif seperti terlihat pada tabel berikut ini

Tabel.21. Laju Pertumbuhan Sektorial Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat (dalam Miliar rupiah dan persen)

Sektor Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan					
	National Share	Proportional Share (Mix/Bauran)	Differential Shift	Pertumbuhan ekonomi	Pergeseran Bersih	%
	KPN	KPP	KPW	PE	PB	
Primer	7.316.373,28	(1.764.385,17)	777.240,75	6.329.228,87	(987.144)	63,34
Sekunder	2.660.655,05	(137.430,78)	(291.412,96)	2.231.811,31	(428.844)	22,34
Tersier	753.257,14	259.853,06	(62.800,26)	950.309,94	197.053	9,51
Jasa	613.601,72	(75.599,93)	(56.982,00)	481.019,79	(132.582)	4,81
Total	11.343.887,19	(1.717.562,82)	366.045,54	9.992.369,91	(1.351.517)	100,00
Persen	113,53	(17,19)	3,66	100,00		

Sumber : BPS (data diolah)

KPP > 0 ; Spesialisasi Tumbuh Cepat ; KPP < 0 ; Spesialisasi Tumbuh Lambat
 KPW > 0 ; Memiliki Daya Saing (*Comparative advantage*); KPW < 0 ; Tidak Memiliki Daya Saing
 PB > 0 ; Sektor tersebut progresif ; PB < 0 Sektor tersebut mundur

Hasil analisis *shift share* pada tabel di atas, hanya pada sektor Tersier yang bernilai positif atau spesialisasi tumbuh cepat sedangkan sektor lainnya tumbuh lambat, sedangkan yang memiliki daya saing hanya pada sektor primer dengan nilai differential shift sebesar 777.240 Milyar rupiah.

Pergeseran bersih dan bersifat progresif terdapat pada sektor tersier, sedangkan primer, sekunder dan jasa sekunder memiliki pergeseran bersih negatif atau kemunduran. Pergeseran Bersih bernilai negati sangat besar dipengaruhi oleh sektor primer dengan porsi kontribusi PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 63,34 persen. Meskipun nilai sektor memiliki nilai positif pada *pertumbuhan ekonomi* namun tidak dapat menompang pergeseran bersih karena hanya

berkontribusi sebesar 9,51 persen dari total PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini.

Kesimpulan analisis ini pada sektor Primer yang sangat mempengaruhi PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena memiliki daya saing yang tinggi.

h. Kabupaten Tebo

Kabupaten Tebo berdasarkan nilai komponen *National share* semua Sektor baik Primer, sekunder, tersier maupun jasa dipengaruhi dan mempengaruhi PDRB regional, bernilai positif seperti terlihat pada tabel berikut ini

Tabel.22. Laju Pertumbuhan Sektoral Perekonomian Kabupaten Tebo (dalam Miliar rupiah dan persen)

Sektor Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan					
	National Share	Proportional Share (Mix/Bauran)	Differential Shift	Pertumbuhan ekonomi	Pergeseran Bersih	%
	KPN	KPP	KPW	PE	PB	
Primer	1.998.645,64	(25.531,11)	503.742,75	2.476.857,28	478.212	62,31
Sekunder	459.600,98	128.726,43	(33.489,49)	554.837,92	95.237	13,96
Tersier	580.714,70	191.088,95	(84.683,23)	687.120,42	106.406	17,28
Jasa	324.851,08	(23.988,77)	(44.345,13)	256.517,18	(68.334)	6,45
Total	3.363.812,39	270.295,50	341.224,91	3.975.332,80	611.520	100,00
Persen	84,62	6,80	8,58	100,00		

Sumber : BPS (data diolah)

KPP > 0 ; Spesialisasi Tumbuh Cepat ; KPP < 0 ; Spesialisasi Tumbuh Lambat
 KPW > 0 ; Memiliki Daya Saing (*Comparative advantage*); KPW < 0 ; Tidak Memiliki Daya Saing

PB > 0 ; Sektor tersebut progresif ; PB < 0 Sektor tersebut mundur

Hasil analisis *shift share* pada tabel di atas, pada sektor sekunder dan tersier yang bernilai positif atau spesialisasi tumbuh cepat sedangkan sektor primer dan jasa tumbuh lambat, sedangkan yang memiliki daya saing hanya pada sektor primer dengan nilai differential shift sebesar 503.742 Milyar rupiah.

Pergeseran bersih yang bersifat progresif terdapat pada sektor primer, sekunder dan tersier, sedangkan jasa memiliki pergeseran bersih

negatif atau kemunduran. Pergeseran Bersih bernilai positif sangat besar dipengaruhi oleh sektor primer dengan porsi kontribusi PDRB Kabupaten Tebo sebesar 62,31 persen.

Kesimpulan analisis ini pada sektor Primer yang sangat mempengaruhi PDRB Kabupaten Tebo karena memiliki daya saing yang tinggi dan progresif dalam menunjang pertumbuhan ekonomi.

i. Kabupaten Bungo

Kabupaten Bungo berdasarkan nilai komponen *National share* semua Sektor baik Primer, sekunder, tersier maupun jasa dipengaruhi dan mempengaruhi PDRB regional, bernilai positif seperti terlihat pada tabel berikut ini

Tabel.23. Laju Pertumbuhan Sektoral Perekonomian Kabupaten Bungo (dalam Miliar rupiah dan persen)

Sektor Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan					
	National Share	Proportional Share (Mix/Bauran)	Differential Shift	Pertumbuhan ekonomi	Pergeseran Bersih	%
	KPN	KPP	KPW	PE	PB	
Primer	1.943.393,97	(351.387,35)	297.232,51	1.889.239,13	(54.155)	37,55
Sekunder	667.153,59	238.044,27	277.029,79	1.182.227,65	515.074	23,50
Tersier	1.106.677,05	391.845,94	5.730,11	1.504.253,10	397.576	29,90
Jasa	404.634,24	(44.886,24)	95.897,84	455.645,84	51.012	9,06
Total	4.121.858,86	233.616,61	675.890,24	5.031.365,72	909.507	100,00
Persen	81,92	4,64	13,43	100,00		

Sumber : BPS (data diolah)

KPP > 0 ; Spesialisasi Tumbuh Cepat ; KPP < 0 ; Spesialisasi Tumbuh Lambat
 KPW > 0 ; Memiliki Daya Saing (*Comparative advantage*); KPW < 0 ; Tidak Memiliki Daya Saing
 PB > 0 ; Sektor tersebut progresif ; PB < 0 Sektor tersebut mundur

Hasil analisis *shift share* pada Tabel. 23., sektor-sektor yang memiliki nilai *komponen Proportional shift share* positif pada sektor sekunder dan jasa, nilai positif ini mengindikasikan sektor yang sama yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian di tingkat regional, sedangkan

sektor primer dan jasa yang memiliki nilai komponen *komponen Proportional shift share* negatif berarti laju pertumbuhannya lambat.

Sedangkan dilihat dari komponen *differential shift/ KPW* semua sektor pada Kabupaten Bungo memiliki daya saing dengan perbandingan Primer dan sekunder hampir sama besar yaitu 297.232 Milyar dan 277.029 Milyar rupiah.

Meskipun memiliki daya saing pada sektor primer mengalami pergeseran bersih negatif sebesar 54.16 Milyar. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa Kabupaten ini telah mempunyai pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh tiga sektor dan bukan bergantung lagi kepada satu sektor.

j. Kota Jambi

Kota Jambi berdasarkan nilai komponen *National share* semua Sektor baik Primer, sekunder, tersier maupun jasa dipengaruhi dan mempengaruhi PDRB regional, bernilai positif seperti terlihat pada tabel berikut ini

Tabel.24. Laju Pertumbuhan Sektoral Perekonomian Kota Jambi (dalam Miliar rupiah dan persen)

Sektor Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan					
	National Share	Proportional Share (Mix/Bauran)	Differential Shift	Pertumbuhan ekonomi	Pergeseran Bersih	%
	KPN	KPP	KPW	PE	PB	
Primer	481.072,84	(139.831,36)	(534.236,36)	(192.994,88)	(674.068)	(2,53)
Sekunder	1.385.797,75	255.149,88	93.566,83	1.734.514,46	348.717	22,74
Tersier	3.324.856,79	1.201.031,23	424.189,55	4.950.077,57	1.625.221	64,88
Jasa	1.308.656,05	(93.201,20)	(77.910,61)	1.137.544,24	(171.112)	14,91
Total	6.500.383,43	1.223.148,55	(94.390,59)	7.629.141,39	1.128.758	100,00
Persen	85,20	16,03	(1,24)	100,00		

Sumber : BPS (data diolah)

KPP > 0 ; Spesialisasi Tumbuh Cepat ; KPP < 0 ; Spesialisasi Tumbuh Lambat
 KPW > 0 ; Memiliki Daya Saing (*Comparative advantage*); KPW < 0 ; Tidak Memiliki Daya Saing
 PB > 0 ; Sektor tersebut progresif ; PB < 0 Sektor tersebut mundur

Hasil analisis *shift share* pada tabel 24 , sektor-sektor yang memiliki nilai *komponen Proportional shift share* positif pada sektor sekunder dan tersier, nilai positif ini mengindikasikan sektor yang sama yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian di tingkat regional, sedangkan sektor primer dan jasa yang memiliki nilai *komponen Proportional shift share* negatif berarti laju pertumbuhannya lambat.

Sedangkan dilihat dari *komponen differential shift/ KPW* pada Kota Jambi sektor yang memiliki daya saing yaitu sektor sekunder dan tersier dengan nilai terbesar pada sektor tersier yaitu 424.289 Milyar rupiah.

Sebagaimana pertumbuhan ekonomi pada kota-kota lain, Kota Jamb telah bergeser kepada sektor selain primer, nilai pergeseran bersih bersiat proresif tertinggi pada sektor tersier dengan distribusi 64,88 persen penyumbang PDRB Kota Jambi.

k. Kota Sungai Penuh

Kota Sungai Penuh berdasarkan nilai *komponen National share* semua Sektor baik Primer, sekunder, tersier maupun jasa dipengaruhi dan mempengaruhi PDRB regional, bernilai positif seperti terlihat pada tabel berikut ini

Tabel.25. Laju Pertumbuhan Sektoral Perekonomian Kota Sungai Penuh (dalam Miliar rupiah dan persen)

Sektor Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan					
	National Share	Proportional Share (Mix/Bauran)	Differential Shift	Pertumbuhan ekonomi	Pergeseran Bersih	%
	KPN	KPP	KPW	PE	PB	
Primer	113.452,45	567,48	(28.067,26)	85.952,67	(27.500)	4,69
Sekunder	208.032,62	134.765,39	(73.400,71)	269.397,30	61.365	14,70
Tersier	767.677,55	276.728,54	27.439,99	1.071.846,08	304.169	58,50
Jasa	433.370,83	(52.509,89)	24.045,37	404.906,30	(28.465)	22,10
Total	1.522.533,45	359.551,51	(49.982,61)	1.832.102,35	309.569	100,00
Persen	83,10	19,63	(2,73)	100,00		

Sumber : BPS (data diolah)

KPP > 0 ; Spesialisasi Tumbuh Cepat ; KPP < 0 ; Spesialisasi Tumbuh Lambat
 KPW > 0 ; Memiliki Daya Saing (*Comparative advantage*); KPW < 0 ; Tidak Memiliki Daya Saing

PB > 0 ; Sektor tersebut progresif ; PB < 0 Sektor tersebut mundur

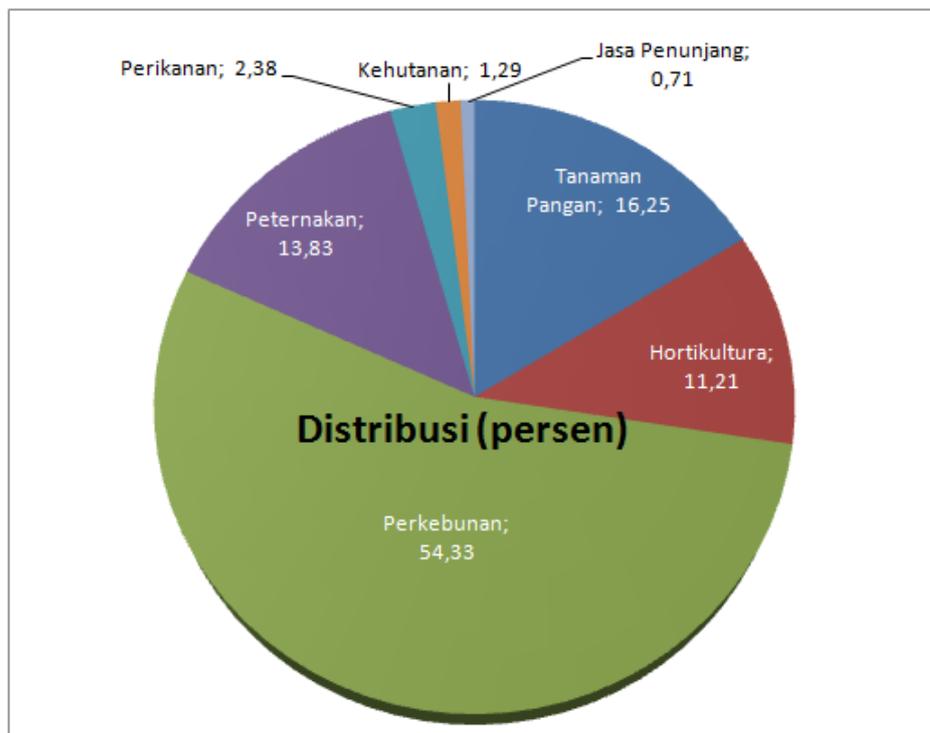
Hasil analisis *shift share* pada tabel.25 di atas, sektor-sektor yang memiliki nilai *komponen Proportional shift share* positif pada sektor primer, sekunder dan tersier, nilai positif ini mengindikasikan sektor yang sama yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian di tingkat regional, sedangkan sektor jasa yang memiliki nilai *komponen Proportional shift share* negatif berarti laju pertumbuhannya lambat. Pada sektor primer masih didominasi dari sektor pertanian.

Sedangkan dilihat dari *komponen differential shift/ KPW* pada Kota Sungai Penuh sektor yang memiliki daya saing yaitu sektor sekunder dan tersier dengan nilai terbesar pada sektor tersier yaitu 27.439 Milyar rupiah.

Sebagaimana pertumbuhan ekonomi pada kota-kota lain, Kota Sungai Penuh mulai bergeser kepada sektor selain primer, nilai pergeseran bersih bersiat progresif tertinggi pada sektor tersier dengan distribusi 58,50 persen penyumbang PDRB Kota Sungai Penuh.

4.3. Analisis Basis dan Rumah Tangga Usaha Pertanian

Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Menurut Kabupaten/Kota dan Subsektor yang diusahakan 2018 sebagaimana pada lampiran 2. Menunjukkan bahwa Provinsi Jambi masih didominasi dari subsektor Perkebunan dengan komposisi sebesar 54,33 persen dari jumlah RTUP dan distribusi subsektor lainnya dapat dilihat pada grafik berikut;



Grafik.11. Distribusi RTUP Sektor Pertanian Tahun 2018

Sedangkan untuk jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian sector yang diusahakan, jenis usaha utama yang diusahakan serta sumber penghasilan utama selengkapnya disajikan dalam table berikut;

Tabel.26. Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) Provinsi Jambi Menurut Sektor yang diusahakan, Jenis Usaha Utama dan Sumber penghasilan Utama Tahun 2018

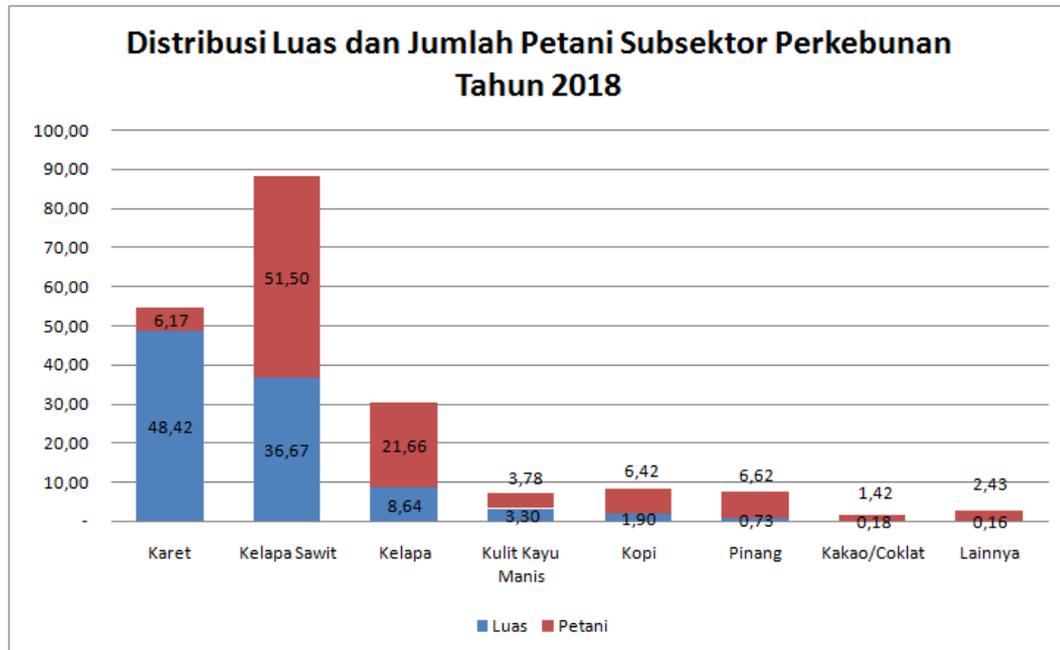
Kabupaten/ Kota	Jumlah RTUP Sub Sektor Yang diusahakan Sektor Pertanian 2018			Jumlah RUTP Jenis Usaha Utama yang diusahakan 2018			Jumlah RUTP dengan sumber penghasilan utama sektor pertanian 2018		
	Total	Perkebunan	%	Total	Perkebunan	%	Total	Perkebunan	%
KERINCI	93.549	25.950	27,74	51.487	11.482	22,30	39.366	8.656	21,99
MERANGIN	103.334	68.147	65,95	71.767	66.057	92,04	54.384	50.910	93,61
SAROLANGUN	77.855	48.938	62,86	55.707	46.068	82,70	40.516	36.995	91,31
BATANGHARI	63.534	34.176	53,79	39.363	32.316	82,10	26.444	23.658	89,46
MUARO JAMBI	68.862	38.238	55,53	46.783	35.060	74,94	32.768	28.275	86,29
TANJAB TIMUR	72.394	39.948	55,18	45.503	37.065	81,46	37.706	31.619	83,86
TANJAB BARAT	63.600	41.943	65,95	47.232	40.688	86,14	38.692	33.524	86,64
TEBO	110.610	66.062	59,73	68.755	64.976	94,50	56.061	55.065	98,22
BUNGO	83.409	47.224	56,62	51.509	45.540	88,41	40.931	37.864	92,51
KOTA JAMBI	15.764	3.256	20,65	10.083	2.327	23,08	3.244	819	25,25
KOTA SUNGAI PENUH	15.277	3.481	22,79	8.170	1.428	17,48	4.669	778	16,66
TOTAL JAMBI	768.188	417.363	54,33	496.359	383.007	77,16	374.781	308.163	82,22

Sumber : BPS. Data diolah

Pada Sektor yang diusahakan sejumlah 768.188 terdapat 54,33 persen atau 417.363 rumah tangga yang bergerak pada sector pertanian sub sector perkebunan mengindikasikan bahwa sub sektor ini merupakan usaha yang dijadikan sumber pendapatan masyarakat Provinsi Jambi dengan terbesar pada Kabupaten Merangin 68.147 rumah tangga, dan pada jenis usaha utama yang diusahakan terdapat 383.007 rumah tangga yang jenis usaha utamanya sub sector perkebunan atau 77,16 persen dari sector pertanian dan pada sumber penghasilan utama, sub sector perkebunan menempati 82,22 persen atau 308.163 rumah tangga bergantung kepada perkebunan.

Hal ini terlihat bahwa sub sector perkebunan dan sector pertanian masih sangat berperan dalam menyumbangkan pendapatan rumah tangga masyarakat Provinsi Jambi.

Sedangkan dilihat dari distribusi jumlah petani dan luas lahan pada sub sektor perkebunan digambarkan seperti grafik berikut;



Gambar 12. Grafik Distribusi Jumlah Petani Subsektor Perkebunan Tahun 2018

Komoditi Karet dan Sawit memiliki luas terbesar dalam luasan usaha perkebunan yakni usaha tanaman karet seluas 667.114 ha, kelapa sawit 505.218 ha sebagaimana data tabel di bawah ini.

Tabel.27. Luas dan Jumlah Petani Komoditi Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2018

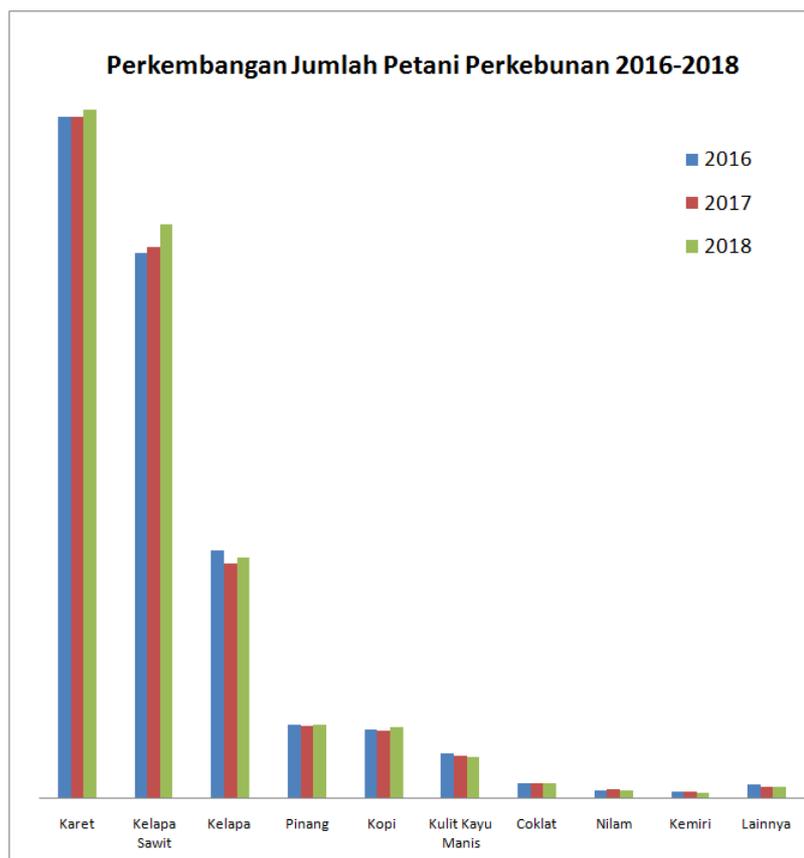
Komoditi	Luas (Ha)	Petani
Karet	667.114	26.583
Kelapa Sawit	505.218	221.711
Kelapa	119.096	93.243
Kulit Kayu Manis	45.431	16.282
Kopi	26.236	27.625
Pinang	10.054	28.503
Kakao/Coklat	2.503	6.111
Lainnya	2.251	10.446
Jumlah	1.377.903	430.504

Sumber : BPS (Data diolah)

Dari Tabel di atas, meskipun karet memiliki luas terbesar namun dalam jumlah petani tanaman karet jauh dibawah angka tanaman kelapa sawit, bahkan hampir sama dengan jumlah petani kopi dan pinang dengan luasan 26.236 ha tanaman kopi dan 10.054 ha tanaman pinang.

Hal ini dapat diartikan bahwa tanaman kopi dan pinang dapat menyerap tenaga kerja dan mendukung pendapatan masyarakat dengan menggunakan luas lahan yang efisien, namun tanaman karet merupakan tanaman lokal dari turun temurun sehingga Provinsi Jambi dikenal dengan julukan Kota Karet.

Jika dilihat dari perkembangan Tahun 2016-2018 terjadi peningkatan jumlah petani pada beberapa jenis tanaman perkebunan sebagaimana grafik berikut;



Gambar. 13. Grafik Perkembangan Jumlah Petani Subsektor Perkebunan Tahun 2016-2018

Berdasarkan datai jumlah petani, peningkatan jumlah rata-rata terbesar pada komoditi tanaman Kelapa Sawit sebesar 2,60 persen, Coklat sebesar 1,82 persen dan komoditi kopi sebesar 1,58 persen. Dan terjadi penurunan yang tidak diharapkan pada komoditi kulit kayu manis yang merupakan komoditi andalan Provinsi Jambi sebesar 3,54 persen. Karena Provinsi Jambi dikenal sebagai produsen komoditi terbesar di dunia.

Dari hasil data yang diperoleh pada jumlah rumah tangga usaha pertanian dapat diketahui bahwa pada daerah mana yang merupakan basis rumah tangga usaha pertanian subsektor perkebunan sebagaimana tabel dibawah ini;

Tabel.28. LQ Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Kabupaten/Kota dan Subsektor yang diusahakan 2018

Subsetor Perkebunan

Kabupaten - Kota	LQ Subsektor Perkebunan	Basis - Rank
KERINCI	0,51	Non Basis
MERANGIN	1,21	Basis Rank 1
SAROLANGUN	1,16	Basis Rank 3
BATANGHARI	0,99	Non Basis
MUARO JAMBI	1,02	Basis Rank 6
TANJUNG JABUNG TIMUR	1,02	Basis Rank 7
TANJUNG JABUNG BARAT	1,21	Basis Rank 2
TEBO	1,10	Basis Rank 4
BUNGO	1,04	Basis Rank 5
KOTA JAMBI	0,38	Non Basis
KOTA SUNGAI PENUH	0,42	Non Basis

Sumber : BPS (data diolah)

Berdasarkan hasil data analisis terlihat bahwa Kabupaten Merangin memiliki nilai LQ tertinggi diikuti Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sarolangun, Tebo, Bungo, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur. Sehingga dapat diartikan bahwa kabupaten yang memiliki nilai LQ > 1 merupakan daerah yang rumah tangga usaha pertanian pada subsektor perkebunan merupakan daerah basis.

4.4. Analisis Location Quotient (LQ) Komoditi Perkebunan.

Sebagaimana tujuan analisis untuk dapat diambil suatu kebijakan pengembangan sumberdaya perkebunan secara berkelanjutan maka perlu diketahui komoditi basis masing-masing daerah dalam wilayah Provinsi Jambi sebagaimana diuraikan pada bagian ini.

a. Kabupaten Kerinci.

Hasil analisis nilai *Location Quotient* (LQ) pada Kabupaten Kerinci yang ditinjau dari segi produksi komoditas seperti tabel.. menunjukkan bahwa komoditi yang memiliki nilai LQ > 1 atau merupakan Komoditi Basis terletak pada 13 komoditi dengan tipologi klassen sebagai berikut ;

Tabel .29. Komoditi Perkebunan dengan Nilai LQ > 1 pada Kabupaten Kerinci

No	Komoditi	LQ	Typologi	Spesialisasi Index
1	Vanili	27,16	Tertinggal	<1
2	Teh	27,16	Tertinggal	4,78
3	Tebu	27,15	Potensial	13,15
4	Kulit Kayu Manis	25,68	Prima	71,53
5	Tembakau	21,95	Potensial	4,77
6	Cengkeh	21,62	Prima	<1
7	Kemiri	18,59	Potensial	<1
8	Kopi Arabica	17,98	Potensial	<1
9	Kopi Robusta	7,80	Prima	<1
10	Aren	6,75	Prima	<1
11	Nilam	3,40	Potensial	<1
12	Lada	2,38	Potensial	<1
13	Kakao/Coklat	1,07	Potensial	<1

Sumber: BPS (data diolah)

Dari 13 komoditi yang merupakan komoditi basis terdapat nilai tertinggi pada komoditi Vanili dan terkecil Kakao, namun dari sisi Typologi Klassen, Komoditi Kulit Manis berada pada kuadran Prima bersama dengan cengkeh, kopi robusta dan aren, sedangkan pada komoditi Vanili dengan nilai basis tertinggi berada pada kuadran tertinggal bersama komoditi Teh. Sebagaimana kita ketahui, komoditi Teh di kelola oleh

Perusahaan negara dan cenderung tidak mengalami perubahan luas lahan yang juga mempengaruhi tingkat produksi yang stagnan.

Sedangkan jika kita lihat pada nilai inde spesialisasi (SI) terdapat 4 komoditi yang merupakan komoditi spesialisasi dengan nilai terbesar pada komoditi Kulit Kayu manis dan terkecil tembakau. Nilai SI memberikan penjelasan bahwa pada Kabupaten ini, komoditi Kulit kayu manis, Teh, Tebu dan tembakau merupakan komoditi spesialisasi dari sisi produksi.

b. Kabupaten Merangin.

Hasil analisis nilai *Location Quotient* (LQ) pada Kabupaten Merangin yang ditinjau dari segi produksi komoditas seperti tabel.. menunjukkan bahwa komoditi yang memiliki nilai LQ > 1 atau merupakan Komoditi Basis terletak pada 6 komoditi dengan tipologi klassen sebagai berikut ;

Tabel.30. Komoditi Perkebunan dengan Nilai LQ > 1 pada Kabupaten Merangin

No	Komoditi	LQ	Typologi	Spesialisasi Index
1	Nilam	5,49	Prima	<1
2	Kapuk	4,22	Potensial	<1
3	Kopi Robusta	3,83	Potensial	2,00
4	Kelapa Hybrida	2,95	Potensial	<1
5	Aren	2,11	Prima	<1
6	Karet	1,45	Potensial	7,22

Sumber: BPS (data diolah)

Terdapat 6 komoditi yang merupakan komoditi basis terdapat nilai tertinggi pada komoditi Nilam dan terkecil pada komoditi Karet, namun dari sisi Typologi Klassen, Komoditi pada kuadran potensial.

Sedangkan jika kita lihat pada nilai inde spesialisasi (SI) terdapat hanya 2 komoditi yang merupakan komoditi spesialisasi dengan nilai terbesar pada komoditi Karet dan Kopi Robusta. Dimana Komoditi Karet kabupaten ini memberikan kontribusi 19,69 persen dari produksi total.

c. Kabupaten Sarolangun.

Hasil analisis nilai *Location Quotient* (LQ) pada Kabupaten Sarolangun yang ditinjau dari segi produksi komoditas seperti tabel.. menunjukkan bahwa hanya 2 komoditi yang memiliki nilai LQ > 1 atau merupakan Komoditi Basis dengan tipologi klassen sebagai berikut ;

Tabel.31. Komoditi Perkebunan dengan Nilai LQ > 1 pada Kabupaten Sarolangun

No	Komoditi	LQ	Typologi	Spesialisasi Index
1	Karet	1,88	Potensial	12,72
2	Kapuk	1,47	Potensial	<1

Sumber: BPS (data diolah)

Dari komoditi yang merupakan komoditi basis terdapat nilai tertinggi pada komoditi Karet dan kapuk, namun dari sisi Typologi Klassen, Komoditi pada kuadran potensial.

Sedangkan jika kita lihat pada nilai index spesialisasi (SI) hanya komoditi Karet yang merupakan komoditi spesialisasi dengan nilai 12,72 dimana Komoditi Karet kabupaten ini memberikan kontribusi 17,25 persen dari produksi total.

d. Kabupaten Batanghari.

Hasil analisis nilai *Location Quotient* (LQ) pada Kabupaten Batanghari yang ditinjau dari segi produksi komoditas seperti tabel.. menunjukkan terdapat 6 komoditi yang memiliki nilai LQ > 1 atau merupakan Komoditi Basis dengan tipologi klassen sebagai berikut ;

Tabel.32. Komoditi Perkebunan dengan Nilai LQ > 1 pada Kabupaten Batanghari

No	Komoditi	LQ	Typologi	Spesialisasi Index
1	Lada	3,63	Prima	<1
2	Kapuk	2,42	Potensial	<1
3	Karet	1,56	Prima	9,19
4	Aren	1,24	Potensial	<1
5	Kelapa Hybrida	1,17	Potensial	<1
6	Kelapa Sawit	1,00	Prima	1,19

Sumber: BPS (data diolah)

Dari komoditi yang merupakan komoditi basis terdapat nilai tertinggi pada komoditi Lada dan terkecil pada kelapa sawit. Sedangkan komoditi yang masuk kedalam kuadran Prima hanya pada Karet dan kelapa sawit dan sisanya berada pada kuadran potensial dari sisi Typologi Klassen.

Sedangkan jika kita lihat pada nilai index spesialisasi (SI) hanya komoditi Karet dan kelapa sawit yang merupakan komoditi spesialisasi dengan nilai 9,19 pada Komoditi Karet dengan memberikan kontribusi 21,97 persen atau yang terbesar dari produksi total dan nilai SI 1,19 pada komoditi kelapa sawit.

e. Kabupaten Muaro Jambi.

Hasil analisis nilai *Location Quotient* (LQ) pada Kabupaten Batanghari yang ditinjau dari segi produksi komoditas seperti tabel.. menunjukkan terdapat 3 komoditi yang memiliki nilai LQ > 1 atau merupakan Komoditi Basis dengan tipologi kelasen sebagai berikut ;

Tabel.33. Komoditi Perkebunan dengan Nilai LQ > 1 pada Kabupaten Muaro Jambi

No	Komoditi	LQ	Typologi	Spesialisasi Index
1	Kakao/Coklat	2,72	Prima	<1
2	Aren	1,90	Potensial	<1
3	Kelapa Sawit	1,23	Potensial	16,33

Sumber: BPS (data diolah)

Dari komoditi yang merupakan komoditi basis terdapat nilai tertinggi pada komoditi Kakao/coklat dan terkecil pada kelapa sawit. Sedangkan komoditi yang masuk kedalam kuadran Prima hanya pada Kakao sedangkan Aren dan kelapa sawit berada pada kuadran potensial dari sisi Typologi Klassen.

Dari nilai index spesialisasi (SI) hanya komoditi kelapa sawit yang merupakan komoditi spesialisasi dengan nilai 16,33 pada Komoditi kelapa

sawit ini dengan memberikan kontribusi 17,54 persen atau yang terbesar kedua dari produksi total pada komoditi kelapa sawit.

f. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Hasil analisis nilai *Location Quotient* (LQ) pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditinjau dari segi produksi komoditas seperti tabel.. menunjukkan terdapat 6 komoditi yang memiliki nilai LQ > 1 atau merupakan Komoditi Basis dengan tipologi klasen sebagai berikut ;

Tabel.34. Komoditi Perkebunan dengan Nilai LQ > 1 pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Komoditi	LQ	Typologi	Spesialisasi Index
1	Pinang	8,54	Prima	4,42
2	Kelapa Dalam	8,05	Potensial	39,10
3	Lada	5,81	Potensial	<1
4	Kelapa Hybrida	4,73	Potensial	<1
5	Kakao/Coklat	3,47	Potensial	<1
6	Kopi Robusta	1,41	Potensial	<1

Sumber: BPS (data diolah)

Dari komoditi yang merupakan komoditi basis terdapat nilai tertinggi pada komoditi Pinang dan terkecil pada komoditi Kopi Robusta. Sedangkan komoditi yang masuk kedalam kuadran Prima hanya pada Pinang sedangkan yang lain berada pada kuadran potensial dari sisi Typologi Klasen.

Dari nilai index spesialisasi (SI) hanya komoditi Kelapa Dalam dengan nilai 39,10 dan Pinang spesialisasi index dengan nilai 4,42 dimana komoditi pinang memberikan kontribusi 49,89 persen dari produksi total pada komoditi pinang.

g. Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Hasil analisis nilai *Location Quotient* (LQ) pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditinjau dari segi produksi komoditas seperti tabel..

menunjukkan terdapat 6 komoditi yang memiliki nilai $LQ > 1$ atau merupakan Komoditi Basis dengan tipologi klassen sebagai berikut ;

Tabel.35. Komoditi Perkebunan dengan Nilai $LQ > 1$ pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Komoditi	LQ	Typologi	Spesialisasi Index
1	Kelapa Dalam	2,72	Prima	9,55
2	Pinang	2,60	Potensial	1,01
3	Kelapa Sawit	1,13	Potensial	9,25

Sumber: BPS (data diolah)

Dari komoditi yang merupakan komoditi basis terdapat nilai tertinggi pada komoditi Kelapa Dalam dan terkecil pada komoditi kelapa sawit. Sedangkan komoditi yang masuk kedalam kuadran Prima hanya pada Pinang sedangkan yang lain berada pada kuadran potensial dari sisi Typologi Klassen.

Dari nilai index spesialisasi (SI) semua komoditi yang basis daerah memiliki nilai $SI > 1$ dengan nilai 9,55 pada kelapa dalam yang merupakan produksi terbesar untuk komoditi ini dalam wilayah Provinsi Jambi dengan persentase 49,05, Komoditi Kelapa sawit 9,25 yang juga merupakan produksi terbesar dan SI 1,01 untuk komoditi Pinang dimana komoditi pinang memberikan kontribusi terbesar kedua yakni 48,30 persen dari produksi total pada komoditi pinang.

h. Kabupaten Tebo.

Hasil analisis nilai *Location Quotient* (LQ) pada Kabupaten Tebo yang ditinjau dari segi produksi komoditas seperti tabel.. menunjukkan terdapat 2 komoditi yang memiliki nilai $LQ > 1$ atau merupakan Komoditi Basis dengan tipologi klassen sebagai berikut ;

Tabel.36. Komoditi Perkebunan dengan Nilai LQ > 1 pada Kabupaten Tebo

No	Komoditi	LQ	Typologi	Spesialisasi Index
1	Karet	1,49	Prima	8,26
2	Kelapa Sawit	1,03	Potensial	1,98

Sumber: BPS (data diolah)

Pada Kabupaten Tebo yang merupakan komoditi basis terdapat nilai tertinggi pada komoditi Karet dengan typologi kelasen Prima dan pada komoditi kelapa sawit Typologi Klassen Potensial.

Dari nilai index spesialisasi (SI) semua komoditi yang basis daerah memiliki nilai SI > 1 dengan nilai 8,26 dan Komoditi Kelapa sawit 1,98.

i. Kabupaten Bungo.

Hasil analisis nilai *Location Quotient* (LQ) pada Kabupaten Bungo yang ditinjau dari segi produksi komoditas seperti tabel.. menunjukkan terdapat 2 komoditi yang memiliki nilai LQ > 1 atau merupakan Komoditi Basis dengan tipologi kelasen sebagai berikut ;

Tabel.37. Komoditi Perkebunan dengan Nilai LQ > 1 pada Kabupaten Bungo

No	Komoditi	LQ	Typologi	Spesialisasi Index
1	Karet	1,41	Potensial	6,93
2	Kelapa Sawit	1,04	Potensial	3,26

Sumber: BPS (data diolah)

Pada Kabupaten Bungo memiliki tipe jenis basis yang sama dengan Kabupaten Tebo dimana yang merupakan komoditi basis terdapat nilai tertinggi 1,41 pada komoditi Karet dan komoditi kelapa sawit 1,04 dengan Typologi Klassen Potensial.

Dari nilai index spesialisasi (SI) semua komoditi yang basis daerah memiliki nilai SI > 1 dengan nilai 6,93 dan Komoditi Kelapa sawit 3,26.

j. Kota Sungai Penuh.

Hasil analisis nilai *Location Quotient* (LQ) pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditinjau dari segi produksi komoditas seperti tabel.. menunjukkan terdapat 9 komoditi yang memiliki nilai LQ > 1 atau merupakan Komoditi Basis dengan tipologi klassen sebagai berikut ;

Tabel.38. Komoditi Perkebunan dengan Nilai LQ > 1 pada Kota Sungai Penuh

No	Komoditi	LQ	Typologi	Spesialisasi Index
1	Kopi Arabica	1260	Potensial	12,91
2	Cengkeh	750	Potensial	1,08
3	Kemiri	570	Potensial	6,25
4	Tembakau	433	Potensial	7,05
5	Kakao/Coklat	116	Potensial	5,03
6	Kopi Robusta	25,69	Potensial	18,15
7	Kulit Kayu Manis	14,73	Prima	37,83
8	Pinang	8,36	Potensial	5,12
9	Tebu	2,22	Potensial	<1

Sumber: BPS (data diolah)

Dari komoditi yang merupakan komoditi basis terdapat nilai tertinggi pada komoditi Kopi arabica dan terendah pada komoditi tebu, Sedangkan komoditi yang masuk kedalam kuadran Prima hanya pada Kulit Kayu Manis sedangkan yang lain berada pada kuadran potensial dari sisi Typologi Klassen.

Dari nilai index spesialisasi (SI) semua komoditi yang basis daerah memiliki nilai SI > 1 kecuali komoditi tebu tidak spesialisasi daerah. Nilai SI tertinggi terdapat pada komoditi Kulit kayu manis dan terendah untuk Nilai SI adalah cengkeh 1,08.

4.5. Analisis Penentuan Faktor-faktor penentuan komoditas sasaran secara berkelanjutan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 Tanggal 12 September 2006 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan terdapat 127 komoditas binaan. Prioritas penanganan difokuskan pada 15 komoditas strategis yang menjadi unggulan nasional yaitu : Karet, Kelapa Sawit, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu mete, teh, cengkeh, jarak pagar, kemiri sunan, tebu, kapas, tembakau dan nilam, sedangkan kepada Pemerintah daerah didorong untuk memfasilitasi dan melakukan pembinaan komoditi spesifik dan potensial di wilayah masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang kebijakan Industri Nasional, komoditi perkebunan yang terkait dengan pengembangan Industri Agro adalah : Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Kopi, Tebu dan Tembakau.

Maka dalam analisis ini untuk menentukan bobot-bobot faktor-faktor penentu komoditas berdasarkan komoditas unggulan dan spesialisasi digunakan teknik analisis Analytical Hierarchy Process (AHP), yaitu suatu pendekatan dalam pengambilan keputusan yang didesain untuk membantu pemecahan terhadap permasalahan yang kompleks dengan banyak kriteria dan melibatkan banyak variabel. Penentuan komoditas ini diharapkan pemanfaatan sumberdaya alokasi dapat tepat dan terarah sehingga diharapkan menghasilkan manfaat yang luas untuk kepentingan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi umumnya.

Prinsip kerja AHP adalah penyederhanaan suatu persoalan kompleks yang tidak terstruktur, strategis dan dinamis menjadi bagian-bagiannya serta menata dalam suatu hierarki. Kemudian setiap tingkat kepentingan setiap variabel tersebut secara relatif dibandingkan dengan variabel yang lain. Berikut adalah tahapan dalam analisis AHP;

1. Identifikasi permasalahan
2. Sintesa hierarki

3. Penyebaran kuesoner
4. Pengolahan matrks berpasangan
5. Perhitungan bobot kriteria.

Adapun dalam penentuan komoditas unggulan pilihan pengembangan berdasarkan kriteria-kriteria ; (A) Program Pemerintah; (B) Biaya Penanaman/Perawatan ;(C) Harga Jual Produk ; (D) Daya tahan / Resintance (E) Umur Produktifitas. Sedangkan sebagai alternatif pilihan komoditi berdasarkan nilai LQ >1 atau komoditi basis yang telah didapat pada masing-masing daerah pada perhitungan sebelumnya.

Dari hasil analisis LQ dan SSA telah didapatkan jenis komoditas unggulan dari beberapa komoditi di masing-masing daerah kabupaten/kota. Dari komoditi tersebut akan ditentukan komoditi prioritas pengembangan berdasarkan tinjauan kebijakan pemerintah yang dikompilasikan dengan kriteria lain seperti di atas, dengan nilai Matriks Perbandingan Berpasangan antar kriteria dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel.39. Bobot Antar Kriteria

	Kriteria	A1	A2	A3	A4	A5
A1	Program Pemerintah	1,00	0,20	0,14	0,33	0,33
A2	Biaya Penanaman/Perawatan	5,00	1,00	0,50	5,00	5,00
A3	Harga Jual Produk	7,00	2,00	1,00	7,00	7,00
A4	Resistance	3,00	0,20	0,14	1,00	1,00
A5	Umur Produktiitas	3,00	0,20	0,14	1,00	1,00
	Jumlah	19,00	3,60	1,93	14,33	14,33

Tabel.40. Nilai Eigen Kriteria

A1	A2	A3	A4	A5	Rata-rata	Total Baris	Eigen Value
0,053	0,056	0,074	0,023	0,023	0,046	0,229	0,232
0,263	0,278	0,259	0,349	0,349	0,300	1,498	1,624
0,368	0,556	0,519	0,488	0,488	0,484	2,419	2,599
0,158	0,056	0,074	0,070	0,070	0,085	0,427	0,437
0,158	0,056	0,074	0,070	0,070	0,085	0,427	0,437
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		L maks	5,33

Penilaian dalam membandingkan antara satu kriteria dengan kriteria yang lain adalah bebas satu sama lainnya, dan dalam hal ini dapat mengarah kepada ketidak konsistensian.

$$CI = (5,33 - 5) / (5-1) = 0,082$$

$$RI = 1,120 \text{ (Tabel RI kriteria 5)}$$

$$CR = 0,082/1,120 = \mathbf{0,074}$$

Nilai $0,074 < 0,1$ berarti memiliki nilai yang konsistensi.

Maka dapat dilanjutkan dengan perhitungan selanjutnya dengan perbandingan antar Alternatif pada setiap kriteria, untuk lebih jelasnya komoditi prioritas pengembangan pada masing-masing Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jambi;

A. Kabupaten Kerinci

Kabupaten Kerinci yang merupakan kabupaten yang berada pada dataran tinggi memiliki paling banyak komoditi basis, perhitungan faktor bobot untuk semua kriteria pada Kabupaten Kerinci didapat bobot sebagai berikut :

Tabel.41. Eigen Value, Alternatif, Bobot dan Ranking Kabupaten Kerinci

No	Alternatif	A1	A2	A3	A4	A5	Bobot	Ranking
1	Vanili	0,072	0,065	0,059	0,013	0,013	0,053	12
2	Teh	0,019	0,049	0,032	0,171	0,173	0,060	11
3	Tebu	0,073	0,182	0,034	0,013	0,013	0,077	8
4	Kulit Kayu Manis	0,042	0,042	0,150	0,119	0,111	0,107	1
5	Tembakau	0,077	0,062	0,076	0,068	0,070	0,071	9
6	Cengkeh	0,108	0,067	0,117	0,097	0,079	0,096	3
7	Kemiri	0,078	0,069	0,060	0,068	0,081	0,066	10
8	Kopi Arabica	0,087	0,078	0,085	0,116	0,115	0,088	5
9	Kopi Robusta	0,078	0,071	0,071	0,118	0,118	0,079	7
10	Aren	0,031	0,035	0,033	0,037	0,037	0,034	13
11	Nilam	0,116	0,099	0,098	0,042	0,034	0,089	4
12	Lada	0,128	0,107	0,104	0,060	0,061	0,098	2
13	Kakao/Coklat	0,091	0,075	0,080	0,079	0,094	0,080	6

Dari perhitungan tabel di atas, didapat nilai komoditi kulit kayu manis memiliki nilai bobot tertinggi sebesar 0,107 diikuti komoditi lada dan cengkeh, sedangkan nilai terendah pada komoditi aren sebesar 0,034. Dari hasil ini bisa dikatakan, Kulit kayu manis memang paling spesialis dan terpilih dari kriteria.

B. Kabupaten Merangin

Perhitungan faktor bobot untuk semua kriteria pada Kabupaten Merangin didapat bobot sebagai berikut :

Tabel.42. Eigen Value, Alternatif, Bobot dan Ranking Kabupaten Merangin

No	Alternatif	A1	A2	A3	A4	A5	Bobot	Peringkat
1	Karet	0,154	0,264	0,070	0,077	0,152	0,1396	4
2	Kelapa Hybrida	0,191	0,074	0,096	0,335	0,217	0,1246	5
3	Kapuk	0,188	0,054	0,051	0,017	0,246	0,0717	6
4	Kopi Robusta	0,218	0,227	0,275	0,320	0,207	0,2558	1
5	Aren	0,084	0,118	0,188	0,110	0,163	0,1536	3
6	Nilam	0,166	0,263	0,320	0,141	0,016	0,2547	2

Berdasarkan hasil pembobotan nilai maka didapat komoditi Kopi Robusta menjadi komoditi pengembangan yang diharapkan dapat diterima masyarakat dan menjadi sumber perekonomian masyarakat. Dengan Nilai bobot tertinggi 0,2558 pada komoditi Kopi Robusta dan terendah 0,0717 pada komoditi kapuk dari 6 komoditi basis pada kabupaten ini.

C. Kabupaten Sarolangun

Perhitungan faktor bobot untuk semua kriteria pada Kabupaten Sarolangun didapat bobot sebagai berikut :

Tabel.43. Eigen Value, Alternatif, Bobot dan Ranking Kabupaten Sarolangun

No	Alternatif	A1	A2	A3	A4	A5	Bobot	Peringkat
1	Karet	0,500	0,833	0,750	0,250	0,500	0,699	1
2	Kapuk	0,500	0,167	0,250	0,750	0,500	0,301	2

Komoditi Karet merupakan alternatif peringkat pertama berdasarkan hasil pembobotan dengan nilai 0,699 dimana kita ketahui bahwa produksi rata-rata kabupaten ini 17,25 persen atau peringkat ketiga dari total produksi komoditi karet Provinsi Jambi.

D. Kabupaten Batanghari

Perhitungan faktor bobot untuk semua kriteria pada Kabupaten Batanghari didapat bobot sebagai berikut :

Tabel.44. Eigen Value, Alternatif, Bobot dan Ranking Kabupaten Batanghari

No	Alternatif	A1	A2	A3	A4	A5	A6	Bobot	Peringkat
1	Karet	0,259	0,268	0,202	0,207	0,253	0,259	0,229	1
2	Kelapa Hybrida	0,207	0,307	0,081	0,291	0,196	0,207	0,182	3
3	Kapuk	0,191	0,061	0,051	0,057	0,257	0,191	0,079	6
4	Kopi Robusta	0,161	0,239	0,273	0,173	0,014	0,161	0,227	2
5	Aren	0,049	0,046	0,147	0,120	0,228	0,049	0,117	5
6	Nilam	0,133	0,080	0,246	0,152	0,052	0,133	0,166	4

Kabupaten Batanghari memiliki 6 komoditi basis pada perhitungan Location Quotients (LQ) dan hasil pembobotan nilai maka didapat komoditi karet menempati urutan pertama dalam perhitugan AHP dengan nilai 0,229 dan terkecil Kapuk dengan nilai 0,079. Dimana produksi rata-rata Karet pada Kabuapten Batanghari memberikan kontribusi terbesar yaitu 21,97 persen dari total produksi rata-rata komoditi karet Provinsi Jambi.

E. Kabupaten Muaro Jambi

Perhitungan faktor bobot untuk semua kriteria pada Kabupaten Muaro Jambi didapat bobot sebagai berikut :

Tabel.45. Eigen Value, Alternatif, Bobot dan Ranking Kabupaten Muaro Jambi

No	Alternatif	A1	A2	A3	A4	A5	Bobot	Peringkat
1	Kelapa Sawit	0,655	0,597	0,190	0,155	0,419	0,350	2
2	Kakao/Coklat	0,187	0,282	0,494	0,777	0,091	0,406	1
3	Aren	0,158	0,120	0,316	0,069	0,489	0,244	3

Kabupaten Muaro Jambi memiliki 3 komoditi basis pada perhitungan Location Quotients (LQ) dan hasil pembobotan nilai maka didapat komoditi Kakao/coklat menempati urutan pertama dalam perhitungan AHP dengan nilai 0,406 dan terkecil Aren dengan nilai 0,244. Dimana produksi rata-rata Kakao/coklat pada Kabupaten Muaro Jambi memberikan kontribusi terbesar yaitu 38,34 persen dari total produksi rata-rata komoditi Kakao/coklat Provinsi Jambi.

F. Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Pada kabupaten ini terdapat 6 komoditi basis dengan perhitungan faktor bobot untuk semua kriteria pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur didapat bobot sebagai berikut :

Tabel.46. Eigen Value, Alternatif, Bobot dan Ranking Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Alternatif	A1	A2	A3	A4	A5	Bobot	Peringkat
1	Kelapa Dalam	0,110	0,264	0,031	0,129	0,196	0,127	4
2	Kelapa Hybrida	0,106	0,074	0,032	0,319	0,211	0,088	6
3	Kopi Robusta	0,203	0,054	0,090	0,055	0,211	0,092	5
4	Lada	0,212	0,227	0,298	0,271	0,153	0,258	2
5	Kakao/Coklat	0,161	0,118	0,215	0,111	0,164	0,170	3
6	Pinang	0,208	0,263	0,334	0,113	0,065	0,265	1

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 6 komoditi basis pada perhitungan Location Quotients (LQ) dan hasil pembobotan nilai maka didapat komoditi Pinang menempati urutan pertama dalam perhitungan AHP dengan nilai 0,265 dan terkecil kelapa hybrida dengan nilai 0,088. Dimana produksi rata-rata pinang pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan kontribusi terbesar yaitu 49,89 persen dari total produksi rata-rata komoditi Pinang Provinsi Jambi.

G. Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pada kabupaten ini terdapat 3 komoditi basis dengan perhitungan faktor bobot untuk semua kriteria pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat didapat bobot sebagai berikut :

Tabel. 47. Eigen Value, Alternatif, Bobot dan Ranking Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Alternatif	A1	A2	A3	A4	A5	Bobot	Peringkat
1	Kelapa Sawit	0,592	0,633	0,089	0,287	0,421	0,320	2
2	Kelapa Dalam	0,211	0,106	0,273	0,332	0,321	0,229	3
3	Pinang	0,196	0,260	0,638	0,380	0,258	0,450	1

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki 3 komoditi basis pada perhitungan Location Quotients (LQ) dan hasil pembobotan nilai maka didapat komoditi Pinang menempati urutan pertama dalam perhitungan AHP dengan nilai 0,450 dan terkecil kelapa Dalam dengan nilai 0,229 Dimana produksi rata-rata pinang pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan kontribusi terbesar kedua setelah Tanjung Jabung Timur yaitu 48,30 persen dari total produksi rata-rata komoditi Pinang Provinsi Jambi.

H. Kabupaten Tebo

Pada kabupaten ini terdapat 2 komoditi basis dengan perhitungan faktor bobot untuk semua kriteria pada Kabupaten Tebo didapat bobot sebagai berikut :

Tabel.48. Eigen Value, Alternatif, Bobot dan Ranking Kabupaten Tebo

No	Alternatif	A1	A2	A3	A4	A5	Bobot	Peringkat
1	Karet	0,500	0,500	0,833	0,250	0,500	0,640	1
2	Kelapa Sawi	0,500	0,500	0,167	0,750	0,500	0,360	2

Kabupaten Tebo hanya memiliki 2 komoditi basis pada perhitungan Location Quotients (LQ) dan hasil pembobotan nilai maka didapat komoditi karet menempati urutan pertama dalam perhitungan AHP dengan nilai 0,640 dan selanjutnya kelapa sawit dengan nilai 0,360 Dimana produksi rata-rata karet 4.533 ton dengan memberikan kontribusi sebesar 13,87 persen dari total produksi rata-rata komoditi karet di Provinsi Jambi.

I. Kabupaten Bungo

Pada kabupaten ini terdapat 2 komoditi basis dengan perhitungan faktor bobot untuk semua kriteria pada Kabupaten Bungo didapat bobot sebagai berikut :

Tabel.49. Eigen Value, Alternatif, Bobot dan Ranking Kabupaten Bungo

No	Alternatif	A1	A2	A3	A4	A5	Bobot	Peringkat
1	Karet	0,500	0,500	0,833	0,250	0,500	0,640	1
2	Kelapa Sawi	0,500	0,500	0,167	0,750	0,500	0,360	2

Kabupaten Bungo sama dengan Kabupaten Tebo hanya memiliki 2 komoditi basis pada perhitungan Location Quotients (LQ) dan hasil pembobotan nilai maka didapat komoditi karet menempati urutan pertama dalam perhitungan AHP dengan nilai 0,640 dan selanjutnya kelapa sawit dengan nilai 0,360 Dimana produksi rata-rata karet 50.810 ton pada Kabupaten Tebo dengan memberikan kontribusi sebesar 15,15 persen dari total produksi rata-rata komoditi karet di Provinsi Jambi.

J. Kota Sungai Penuh

Pada kabupaten ini terdapat 9 komoditi basis dengan perhitungan faktor bobot untuk semua kriteria pada Kota Sungai Penuh didapat bobot sebagai berikut :

Tabel.50. Eigen Value, Alternatif, Bobot dan Ranking Kota Sungai Penuh

No	Alternatif	A1	A2	A3	A4	A5	Bobot	Peringkat
1	Kulit Kayu Manis	0,061	0,037	0,172	0,098	0,144	0,118	5
2	Kopi Arabica	0,086	0,117	0,044	0,163	0,156	0,087	8
3	Kopi Robusta	0,073	0,075	0,063	0,051	0,140	0,072	9
4	Cengkeh	0,091	0,113	0,188	0,130	0,116	0,150	1
5	Kakao/Coklat	0,147	0,139	0,106	0,072	0,138	0,118	4
6	Pinang	0,117	0,099	0,153	0,091	0,084	0,124	3
7	Kemiri	0,144	0,135	0,093	0,124	0,055	0,107	6
8	Tebu	0,138	0,147	0,067	0,137	0,042	0,098	7
9	Tembakau	0,143	0,138	0,115	0,134	0,125	0,125	2

Kota Sungai memiliki 9 komoditi basis pada perhitungan Location Quotients (LQ) dan hasil pembobotan nilai maka didapat komoditi Cengkeh menempati urutan pertama dalam perhitungan AHP dengan nilai 0,150 dan selanjutnya Tembakau dengan nilai 0,125 dan terkecil Kopi Robusta.

4.6. Strategi Pengembangan Sumber Daya Perkebunan Secara Berkelanjutan

Untuk menganalisis strategi pengembangan sumberdaya perkebunan secara berkelanjutan di Provinsi Jambi menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor produksi secara sistematis untuk merumuskan strategi suatu kebijakan. Analisis ini didasarkan pada usaha untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman secara bersamaan. Model analisis yang digunakan dalam perumusan strategi yang akan dijalankan yaitu model matrik SWOT. Berdasarkan hasil analisis dan pengamatan dari sistem agribisnis perkebunan diperoleh beberapa faktor internal dan eksternal yang menentukan arah pengembangan sumberdaya perkebunan di Provinsi Jambi. Selengkapnya dapat dilihat pada bagian berikut ini.

4.6.1. Analisis Matriks IFAS (*Internal Faktor Analisis System*)

Pada beberapa daerah dan komoditi masih bisa dilakukan ekstensiikasi dan intensifikasi usaha tani perkebunan

Dalam berbagai aspek yang telah diidentifikasi mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan tersebut, dikaji dengan analisis SWOT untuk menemukan kondisi pengembangan saat ini. Untuk menemukan kondisi terkini/aktual mengenai pengembangan agribisnis hortikultura, maka dilakukan pemberian bobot dan peringkat untuk setiap aspek yang diidentifikasi pada empat komponen analisis SWOT. Hasil pemberian bobot untuk faktor-faktor internal-eksternal disajikan pada Tabel berikut;

Tabel. 51. Nilai Bobot dan Rating untuk faktor internal.

Faktor Strategis Internal		Bobot	Rating	Skor (Bobot Rating)
KEKUATAN				
S1.	Faktor geografis dan biofisik lahan yang cocok untuk tanaman perkebunan sangat mendukung	0,11	4,25	0,49
S2.	Komoditi Merupakan Basis dan telah lama dikenal petani (LQ > 1)	0,09	4,50	0,39
S3.	Intensifikasi dan ekstensifikasi	0,11	4,13	0,47
S4.	Pengetahuan dan ketrampilan Petani	0,11	4,00	0,46
S5.	Komitmen Pemerintah Daerah	0,11	3,25	0,37
S6.	Tenaga Kerja Dari dalam Keluarga	0,09	3,13	0,27
Sub Total Kekuatan		0,63		2,44
KELEMAHAN				
W1.	Rendahnya Modal Perkebunan Rakyat	0,09	2,50	0,21
W2.	Pengolahan hasil masih kurang optimal	0,14	3,25	0,46
W3.	Ketersediaan media informasi harga langsung ke petani	0,06	3,00	0,17
W4.	Produktivitas relatif rendah	0,09	3,13	0,27
Sub Total Kelemahan		0,37		1,12
Total Internal (SO)		1,00		3,56

Hasil identifikasi faktor internal di atas yang terdiri dari 6 faktor kekuatan (S) dan 4 faktor kelemahan (W). Nilai atau skor tertinggi pada faktor kekuatan terletak pada S1 yaitu “Faktor geografis dan biofisik lahan yang cocok untuk tanaman perkebunan sangat mendukung” yakni 0,49, dan pada faktor kelemahan pada W2 yaitu “Pengolahan hasil produksi yang masih kurang optimal” yakni 0,46

Berdasarkan hasil perhitungan yang dibuat pada tabel faktor internal di atas, diperoleh nilai total IFAS untuk agribisnis hortikultura sebesar 3,42 yang terdiri dari skor kekuatan sebesar 2,07 atau (60,47 %) dengan skor kekuatan tertinggi 0,77 yaitu “Kondisi Geografis dan Agroklimat yang mendukung” dan skor kelemahan 1,35 atau (39,53 %) dengan skor faktor kelemahan terendah 0,13 yaitu “Permodalan”. Oleh karena itu dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan yang ada, maka agribisnis hortikultura masih menduduki posisi strategis yang cukup kuat untuk terus dikembangkan karena faktor kekuatan lebih dominan daripada faktor kelemahan.

4.6.2. Analisis Matriks EFAS (Eksternal Faktor Analisis System)

Tabel.52 . Bobot dan Rating untuk Faktor Eksternal

Faktor Strategis Eksternal		Bobot	Rating	Skor (Bobot Rating)
PELUANG				
1.	Perluasan lahan masih tersedia (pada komoditi tertentu)	0,10	4,50	0,47
2.	Faktor Sosial Budaya	0,14	3,75	0,52
3.	Tidak memerlukan teknologi tinggi	0,07	4,50	0,31
4.	Permintaan hasil poduk perkebunan tinggi	0,14	4,25	0,59
Sub Total Peluang		0,45		1,88
TANTANGAN				
1.	Gangguan Hama dan Penyakit	0,14	3,88	0,53
2.	Penyediaan Input (Harga Pupuk Mahal)	0,17	4,00	0,69
3.	Tingkat Suku bunga	0,05	3,38	0,17
4.	Perubahan Iklim, Gagal Panen	0,12	3,50	0,42
5.	Adanya Spekulasi dan fluktuasi harga	0,07	3,50	0,24
Sub Total Tantangan		0,55		2,06
Total Eksternal (SO)		1,00		3,94

Sumber: Data Primer (Diolah)

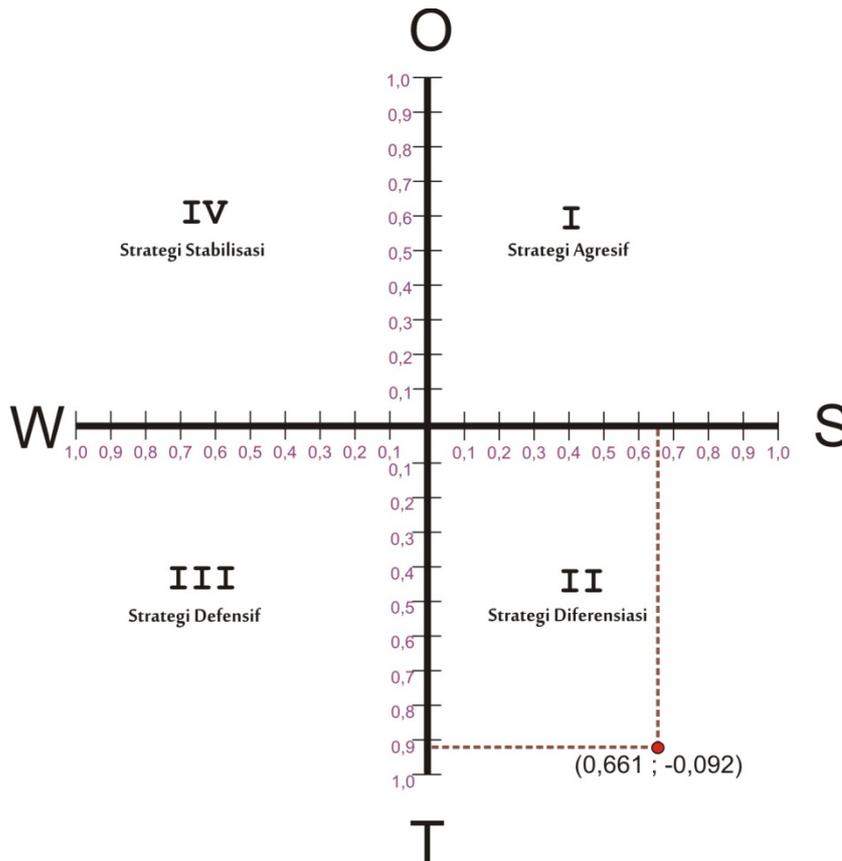
EFAS \ IFAS	KEKUATAN (Strengths)	KELEMAHAN (Weakness)
PELUANG (Opportunities)	STRATEGI (SO) = 2,44 + 1,88 = 4,32 <i>(Comparative Advantage)</i>	STRATEGI (WO) = 1,12 + 1,88 = 3,00 <i>(Mobilization)</i>
ANCAMAN (Threats)	STRATEGI (ST) = 2,44 + 2,06 = 4,50 <i>(Investment Divestment)</i>	STRATEGI (WT) = 1,12 + 2,06 = 3,18 <i>(Damage Control)</i>

Gambar.14. Bagan Kombinasi Strategi Kuantitatif Pengembangan Sumberdaya Perkebunan Secara Berkelanjutan Provinsi Jambi.

Dari hasil perhitungan faktor internal dan eksternal, maka dilakukan perhitungan strategi dengan hasil strategi ST memperoleh nilai tertinggi dengan angka 4,50 yang disebut juga Strategi ST (*investmnet divestment*) yakni menggunakan kekuatan sebuah organisasi untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman external. Hal ini bukan berarti bahwa suatu organisasi yang kuat harus selalu menghadapi ancaman secara langsung di dalam lingkungan external.

Setelah itu dilakukan perhitungan untuk menentukan langkah strategi yang digunakan dengan menghitung faktor internal dan eksternal untuk menentukan sumbu X dan Y, dimana Hasil selisih komponen kekuatan dan kelemahan adalah 0,661 menjadi posisi titik pada sumbu X, sedangkan selisih komponen pada peluang dan tantangan adalah - 0,092

menjadi sumbu Y, sehingga yang menandakan kondisi pengembangan sumberdaya perkebunan secara berkelanjutan berada pada Kuadran II yaitu *Strategi Diferensiasi atau* mendukung strategi difersifikasi. Apabila digambarkan dalam diagram dapat dilihat pada gambar di bawah ini;



Gambar .15. Kuadran Analisa SWOT Pengembangan Sumberdaya Perkebunan secara berkelanjutan di Provinsi Jambi

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah diversifikasi strategi, artinya organisasi/pelaku usahatani, pemerintah daerah dan provinsi selaku pendukung dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan roda usaha perkebunan akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila

hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karena itu disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya.

Strategi Strengths-Threats (ST)

Strategi ini dibuat berdasarkan strategi pengembangan Perkebunan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk menghadapi ancaman atau menimalisirnya yang dapat dilakukan dengan ;

- Memanfaatkan keunggulan geografis dengan mengusahakan komoditi basis yang resistance/daya tahan tinggi,
- Meminimalisir dampak kegagalan panen akibat perubahan iklim dengan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petani yang sudah baik menjadi lebih terampil.
- Memanfaatkan tenaga kerja atau sumberdaya manusia dari lingkungan petani untuk memasarkan hasil langsung atau melalui kemitraan di dukung kebijakan pemerintah daerah.
- Memanfaatkan lahan yang ada sebagai usahatani sekunder dalam mendukung pendapatan usahatani primer/utama.

Berdasarkan strategi baru ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan pelaku usahatani dan pemerintah selaku pemangku kebijakan makro sebagai berikut;

Pemerintah Daerah dan Provinsi adalah :

- Memfasilitasi pada tingkat pemasaran hasil komoditi perkebunan rakyat dengan membuka marketplace di daerah konsumen;
- Memfasilitasi perijinan dan sertifikasi lahan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup;
- Memberikan pelatihan pemanfaatan lahan usahatani dengan usaha lainnya yang mendukung usahatani perkebunan.
- Sosialisasi perubahan iklim dan informasi cuaca serta prakiraan iklim ke sentra produksi melalui pertemuan teknis;

- Peningkatan mutu informasi harga tingkat lokal, regional dan nasional melalui media informasi legal khusus.
- Memfasilitasi Akses Permodalan dan penyampaian skema kredit seperti KUR; kredit pola syariah maupun skim kredit lainnya kepada pelaku usahatani perkebunan.
- Memfasilitasi teknologi pasca panen, pengolahan hasil dan mengantisipasi kelebihan/over produksi.
- Perlunya alternatif penggunaan pupuk an-organik (kimia) ke pupuk organik.
- Pelatihan untuk kiat-kiat pemasaran.
- Pendirian pusat pelatihan khusus kerajinan di wilayah sentra dalam upaya pengembangan SDM di masa mendatang.

Masalah yang berkaitan dengan kepentingan rakyat dan nasional

Orientasi kebijakan perkebunan sejauh ini membedakan secara tajam antara perkebunan besar (BUMN dan swasta, termasuk PMA) dengan perkebunan rakyat. Implikasi kebijakan dualistik ini telah memberi kemudahan bagi yang “besar” dan tekanan bagi yang “kecil”, dengan gambaran sebagai berikut :

Perkebunan Indonesia masih diliputi oleh dualisme ekonomi, yaitu antara perkebunan besar yang menggunakan modal dan teknologi secara intensif dan menggunakan lahan secara ekstensif serta manajemen eksploitatif terhadap SDA dan SDM, dan perkebunan rakyat yang subsisten (pertanian swasembada) dan tradisional serta luas lahan terbatas. Kedua sistem ini menguasai bagian tertentu dari masyarakat dan keduanya hidup berdampingan. Perbedaan keduanya tidak jarang menimbulkan konflik ekonomi yang berkembang menjadi konflik sosial.

- Hak menguasai oleh negara atas tanah yang kemudian diberikan kepada badan hukum sebagai Hak Guna Usaha untuk usaha perkebunan sangat dominan, sementara itu ketidak-pastian hak masyarakat (lokal dan adat) atas sumberdaya lahan untuk perkebunan belum kunjung diselesaikan.
- Masuknya pemodal besar ke usaha perkebunan masih belum memberikan kontribusi pada kesejahteraan rakyat setempat. Hingga saat ini masih belum ada re-distribusi aset dan manfaat yang adil (proporsional) kepada masyarakat dari usaha perkebunan.
- Kebijakan pengembangan perkebunan lebih berpihak pada perkebunan besar yang ditunjukkan oleh alokasi pemanfaatan kredit, dukungan penelitian dan pengembangan, serta pelatihan sumberdaya manusia.
- Pengembangan perkebunan besar lebih dilandasi pada pembukaan lahan hutan dalam skala besar yang dilakukan dengan mengabaikan hak-hak masyarakat di dalamnya. Pada beberapa daerah kondisi

demikian ini telah menimbulkan konflik sosial serta dampak negatif terhadap lingkungan.

- Organisasi-organisasi usaha perkebunan yang menghimpun diri dalam asosiasi pengusaha perkebunan bersifat eksklusif dan powerful dengan tingkat kepedulian terhadap pemberdayaan organisasi-organisasi petani/pekebun rendah.

Masalah Lingkungan

Metode paling efisien dalam kegiatan pembukaan lahan perkebunan adalah pembakaran. Namun dampak lingkungan yang ditimbulkannya sangat merugikan. Sampai saat ini, pembakaran dalam kegiatan pembukaan lahan masih dijalankan, baik di perkebunan rakyat maupun perkebunan besar. UU tentang pengelolaan lingkungan hidup masih memberi toleransi adanya pembakaran terkendali untuk perkebunan rakyat dan pelarangan untuk perkebunan besar. Limbah padat, cair dan gas masih menjadi masalah penting di perkebunan, baik di level *on farm* maupun di pabrik. Masalah ini timbul dalam batas tertentu karena belum adanya teknologi penanganan limbah, mahalnya investasi industri pemanfaatan limbah perkebunan dan rendahnya kesadaran penanganan limbah dan lemahnya penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan limbah. Pengembangan perkebunan di kawasan bekas hutan dan perkebunan rakyat tradisional serta penerapan pola tanam monokultur menyebabkan timbulnya masalah keanekaragaman hayati. Berbagai spesies musnah karena pengembangan perkebunan.

Upaya pelestarian lingkungan tidak hanya diperlukan saat pembukaan lahan dan penata gunaan tanah. Juga selama kegiatan pembudidayaan sampai ke pengolahan hasil. Pelestarian lingkungan pada semua tahapan produksi perlu menjadi tekad masyarakat, terlebih dalam menghadapi semakin nyaringnya tuntutan pada “produksi hijau”. Selain

itu, tekad masyarakat melestarikan lingkungan dapat menjadi perisai terhadap kecaman-kecaman tentang kerusakan lingkungan perkebunan.

Permasalahan ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia tapi juga negara-negara lainnya yang berkedudukan sebagai produsen dalam sektor apapun seperti peternakan, pertanian, dan lainnya. Untuk itu, sebagaimana kami kutip dari artikel Dunia Terus Beraksi Hijau Menyambut Rio 20+ dalam laman www.hijauku.com, beberapa negara kemudian berinisiatif untuk menciptakan sebuah pola konsumsi dan produksi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masa kini tapi juga di masa yang akan datang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Peralihan pola konsumsi dan produksi yang juga dikenal dengan strategi berkelanjutan ini diwujudkan dalam banyak program dan mekanisme seperti penerapan Sistem Pengelolaan Lingkungan (Environmental Management Systems, EMS) yang sesuai dengan konsep Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Sustainable Consumption and Production), sistem Lifecycle Assessments (LCAs) dari International Organization for Standardization (ISO) dan Indikator Kinerja Organisasi dari Global Reporting Initiative (GRI) dan tentunya Ecolabelling.

Ecolabelling menuntut bahwa setiap produk dagangan harus telah didasarkan pada kelestarian sumber daya dan ekosistem dari lingkungan hidup. Dimulai dari pengambilan bahan baku, pengangkutan bahan baku ke pabrik, proses dalam pabrik, pengangkutan produk pabrik ke konsumen, pemakaian produk dan pembuangan sampahnya (bekas pakai dari produk) secara keseluruhan tidak mencemari lingkungan.

Ecolabelling kemudian diwujudkan melalui pemberian label atau sertifikasi pada produk yang proses pembuatannya telah sesuai dengan asas kelestarian lingkungan. Secara sederhana produk yang dilabeli atau telah memperoleh sertifikat ecolabel tentu memiliki permintaan yang lebih tinggi daripada produk tanpa ecolabel apalagi bagi konsumen yang berada di negara-negara maju. Pada satu sisi, sistem ecolabelling dalam perdagangan internasional memang dikhawatirkan

dapat melemahkan industri atau usaha kecil dan menengah (UKM) karena sertifikasi ecolabelling tidaklah murah mengingat ada suatu prosedur verifikasi yang cukup panjang dan rumit apabila sebuah industri ingin memperoleh ecolabelling. Namun, pada sisi lain ecolabelling harus diakui sebagai sebuah upaya pelestarian lingkungan berbasis ekonomi dengan manfaat jangka panjang. Mengacu kepada apakah akibat tidak adanya pengaturan mengenai asas ini dapat menyebabkan terhambatnya ekspor Indonesia ke negara-negara yang sudah menganut asas ini

Di Indonesia, praktik ecolabelling memang lebih terfokus pada sektor kehutanan mengingat hasil hutan adalah produk ekspor terbesar Indonesia yang memiliki irisan antara kelestarian lingkungan dan kepentingan bisnis, namun tentunya tidak mengesampingkan sektor industri lainnya seperti pertanian dimana perkebunan merupakan bagian dari sektor ini, dan sektor lainnya. Dalam mengeluarkan sertifikasi ecolabelling, LEI (Lembaga Ekolabel Indonesia sebagai organisasi non-profit berbasis konstituen yang mengembangkan sistem sertifikasi hutan yang mempromosikan misi untuk pengelolaan sumber daya hutan yang adil dan berkelanjutan di Indonesia) menggunakan standar lokal namun telah diakui secara internasional seperti Perancis, Jerman, Belanda, Belgia, dan Amerika Serikat yang merupakan negara-negara potensial pasar kayu Indonesia. Dengan adanya LEI, produsen Indonesia tidak perlu khawatir atau merasa terhambat untuk masuk ke pasar negara lain, khususnya negara-negara yang meminta sertifikat ecolabelling.

Sertifikasi RSPO Kampanye beli yang baik tentu saja tidak bisa dilakukan oleh suatu organisasi, badan atau secara sendirian. Dalam konteks minyak sawit, sebagai contoh WWF (World Wildlife Foundation) bekerja sama dengan organisasi nirlaba, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Organisasi RSPO merupakan asosiasi yang terdiri dari berbagai organisasi dari berbagai sektor industri kelapa sawit yang bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk produksi minyak sawit berkelanjutan.

Gerakan Nasional Penerapan SNI dihidupkan kembali, khususnya program sosialisasi ecolabel yang didukung oleh Pemerintah, Masyarakat, Industri dan akademisi. Gerakan ini dibutuhkan untuk mengedukasi masyarakat agar lebih mengutamakan memilih produk yang bertanda ecolabel daripada produk yang tidak memiliki tanda ecolabel; dimasukkannya produk ecolabel kedalam catalog program e-procurements Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah; keterlibatan civitas academica – khususnya jurusan teknik lingkungan - sebagai ujung tombak sosialisasi produk ecolabel ke masyarakat; serta menyiapkan materi ajar tentang ecolabel bagi Pramuka – khususnya pramuka dalam saka wanabakti yang berada dalam pembinaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang lingkungan hidup lainnya.

Eco-Labeling dalam Sektor Kopi

Saat ini, sertifikasi yang dibutuhkan cukup banyak untuk meningkatkan daya saing antara para produsen kopi. Fair Trade, Rainforest Alliance, adalah contoh sertifikat yang menjadi bukti bahwa produsen tersebut telah memenuhi kriteria yang ditetapkan berdasarkan standar nasional maupun internasional. Proses untuk mendapatkan sertifikat tersebut juga tidak mudah dan murah, produsen yang mengajukan permohonan sertifikasi harus membuat laporan detail tentang kondisi alam perkebunan, proses pengolahan, manajemen limbah, dan lain-lain yang kemudian akan ditinjau langsung oleh tim assesor. Jenis sertifikasi inilah yang disebut sebagai eco labelling.

Pemenuhan standar dari eco labelling dibuat untuk menyeimbangkan usaha pelestarian lingkungan sekaligus perdagangan. Menurut Pierrot, eco labelling adalah salah satu sertifikasi yang penting untuk meningkatkan kompetitivitas kopi Indonesia, apalagi sejak meningkatnya jumlah konsumen kopi dan meningkat pula kesadaran akan dampak dari kebiasaan tersebut terhadap sesama manusia dan lingkungan, maka

dibutuhkan program sertifikasi dalam sektor kopi yang dapat menjamin praktik yang tepat baik produksi maupun pemasaran. Konsumen juga ingin agar kopi yang dikonsumsi lebih sehat dan ramah lingkungan. Dengan adanya sertifikat ini, masalah dalam sistem pertanian juga akan berkurang, seperti meningkatkan hasil panen dengan pembukaan lahan baru perkebunan hingga terjadi deforestasi, pencemaran air, dan degradasi tanah akibat penggunaan bahan kimia yang berlebihan.

Meskipun pada praktiknya cukup sulit, karena belum tentu para petani dapat serta-merta menerima kerjasama untuk mengajukan sertifikasi tersebut. Biayanya yang mahal dan perlu waktu yang cukup lama untuk mendapat persetujuan. Belum lagi harus mengikuti standar yang ditetapkan termasuk kualitas kopi yang harus dipenuhi. Harga yang ditentukan memang lebih tinggi untuk kopi dengan kualitas tinggi, berbanding lurus dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan.

Eco-Labeling dalam Sektor Kelapa Sawit

Sebagaimana diketahui, sebagian besar produk minyak kelapa sawit di ekspor. Oleh beberapa negara maju (khususnya Eropa), pada beberapa waktu yang lalu melakukan penolakan minyak CPO Indonesia yang dalam memproduksi minyaknya dituduh melanggar / merusak lingkungan dan hutan tropis. Dalam kelapa sawit, oleh karena itu, sebagai konsekuensi hukum pasar, suka atau tidak suka sebagai produsen CPO harus mengikuti selera konsumen dan pasar. Untuk itu, pemerintah Indonesia membuat kebijakan mengenai pembangunan perkebunan dan kelangsungan industri kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan. Pemerintah mengharuskan adanya jaminan (sertifikat) bahwa perkebunan dan pabrik kelapa sawit dibangun dan dikelola berdasarkan asas berkelanjutan (*sustainable*).

Sistem manajemen sertifikasi pada perkebunan kelapa sawit dapat berupa: ISPO Certification, RSPO Certification didukung ISCC certification, ISO Certification dan SMK3 Certification. Sertifikasi minyak

sawit yang baru adalah *Indonesia Palm Oil Pledge* (IPOP). IPOP merupakan komitmen perusahaan penandatanganan untuk menjalankan usaha kelapa sawit secara berkelanjutan dengan menerapkan praktik bisnis tanpa deforestasi, memberdayakan petani kecil dan meningkatkan citra minyak kelapa sawit asal Indonesia sebagai produk berkelanjutan.

Pada beberapa komoditi perkebunan seperti kelapa sawit dikenal RSPO adalah sertifikat label lingkungan internasional untuk minyak sawit, *Roundtable on Sustainable Palm Oil*. Berbeda dengan ISPO, RSPO bersifat sukarela (voluntary) yang tidak wajib diikuti perkebunan dan petani sawit Indonesia. Namun label RSPO menjadi acuan bagi ekspor-impor sawit dunia (permintaan sawit dunia).

Dalam Tulisan Dr.Ir.Hamzah Lubis, SH.,M.Si berjudul: “Ekolabeling Minyak (Perkebunan) Kelapa Sawit”, telah dimuat pada SK.Perestasi Reformasi di Medan, No.477, tanggal 19 Nopember 2015, hal. 7, kol.1-4.

OPINI & IPTEK

Ekolabeling Minyak (Perkebunan) Kelapa Sawit



Dr. Hamzah Lalis, SH, MSi
Dosen, Pembina SMP IT NU (Fud Day)
Jl. Paksi I No. 37 Bantan Timur, Medan

Ekolabeling
Konsumen dunia semakin menyadari pentingnya mengkonsumsi produk yang bukan saja berkualitas yang tinggi, dengan harga yang ekonomis tetapi juga dihasilkan dari serangkaian kegiatan yang mengadopsi sistem pembangunan berkelanjutan.

Demikian juga konsumen dalam negeri, dalam 5-10 tahun mendatang, akan mengarah pada tuntutan produk ramah lingkungan. Industri yang tidak memenuhi permintaan gaya hidup ini akan kesulitan bersaing.

Berangkat dari kondisi ini, pemerintah meluncurkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel. KLH menyatakan, produk yangemasannya terdapat logo ekolabel telah melalui proses produksi yang memenuhi aspek lingkungan hidup mulai dari perolehan bahan baku, proses produksi, distribusi, penggunaan dan pembuangan sisa produk.

Terdapat dua logo ekolabel yang diterbitkan dua lembaga yang berbeda. Logo ekolabel Indonesia yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi Ekolabel (LSE) dan logo Ekolabel Swadepok yang diterbitkan Lembaga Verifikasi Ekolabel (LVE). LSE diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional sedangkan LVE diregistrasi Kementerian Lingkungan Hidup.

Keikutsertaan perusahaan dalam program produk berlabel lingkungan ini ada yang bersifat sukarela dan bersifat wajib. Pro-

gram sertifikasi yang wajib misalnya sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* oleh Kementerian Pertanian dan sertifikasi Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) oleh Kementerian Kehutanan.

Ekolabel Minyak Sawit
Sebagaimana diketahui, sebagian besar produk minyak kelapa sawit di ekspor. Oleh beberapa negara maju (khususnya Eropa), pada beberapa waktu yang lalu melakukan penolakan minyak CPO Indonesia yang dalam memproduksi minyaknya dituduh melanggar / merusak lingkungan dan hutan tropis. Menurut mereka, pembangunan kelapa sawit Indonesia diantaranya mengakibatkan: (a) meningkatnya deforestasi dan degradasi lahan gambut, (b) menurunnya konservasi dan biodiversitas, (c) meningkatnya emisi karbon dan efek gas rumah kaca, (d) masalah keberlanjutan dan daya saing, (e) penyebab bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, (7) hilangnya budaya masyarakat disekitar hutan dan (8) lingkungan rusak akibat pemanfaatan lahan gambut yang tidak terkendali.

Oleh karena itu, sebagai konsekuensi bukan pasar, suka atau tidak suka sebagai produsen CPO harus mengikuti selera konsumen dan pasar. Untuk itu, pemerintah Indonesia membuat kebijakan mengenai pembangunan perkebunan dan kelangsungan industri kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan. Pemerintah mengharuskan adanya jaminan (sertifikat) bahwa perkebunan dan pabrik kelapa sawit dibangun dan dikelola berdasarkan asas berkelanjutan (sustainable).

Sistem manajemen sertifikasi pada perkebunan kelapa sawit dapat berupa: ISPO Certification, RSPO Certification didukung ISCC certification, ISO Certification dan SMK3 Certification. Sertifikasi minyak sawit yang baru adalah *Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP)*. IPOP merupakan komitmen perusahaan penandatangan untuk menjalankan usaha kelapa sawit secara berkelanjutan dengan menerapkan praktik bisnis tanpa deforestasi, memberdayakan petani kecil dan meningkatkan citra minyak kelapa sawit asal Indonesia sebagai produk berkelanjutan.

Sertifikat ISPO
ISPO adalah sertifikat label lingkungan minyak sawit Indonesia, *Indonesian Sustainable Palm Oil*. ISPO bersifat mandatory (ke-wajiban) yang harus dijalankan oleh perusahaan perkebunan dan petani sawit di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Standar Minyak Sawit Berkelanjutan. ISPO mengatur ketentuan bidang perkebunan sawit di Indonesia sebagai negara produsen. ISPO ini bertujuan untuk: (a) meningkatkan kesadaran pengusaha kelapa sawit Indonesia untuk memperbaiki lingkungan, (b) meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di luar negeri dan (3) mendukung program pengurangan gas rumah kaca, juga yang menjadi persyaratan utama negara pembeli bagi *palm oil biodiesel*.

Sertifikasi ISPO diperlukan untuk memastikan perusahaan dan usaha perkebunan kelapa sawit menerapkan prinsip dan kriteria ISPO secara benar dan konsisten dalam menghasilkan minyak sawit yang berkelanjutan. ISPO wajib bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan usaha terintegrasi antara kebun dan pengolahan, usaha budidaya kelapa sawit dan usaha pengolahan hasil kelapa sawit. Sedangkan untuk untuk perkebunan sawit plasma, swadaya, dan perusahaan yang memproduksi kelapa sawit untuk energy terbarukan atau biodiesel bersifat sukarela.

Kendati bersifat wajib, realisasi sertifikasi ISPO lambat. Dari 757 perusahaan dan usaha perkebunan kelapa sawit dan pengolahan yang wajib mendapatkan sertifikat ISPO, baru 97 perusahaan yang sudah mengantongi sertifikat ISPO, 562 perusahaan baru mengajukan permohonan sertifikasi dan 98 perusahaan lainnya yang belum mengajukan permohonan sertifikasi sama sekali.

Sertifikat RSPO
RSPO adalah sertifikat label lingkungan internasional untuk minyak sawit, *Roundtable on Sustainable Palm Oil*. Berbeda dengan ISPO, RSPO bersifat sukarela (voluntary) yang tidak wajib diikuti perkebunan dan petani sawit Indonesia. Namun label RSPO menjadi acuan bagi ekspor-impor saw-

it dunia (permintaan sawit dunia). Menurut Direktur RSPO-Indonesia, Desi Kusuma Dewi, pada tahun 2015 beberapa negara Eropa, seperti Belgia, Belanda, Perancis dan Swedia akan membeli 100 persen minyak sawit berkelanjutan berlabel RSPO. Pada tahun 2018 negara Denmark dan Norwegia akan member minyak sawit sertifikat RSPO.

Pada tahun 2020 seluruh negara Eropa diharapkan sudah mengadopsi penggunaan minyak sawit bersertifikat RSPO, termasuk diantaranya negara Belanda.

Data RSPO menunjukkan produksi CPO bersertifikat RSPO terus meningkat tiap tahun. Pada tahun pertama sertifikasi RSPO dimulai (2008) produk CPO bersertifikat RSPO baru 163.364 ton. Pada tahun 2010 naik menjadi 2,77 juta ton, pada tahun 2013 sebesar 8,75 juta ton dan tahun 2014 sebesar 11 juta ton. Hingga bulan Mei 2015 CPO bersertifikat RSPO sudah mencapai 4,09 juta ton.

Penutup
Terdapat tujuh prinsip pengembangan kelapa sawit berkelanjutan sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat ISPO. Prinsip tersebut meliputi: (1). sistem perijinan dan manajemen perkebunan, (2). penerapan pedoman teknis budidaya dan pengelolaan kelapa sawit, (3). pengelolaan dan pemantauan lingkungan, (4). tanggung jawab pada pekerja, (5). tanggung jawab perusahaan pada individu dan komunitas, (6). pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat, dan (7). komitmen terhadap perbaikan ekonomi terus menerus. ISPO juga terdiri dari 40 kriteria dan 128 indikator dan semua indikator bernilai sama (ISPO, hal.3).

Prinsip 3, Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa: (1) melaksanakan AMDAL, UKL dan UPL, (2) pencegahan kebakaran, pelestarian biodiversitas, (3) lingkungan suaka alam (nilai konservasi tinggi), (4) mengusahakan pengurangan emisi gas rumah kaca dengan menghindari penyebabnya dan (5) konservasi kawasan yang potensial akan bererosi tinggi dan kawasan pinggir sungai. Bila kewajiban perkebunan ini dilaksanakan, tentu tidak akan terjadi kebakaran dan bencana asap yang memelas belasan jiwa. I akan...

Terdapat tujuh prinsip pengembangan kelapa sawit berkelanjutan sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat ISPO;

- 1). Sistem perijinan dan manajemen perkebunan
- 2). Penerapan pedoman teknis budidaya dan pengelolaan kelapa sawit.
- 3). Pengelolaan dan pemantauan lingkungan

- 4). Tanggung Jawab pada pekerja,
- 5). Tanggung Jawab perusahaan pada individu dan komunitas
- 6). Pemberdayaan kegiatan ekonomi masyarakat.
- 7). Komitmen terhadap perbaikan ekonomi terus menerus.

Pemanfaatan hasil perkebunan perlu dirancang dalam suatu skema untuk pengelolaan terutama guna mewujudkan yuridiksi sertifikasi atas areal komoditas sehingga mengarah pada fakta/verifikasi sourcing area kejelasan rantai pasok bagi komoditi perkebunan seperti produk sawit dan karet. Sehingga mampu menyatakan bahwa keluaran turunan produk perkebunan tidak memiliki permasalahan dalam konteks lingkungan atau deforestasi.

Mengimplementasikan inovasi pembangunan di daerah dengan program pembangunan jalan aspal bercampur karet dapat merupakan suatu kegiatan yang mengarahkan kepada mendorongnya turunan hasil produk turunan karet sebagai komoditas andalan daerah.

Mengatur suatu regulasi dengan membuat aturan bea keluar untuk ekspor bahan mentah lebih mahal dibandingkan ekspor barang jadi, ini perlu dukungan kepada pengusaha dan ini diharapkan dapat menekan jumlah ekspor *raw material*, sehingga mendukung dunia usaha membangun industri hilir di daerah guna meningkatkan pendapatan dan nilai tambah produk komoditi perkebunan yang bisa dilakukan mulai dari skala mikro atau industri rumah tangga.

Apabila komoditas pertanian di olah lebih lanjut menjadi produk olahan (produk hilir) kemudian diekspor, maka kondisi tersebut akan meningkatkan nilai tambah ekspor Indonesia umumnya dan Provinsi Jambi khususnya akan jauh lebih tinggi. Dengan demikian, pasar domestik tersebut berfungsi sebagai alternatif *engine of growth* ketika pasar ekspor sedang mengalami kelesuan akibat dari perlambatan ekonomi global.

Manfaat selanjutnya dari mengembangkan industri hilir yang kuat di sektor pertanian adalah meningkatkan daya saing industri pertanian kita di tingkat regional Asean dan global.

Dengan sumber daya alam yang berlimpah sebagai sumber bahan baku maka seharusnya industri berbasis agro di Provinsi Jambi mempunyai *competitive advantage* dalam hal biaya produksi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengembangan sumberdaya perkebunan secara berkelanjutan Provinsi Jambi dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

Sektor Pertanian (A) memberikan 47,35 persen porsi pada sektor Lapangan Kerja Utama Provinsi Jambi Tahun 2018 dimana Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan penyokong terbesar PDRB Provinsi Jambi pada Tahun 2014-2018 sebesar 26,44 persen. Dengan jumlah RTUP 54,33 persen.

Terdapat Lima (5) komoditi dengan jumlah Petani terbanyak adalah komoditi kelapa sawit sebesar 51,50 persen, Kelapa Dalam, 21,44 persen dan Pinang 6,62 persen, Karet 6,17 persen dan Kopi Robusta 5,68 persen.

Dalam pengembangan Sumberdaya Perkebunan secara berkelanjutan terdapat beberapa antara lain; Masalah yang berkaitan dengan kepentingan rakyat dan Nasional ; Masalah Lingkungan

Perlu dilakukan peningkatan kegiatan industri terpadu dan industri inovatif produk perkebunan, yang perlu didukung Pemerintah dalam sisi pendanaan dan sistem birokrasi serta regulasi yang memadai.

Peralihan pola konsumsi dan produksi yang juga dikenal dengan strategi berkelanjutan ini diwujudkan dalam banyak program dan mekanisme seperti penerapan Sistem Pengelolaan Lingkungan (Environmental Management Systems, EMS) yang sesuai dengan konsep Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Sustainable Consumption and Production), sistem Lifecycle Assessments (LCAs) dari International

Organization for Standardization (ISO) dan Indikator Kinerja Organisasi dari Global Reporting Initiative (GRI) dan tentunya Ecolabelling.

Pada dasarnya semua pihak baik regulator maupun pelaku usaha serta gabungan pelaku agribisnis perkebunan sangat mendukung program hilirisasi. Untuk mendukung program hilirisasi produk perkebunan sangat membutuhkan industri terpadu seperti halnya kawasan industri terpadu.

Bea Keluar (BK) perlu diterapkan secara efektif untuk membendung ekspor bahan baku produk turunan perkebunan sehingga diharapkan produk perkebunan tersebut dapat diproduksi lebih lanjut sehingga nilai tambah akan meningkat. Sehingga bea keluar dapat diteruskan.

Hasil Analisa SWOT Pengembangan Sumber Daya Perkebunan Secara Berkelanjutan Provinsi Jambi menggunakan Strategi Strengths-Threats (ST), dengan nilai 4,50 dan berada pada strategi kuadran II atau Diferensiasi.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan analisis strategi maka beberapa hal yang disarankan dalam analisis ini; perlunya difersifikasi komoditi pada sentra pusat agribisnis perkebunan, peningkatan mutu produk menjadi olahan / industri, meningkatkan fasilitas dukungan modal, peningkatan kemampuan dan kapasitas pelaku usaha agribisnis dan aparaturnya pemerintah yang mengakomodir.

Hendaknya Bea Keluar tidak dijadikan instrumen penerimaan daerah/negara tetapi hanya sebagai kebijakan temporer. Provinsi Jambi perlu meminta pertimbangan ke pusat agar penerimaan Bea Keluar tersebut dapat disalurkan kembali ke daerah melalui mekanisme perimbangan keuangan atau seperti halnya mekanisme Pajak Bumi dan Bangunan yang dishare ke daerah provinsi maupun daerah tingkat dua

Sedangkan untuk saran analisis selanjutnya diharapkan dapat dilakukan studi kemampuan dan potensi usaha industry pengolahan hasil produk perkebunan berwawasan lingkungan.

Daftar Pustaka

- Anonim, 2015. Provinsi Jambi Dalam Angka 2015., No.ISSN : 0215.2029. No. Publikasi: 15560.1525. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Jambi.
- ,2016. Provinsi Jambi Dalam Angka 2016., No.ISSN : 0215.2029. No. Publikasi: 15560.13.15. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Jambi.
- ,2018. Provinsi Jambi Dalam Angka 2017., No.ISSN : 0215.2029. No. Publikasi: 15560.1702. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Jambi.
- ,2018. Statistik Kesejahteraan Rakyat 2018, No.ISSN : 2502-7492. No. Publikasi: 04210.1814. Badan Pusat Statistik Indonesia. Jakarta.
- ,2018. Analisis Situasi Ketenagakerjaan Provinsi Jambi 2018, No.ISBN : 978-602-0784-30-4. No. Publikasi: 15520.1907. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Jambi.
- ,2019. Provinsi Jambi Dalam Angka 2019., No.ISSN : 0215.2029. No. Publikasi: 15560.1702. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Jambi.
- ,2019. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi 2014-2018, No. Publikasi: 15550.1803. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. Jambi.

- Hendayana,Rachmat.2003.Aplikasi Metode Location Quotient (LQ) Dalam Penentuan Komoditas Unggulan Nasional. Informatika Pertanian. Volume 12(Desember 2013)
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Mamadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Cetakan I. PT. Pustaka CIDESINDO. Jakarta.
- Marimin. 2004. "Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria majemuk" Grassindo Jakarta.
- Maryani,Anis Tatik 2009. *Sistem Perkebunan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan. Pidato Pengukuhan Guru besar. Universitas Riau. Riau.*
- Nugroho, S. 2004. Model Ekonomi Basis Untuk Perencanaan pembangunan Daerah. Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP), 1(Nomor 1), 23-30.
- Rangkuti Freddy. 2001. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis.Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Saragih,Jef Rudiantho, 2015.Perencanaan Wilayah dan Pengembangan Ekonomi.Lokal Berbasis Pertanian.Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Saaty, T.L (19966), "Decision Making with Dependence and Feedback: The Analitic Network Process", RWS Publication, Pittsburgh.
- Zulkarnain. (2009). Dasar-dasar Hortikultura. Jakarta: Bumi Aksara.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018

Sektor PDRB	PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31.039.114,40	32.655.785,99	34.746.843,06	36.478.481,60	38.299.633,61
B, Pertambangan dan Penggalian	30.619.544,95	30.613.859,37	30.736.539,24	31.621.348,35	33.248.788,83
C, Industri Pengolahan	13.514.801,12	14.042.838,37	14.453.689,06	14.953.560,24	15.511.313,33
D, Pengadaan Listrik dan Gas	59.595,68	63.912,35	67.531,56	69.608,18	73.480,04
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	161.668,74	168.649,86	176.657,36	182.719,15	191.373,81
F, Konstruksi	8.416.870,92	8.877.041,96	9.393.389,54	10.079.365,52	10.749.473,11
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.679.977,15	11.753.995,08	12.671.036,15	13.429.744,14	14.344.332,22
H, Transportasi dan Pergudangan	3.669.139,18	3.899.377,40	4.268.211,33	4.548.695,44	4.789.909,69
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.217.557,23	1.293.521,93	1.393.304,71	1.506.028,72	1.616.809,02
J, Informasi dan Komunikasi	3.834.278,89	4.184.454,96	4.540.489,39	4.885.187,43	5.244.632,30
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	2.745.385,45	2.817.593,03	3.028.832,08	3.143.837,88	3.200.018,13
L, Real Estate	1.746.198,97	1.802.683,21	1.887.050,81	1.981.694,67	2.092.460,34
M,N, Jasa Perusahaan	1.239.785,22	1.306.062,76	1.392.796,66	1.476.376,22	1.556.165,49
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.138.788,86	4.420.715,29	4.617.546,44	4.770.832,94	5.001.349,33
P, Jasa Pendidikan	3.798.947,86	4.035.999,34	4.297.529,81	4.511.198,30	4.761.061,58
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.254.759,55	1.384.455,57	1.488.305,83	1.579.138,55	1.674.841,68
R,S,T,U, Jasa lainnya	1.163.724,33	1.247.159,99	1.326.280,63	1.397.024,95	1.472.773,44
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	119.300.138,50	124.568.106,46	130.486.033,66	136.614.842,28	143.828.415,95

Lampiran 2. PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 Kabupaten Kerinci

Sektor PDRB	PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.515.928,62	2.630.102,86	2.804.205,15	2.965.561,11	3.120.140,06
B, Pertambangan dan Penggalian	69.523,79	76.404,67	82.318,10	86.302,82	90.154,00
C, Industri Pengolahan	156.985,18	165.867,71	169.067,64	173.095,76	177.271,54
D, Pengadaan Listrik dan Gas	1.999,40	2.075,76	2.159,98	2.241,09	2.371,60
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19.033,77	20.142,96	20.960,67	21.824,02	22.648,19
F, Konstruksi	331.764,09	346.949,83	365.668,88	385.652,46	399.741,48
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	457.961,72	496.979,46	539.567,57	574.951,05	594.796,27
H, Transportasi dan Pergudangan	122.994,82	134.174,14	143.122,42	153.253,92	162.727,10
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	42.896,89	44.780,97	48.615,82	51.315,58	56.646,07
J, Informasi dan Komunikasi	290.419,23	338.100,83	370.475,53	408.171,95	431.719,06
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	53.268,86	55.440,12	59.445,93	63.501,96	67.788,96
L, Real Estate	91.293,49	95.615,97	99.619,43	102.752,22	107.560,11
M,N, Jasa Perusahaan	2.140,42	2.225,74	2.366,45	2.512,46	2.635,33
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	289.715,17	313.138,99	329.405,61	348.639,89	370.379,82
P, Jasa Pendidikan	210.080,27	227.923,30	243.476,39	260.221,33	277.895,57
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	77.906,02	85.232,15	91.296,90	97.885,30	102.921,72
R,S,T,U, Jasa lainnya	77.472,67	84.844,90	92.275,18	99.302,32	105.482,65
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.811.384,41	5.120.000,36	5.464.047,65	5.797.185,24	6.092.879,53

Lampiran 3. PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 Kabupaten Merangin

Sektor PDRB	PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.785.110,08	3.956.694,83	4.189.801,41	4.390.179,65	4.618.450,00
B, Pertambangan dan Penggalian	175.521,27	186.698,34	195.004,34	204.127,48	210.105,78
C, Industri Pengolahan	589.810,83	622.827,22	660.311,92	695.164,06	732.504,19
D, Pengadaan Listrik dan Gas	4.388,92	4.625,37	4.866,08	5.231,16	5.519,02
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.010,42	14.807,42	15.601,09	16.250,10	16.906,85
F, Konstruksi	545.569,03	582.436,93	615.356,16	648.630,44	679.639,72
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	778.891,43	838.942,82	908.702,38	986.259,51	1.059.125,65
H, Transportasi dan Pergudangan	142.357,96	154.865,76	162.483,21	173.166,94	182.241,04
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	142.187,03	154.651,27	168.443,59	183.254,00	194.165,24
J, Informasi dan Komunikasi	313.705,36	338.902,63	368.039,06	400.048,46	423.942,75
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	121.082,06	124.970,11	131.551,25	137.922,10	140.635,22
L, Real Estate	181.339,96	184.787,85	189.567,78	195.730,79	203.271,34
M,N, Jasa Perusahaan	10.775,46	11.113,84	11.737,81	12.434,04	13.096,95
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	281.351,69	297.555,00	314.967,13	325.230,39	335.600,42
P, Jasa Pendidikan	289.826,19	297.172,44	314.843,42	320.971,45	327.694,63
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	102.045,98	106.954,31	115.004,73	120.585,56	127.619,03
R,S,T,U, Jasa lainnya	105.475,41	114.834,71	123.403,45	133.209,31	140.325,81
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7.583.449,08	7.992.840,85	8.489.684,81	8.948.395,44	9.410.843,64

Lampiran 4. PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 Kabupaten Sarolangun

Sektor PDRB	PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.401.128,00	2.479.149,00	2.610.427,00	2.720.017,98	2.791.124,35
B, Pertambangan dan Penggalian	2.561.216,00	2.560.074,00	2.594.278,00	2.727.151,62	2.870.653,95
C, Industri Pengolahan	361.716,80	371.177,80	383.370,80	396.873,43	415.409,16
D, Pengadaan Listrik dan Gas	2.157,30	2.409,70	2.627,20	2.798,30	2.990,46
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.954,30	11.593,80	12.073,50	12.477,13	13.157,72
F, Konstruksi	1.122.271,00	1.198.030,00	1.257.932,00	1.320.828,34	1.379.577,16
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	475.071,50	508.588,80	535.918,20	560.714,15	597.560,32
H, Transportasi dan Pergudangan	156.403,30	168.150,60	181.338,20	191.405,07	201.422,58
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	155.965,60	166.662,10	178.895,20	192.879,96	205.929,10
J, Informasi dan Komunikasi	285.002,00	305.277,90	329.541,80	347.018,91	368.583,31
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	209.252,10	221.098,60	231.650,50	241.032,07	241.801,49
L, Real Estate	113.098,70	117.235,10	121.096,90	125.851,75	131.260,50
M,N, Jasa Perusahaan	19.593,60	20.920,30	22.166,40	23.374,70	24.752,84
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	315.213,70	338.895,10	359.839,90	370.831,90	392.390,52
P, Jasa Pendidikan	258.217,30	269.442,20	280.914,30	291.960,00	305.466,00
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	102.323,30	114.731,90	124.868,50	133.112,00	141.978,17
R,S,T,U, Jasa lainnya	125.602,50	133.239,70	142.401,60	150.521,70	160.297,51
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8.675.187,00	8.986.676,60	9.369.340,00	9.808.849,01	10.244.355,14

Lampiran 5. PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 Kabupaten Batang Hari

Sektor PDRB	PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.152.321,00	5.468.644,00	4.063.283,00	4.160.898,70	4.385.819,03
B, Pertambangan dan Penggalian	1.754.332,00	1.753.058,00	1.408.526,00	1.598.323,74	1.682.886,07
C, Industri Pengolahan	2.151.275,00	2.279.958,00	1.252.725,00	1.288.518,93	1.321.324,24
D, Pengadaan Listrik dan Gas	4.350,10	4.596,10	5.027,90	5.341,79	5.667,85
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.105,80	12.598,00	8.242,30	8.961,84	9.791,70
F, Konstruksi	661.703,80	703.457,30	689.089,10	720.235,96	755.311,45
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	588.896,90	633.825,60	767.737,20	807.574,20	865.568,05
H, Transportasi dan Pergudangan	444.302,70	470.003,30	153.281,00	160.838,12	169.073,93
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	76.825,20	81.525,70	37.671,60	40.784,13	44.231,77
J, Informasi dan Komunikasi	289.184,30	311.300,30	281.989,50	302.631,09	325.388,95
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	219.746,20	227.305,60	185.972,50	190.407,28	194.973,41
L, Real Estate	154.905,50	159.352,50	121.720,00	126.747,03	132.666,11
M,N, Jasa Perusahaan	151.454,80	158.482,20	7.652,30	7.985,20	8.336,52
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	399.442,90	424.847,50	418.989,60	433.570,50	448.832,17
P, Jasa Pendidikan	226.530,70	236.585,30	477.801,50	501.978,20	528.231,71
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	118.945,30	129.617,20	141.452,30	149.104,80	157.335,42
R,S,T,U, Jasa lainnya	171.931,70	182.854,90	114.983,10	120.456,30	126.346,65
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	12.578.253,90	13.238.011,50	10.136.143,90	10.624.357,81	11.161.785,03

Lampiran 6. PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 Kabupaten Muaro Jambi

Sektor PDRB	PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.727.547,00	3.888.211,00	5.821.206,00	6.123.009,10	6.412.911,42
B, Pertambangan dan Penggalian	1.366.075,00	1.365.136,00	1.796.615,00	1.865.322,30	1.979.827,39
C, Industri Pengolahan	1.191.577,00	1.225.428,00	2.379.599,00	2.483.137,20	2.595.725,79
D, Pengadaan Listrik dan Gas	4.159,50	4.566,20	4.917,90	5.022,80	5.340,50
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.517,60	7.923,00	13.240,50	13.743,60	14.367,03
F, Konstruksi	615.499,30	653.598,70	748.126,80	804.984,50	852.235,24
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	659.724,60	713.421,90	679.818,00	726.237,70	793.943,37
H, Transportasi dan Pergudangan	135.974,80	144.325,20	491.236,60	511.639,10	537.232,40
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	31.151,10	34.248,20	86.737,00	92.364,90	99.744,02
J, Informasi dan Komunikasi	242.531,10	263.221,80	333.110,50	359.093,10	387.748,73
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	177.780,20	181.797,60	241.954,00	252.244,60	262.576,92
L, Real Estate	114.300,30	117.922,90	168.116,80	177.380,10	188.377,65
M,N, Jasa Perusahaan	6.813,90	7.241,70	167.515,70	177.097,60	187.333,87
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	374.082,50	397.221,90	439.844,60	455.371,10	477.957,49
P, Jasa Pendidikan	420.834,50	449.188,20	249.881,40	261.550,90	282.151,54
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	120.254,60	132.359,20	139.714,40	148.502,40	157.858,09
R,S,T,U, Jasa lainnya	102.743,60	109.476,50	194.557,60	205.452,80	217.060,93
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	9.298.566,60	9.695.288,00	13.956.191,80	14.662.153,80	15.452.392,38

Lampiran 7. PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Sektor PDRB	PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.105.145,00	2.223.539,00	2.422.290,00	2.579.091,90	2.680.230,74
B, Pertambangan dan Penggalian	9.779.150,00	9.727.727,00	9.697.712,00	9.782.481,10	9.931.887,86
C, Industri Pengolahan	1.102.189,00	1.131.728,00	1.143.939,00	1.165.983,20	1.220.712,68
D, Pengadaan Listrik dan Gas	1.733,83	1.902,62	1.999,20	2.040,12	2.135,58
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.027,43	8.391,09	8.820,20	9.053,43	9.708,56
F, Konstruksi	568.441,70	583.538,40	621.701,30	704.541,96	748.362,92
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	648.148,60	733.138,40	825.578,60	889.981,58	950.181,68
H, Transportasi dan Pergudangan	142.367,40	147.517,80	158.937,00	171.741,63	183.351,53
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	39.723,29	43.524,79	47.996,40	53.056,07	57.358,00
J, Informasi dan Komunikasi	161.790,90	171.585,40	188.596,40	203.107,57	222.331,41
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	99.804,83	103.027,50	112.248,90	118.305,97	121.800,25
L, Real Estate	68.081,12	70.922,19	76.759,10	83.516,95	90.601,55
M,N, Jasa Perusahaan	140.343,20	149.923,30	161.422,50	170.013,09	178.372,36
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	225.000,50	246.118,60	259.502,10	271.314,89	285.337,96
P, Jasa Pendidikan	367.302,30	385.744,00	418.888,70	444.146,02	468.380,18
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	55.538,40	62.995,55	69.145,30	73.343,90	76.920,80
R,S,T,U, Jasa lainnya	36.708,85	39.198,19	42.266,10	44.544,34	47.513,70
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	15.549.496,35	15.830.521,83	16.257.802,80	16.766.263,72	17.275.187,76

Lampiran 8. PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sektor PDRB	PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.129.428,00	5.431.858,00	5.813.310,00	6.147.253,90	6.501.241,91
B, Pertambangan dan Penggalian	10.629.211,00	10.826.626,00	10.857.360,00	11.179.157,00	12.288.014,47
C, Industri Pengolahan	4.898.786,00	5.027.002,00	5.096.433,00	5.253.027,70	5.404.123,19
D, Pengadaan Listrik dan Gas	3.025,76	3.296,04	3.617,20	3.765,66	3.939,85
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.087,87	13.545,94	14.223,20	14.789,47	15.404,71
F, Konstruksi	920.823,00	982.186,40	1.079.529,00	1.196.434,20	1.339.527,77
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	699.253,60	762.614,30	823.616,40	869.802,45	922.462,95
H, Transportasi dan Pergudangan	172.913,70	188.043,00	200.140,00	214.064,57	223.401,67
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	95.262,54	98.599,78	105.694,00	113.889,32	122.707,35
J, Informasi dan Komunikasi	358.868,90	388.528,00	420.377,60	453.938,81	490.617,06
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	248.550,10	256.601,90	273.963,50	285.970,27	289.826,03
L, Real Estate	146.185,50	153.567,70	162.951,50	173.123,55	184.116,89
M,N, Jasa Perusahaan	259.829,80	270.043,40	285.703,20	299.725,76	315.131,67
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	337.910,20	368.560,90	391.681,00	407.170,55	425.330,35
P, Jasa Pendidikan	412.937,00	426.918,90	451.735,80	472.728,65	495.183,26
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	96.974,52	110.246,40	118.416,60	125.441,56	132.930,42
R,S,T,U, Jasa lainnya	128.641,40	137.882,30	146.446,30	151.504,44	157.428,26
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	24.551.688,89	25.446.120,96	26.245.198,30	27.361.787,86	29.311.387,81

Lampiran 9. PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 Kabupaten Tebo

Sektor PDRB	PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.971.464,00	4.183.180,00	4.451.812,00	4.718.018,40	4.966.237,60
B, Pertambangan dan Penggalian	842.225,20	851.752,60	850.896,90	893.637,30	914.379,80
C, Industri Pengolahan	517.524,70	538.994,10	565.000,80	586.165,40	615.798,00
D, Pengadaan Listrik dan Gas	5.254,36	5.715,10	5.795,40	5.884,50	6.045,70
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.301,85	3.486,76	3.703,30	3.869,90	4.107,50
F, Konstruksi	554.210,80	601.872,90	628.444,20	668.475,30	711.602,50
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	625.674,10	670.416,50	718.804,80	769.263,80	818.957,90
H, Transportasi dan Pergudangan	111.058,40	118.012,80	125.781,40	134.978,60	144.297,20
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	26.451,71	29.006,09	31.553,60	34.478,70	37.343,60
J, Informasi dan Komunikasi	274.028,70	296.115,50	320.402,00	345.122,50	368.758,60
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	118.056,30	120.826,30	125.113,90	128.534,50	127.550,40
L, Real Estate	153.710,90	158.475,90	165.004,70	171.637,50	179.189,20
M,N, Jasa Perusahaan	5.075,64	5.229,18	5.353,70	5.491,10	5.643,50
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	269.471,50	283.801,50	295.105,20	299.811,20	308.910,30
P, Jasa Pendidikan	181.523,50	191.637,60	197.867,90	206.287,10	216.613,50
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69.544,65	76.260,50	81.842,80	86.500,80	91.467,90
R,S,T,U, Jasa lainnya	152.803,50	163.484,80	171.857,70	178.839,30	187.114,20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7.881.379,81	8.298.268,13	8.744.340,30	9.236.995,90	9.704.017,40

Lampiran 10. PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 Kabupaten Bungo

Sektor PDRB	PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.859.246,00	1.995.057,00	2.151.591,00	2.258.196,50	2.388.104,01
B, Pertambangan dan Penggalian	2.646.245,00	2.639.459,00	2.642.220,00	2.830.837,60	2.810.799,82
C, Industri Pengolahan	653.496,80	690.742,40	729.546,90	757.684,50	791.516,02
D, Pengadaan Listrik dan Gas	4.000,10	4.306,00	4.375,80	4.577,50	4.832,04
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20.557,40	21.478,60	22.597,60	23.205,50	24.223,89
F, Konstruksi	1.138.037,00	1.212.231,00	1.291.394,00	1.376.496,60	1.497.840,50
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.124.462,00	1.226.283,00	1.315.141,00	1.377.796,00	1.471.861,04
H, Transportasi dan Pergudangan	224.578,10	242.437,80	262.933,10	282.516,50	302.897,26
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	231.495,60	247.497,90	263.457,30	280.948,10	300.905,64
J, Informasi dan Komunikasi	417.559,00	456.809,60	501.967,60	540.468,50	590.943,07
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	394.332,50	404.084,00	415.463,50	420.659,70	443.779,16
L, Real Estate	229.466,40	238.727,10	250.395,60	263.491,31	278.574,83
M,N, Jasa Perusahaan	20.172,30	21.019,60	21.815,70	22.496,30	23.255,05
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	300.620,70	316.091,60	332.033,20	346.045,00	373.860,42
P, Jasa Pendidikan	444.305,50	483.404,30	520.602,00	548.714,53	583.586,37
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	57.864,50	66.775,60	74.280,80	79.814,73	86.814,48
R,S,T,U, Jasa lainnya	63.122,00	67.404,30	71.223,50	74.001,26	77.235,12
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	9.829.560,90	10.333.808,80	10.871.038,60	11.487.950,13	12.051.028,72

Lampiran 11. PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 Kota Jambi

Sektor PDRB	PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	176.100,20	180.644,80	183.855,40	187.682,19	194.162,70
B, Pertambangan dan Penggalian	766.189,10	595.342,30	578.341,10	418.284,99	432.125,50
C, Industri Pengolahan	1.866.508,00	1.962.941,00	2.045.889,00	2.124.292,02	2.205.317,96
D, Pengadaan Listrik dan Gas	27.639,64	29.450,48	31.178,20	31.726,24	33.645,42
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	40.081,26	41.270,38	42.990,40	43.958,34	46.128,08
F, Konstruksi	1.479.150,00	1.516.107,00	1.578.660,00	1.703.565,76	1.809.482,75
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.763.510,00	4.219.918,00	4.544.459,00	4.784.479,66	5.120.193,44
H, Transportasi dan Pergudangan	1.887.577,00	1.995.123,00	2.242.843,00	2.398.293,67	2.516.596,96
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	336.428,70	350.227,20	379.073,80	415.165,59	447.018,75
J, Informasi dan Komunikasi	709.840,20	776.304,70	843.486,10	900.356,30	974.847,84
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	919.657,90	936.666,30	1.050.080,00	1.085.941,57	1.079.091,24
L, Real Estate	392.461,30	402.011,50	421.727,50	444.988,49	474.671,25
M,N, Jasa Perusahaan	418.398,70	446.930,10	476.179,40	504.519,60	531.246,64
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.142.179,00	1.215.546,00	1.251.814,00	1.282.749,36	1.341.765,85
P, Jasa Pendidikan	674.122,50	725.595,60	771.534,50	805.598,95	858.388,97
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	364.416,90	401.894,30	430.571,10	457.497,01	486.044,97
R,S,T,U, Jasa lainnya	115.968,00	125.234,40	133.095,90	139.239,00	148.782,67
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	15.080.228,40	15.921.207,06	17.005.778,40	17.728.338,74	18.699.510,99

Lampiran 12. PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 Kota Sungai Penuh

Sektor PDRB	PDRB Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	215.696,50	218.705,50	235.062,10	228.572,17	241.211,79
B, Pertambangan dan Penggalian	29.856,59	31.581,46	33.267,80	35.722,40	37.954,19
C, Industri Pengolahan	24.931,81	26.172,14	27.806,00	29.618,04	31.610,56
D, Pengadaan Listrik dan Gas	886,77	968,98	966,70	979,02	992,02
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.991,04	13.411,91	14.204,60	14.585,82	14.929,58
F, Konstruksi	479.401,20	496.633,50	517.488,10	549.520,00	576.151,62
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	858.382,70	949.866,30	1.011.693,00	1.082.684,04	1.149.681,55
H, Transportasi dan Pergudangan	128.611,00	136.724,00	146.115,40	156.797,32	166.668,02
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	39.169,57	42.797,93	45.166,40	47.892,37	50.759,48
J, Informasi dan Komunikasi	491.349,20	538.308,30	582.503,30	625.230,24	659.751,52
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	183.854,40	185.775,00	201.388,10	219.317,86	230.195,05
L, Real Estate	101.355,80	104.064,50	110.091,50	116.474,98	122.170,91
M,N, Jasa Perusahaan	205.187,40	212.933,40	230.883,50	250.726,37	266.360,76
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	203.801,00	218.938,20	224.364,10	230.098,16	240.984,03
P, Jasa Pendidikan	313.268,10	342.387,50	369.983,90	397.041,17	417.469,85
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	88.945,38	97.388,46	101.712,40	107.350,49	112.950,68
R,S,T,U, Jasa lainnya	83.254,70	88.705,29	93.770,20	99.954,18	105.185,94
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	3.460.943,16	3.705.362,37	3.946.467,10	4.192.564,63	4.425.027,55

Lampiran 13. :
Produksi Komoditi Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2014-2018 (Ton)

No	Komoditi	2018	2017	2016	2015	2014
1	Karet	348.528	341.313	337.544	331.663	318.348
2	Kelapa Sawit	1.142.078	1.123.329	1.552.543	1.619.896	1.571.535
3	Kelapa Dalam	107.692	108.080	104.528	108.471	108.950
4	Kelapa Hybrida	132	141	225	252	283
5	Kulit Kayu Manis	56.827	56.681	56.253	56.276	56.148
6	Kopi Robusta	15.154	14.082	13.077	13.239	13.449
7	Kopi Arabica	301	241	214	208	134
8	Lada	32	27	39	77	53
9	Pala	4	4	-	-	-
10	Kina	-	-	-	-	-
11	Cengkeh	29	29	29	29	31
12	Kakao/Coklat	856	818	703	742	645
13	Pinang	13.438	13.399	12.594	13.482	5.447
14	Jahe	-	-	-	-	-
15	Kemiri	217	224	212	215	236
16	Kapuk	15	32	18	27	28
17	Kapulaga	-	-	-	-	-
18	Jarak pagar	-	-	-	-	-
19	Aren	101	107	126	126	132
20	Jambu Mete	-	-	-	-	-
21	Vanili	3	4	3	2	2
22	Teh	3.555	3.555	3.555	3.555	3.555
23	Tebu	9.656	9.655	15.283	7.374	6.969
24	Tembakau	328	317	302	285	233
25	Nilam	272	295	248	245	208
	Total	1.699.218	1.672.333	2.097.496	2.156.164	2.086.386

Lampiran 14. :
Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2018 (Ton)

No	Komoditi	2018	2017	2016	2015	2014
1	Karet	399	359	345	345	298
2	Kelapa Sawit	10	10	10	10	12
3	Kelapa Dalam	14	14	17	17	19
4	Kelapa Hybrida	0	0	0	0	0
5	Kulit Kayu Manis	53.663	53.531	53.249	53.249	53.031
6	Kopi Robusta	3.805	3.915	3.981	3.981	3.948
7	Kopi Arabica	203	171	144	138	81
8	Lada	3	3	3	3	3
9	Pala	0	0	0	0	0
10	Kina	0	0	0	0	0
11	Cengkeh	23	23	23	23	25
12	Kakao/Coklat	48	40	24	24	20
13	Pinang	34	32	22	22	15
14	Jahe	0	0	0	0	0
15	Kemiri	151	156	144	144	162
16	Kapuk	0	0	0	0	0
17	Kapulaga	0	0	0	0	0
18	Jarak pagar	0	0	0	0	0
19	Aren	24	26	31	31	35
20	Jambu Mete	0	0	0	0	0
21	Vanili	3	4	3	2	2
22	Teh	3.555	3.555	3.555	3.555	3.555
23	Tebu	9.650	9.649	15.277	7.368	6.965
24	Tembakau	254	254	237	237	195
25	Nilam	37	37	31	31	24
	Total	71.876	71.779	77.096	69.180	68.390

Lampiran 15. :
Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Ton)

No	Komoditi	2018	2017	2016	2015	2014
1	Karet	74.441	70.431	62.233	61.758	61.360
2	Kelapa Sawit	210.336	202.027	167.938	177.556	176.751
3	Kelapa Dalam	768	815	835	862	886
4	Kelapa Hybrida	41	47	72	86	99
5	Kulit Kayu Manis	2.926	2.912	2.757	2.780	2.870
6	Kopi Robusta	8.240	7.556	6.716	6.660	6.577
7	Kopi Arabica	4	0	0	0	0
8	Lada	0	0	0	5	4
9	Pala	0	0	0	0	0
10	Kina	0	0	0	0	0
11	Cengkeh	0	0	0	0	0
12	Kakao/Coklat	72	72	55	55	53
13	Pinang	44	48	51	52	47
14	Jahe	0	0	0	0	0
15	Kemiri	9	15	15	18	18
16	Kapuk	9	9	12	16	17
17	Kapulaga	0	0	0	0	0
18	Jarak pagar	0	0	0	0	0
19	Aren	12	30	41	41	41
20	Jambu Mete	0	0	0	0	0
21	Vanili	0	0	0	0	0
22	Teh	0	0	0	0	0
23	Tebu	0	0	0	0	0
24	Tembakau	18	12	20	18	25
25	Nilam	185	211	182	180	165
	Total	297.105	284.185	240.927	250.087	248.913

Lampiran 16. :
Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Sarolangun Tahun 2014-2018 (Ton)

No	Komoditi	2018	2017	2016	2015	2014
1	Karet	60.814	60.814	60.797	58.394	48.600
2	Kelapa Sawit	59.918	59.910	185.825	185.727	180.053
3	Kelapa Dalam	361	361	334	318	310
4	Kelapa Hybrida	0	0	0	0	0
5	Kulit Kayu Manis	0	0			
6	Kopi Robusta	10	10	9	7	7
7	Kopi Arabica					
8	Lada	0	0	0	0	1
9	Pala					
10	Kina					
11	Cengkeh					
12	Kakao/Coklat	0	0			
13	Pinang	35	35	26	26	27
14	Jahe					
15	Kemiri	0	0	0	0	1
16	Kapuk	0	17			
17	Kapulaga					
18	Jarak pagar					
19	Aren	6	0	8	8	3
20	Jambu Mete					
21	Vanili					
22	Teh					
23	Tebu					
24	Tembakau					
25	Nilam	19	17	17	17	19
	Total	121.163	121.164	247.016	244.497	229.021

Lampiran 17. :
Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Batanghari Tahun 2014-2018 (Ton)

No	Komoditi	2018	2017	2016	2015	2014
1	Karet	74.407	74.230	73.810	73.368	72.780
2	Kelapa Sawit	140.905	140.244	216.200	252.694	272.112
3	Kelapa Dalam	328	317	322	331	354
4	Kelapa Hybrida	19	22	26	36	46
5	Kulit Kayu Manis					
6	Kopi Robusta	13	11	11	11	13
7	Kopi Arabica					
8	Lada	15	10	13	45	20
9	Pala					
10	Kina					
11	Cengkeh					
12	Kakao/Coklat	34	34	34	45	51
13	Pinang	11	11	11	17	4
14	Jahe					
15	Kemiri	4	4	4	4	5
16	Kapuk	6	6	6	11	11
17	Kapulaga					
18	Jarak pagar					
19	Aren	25	17	17	17	25
20	Jambu Mete					
21	Vanili					
22	Teh					
23	Tebu					
24	Tembakau					
25	Nilam					
	Total	215.767	214.906	290.454	326.579	345.421

Lampiran 18. :
Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014-2018 (Ton)

No	Komoditi	2018	2017	2016	2015	2014
1	Karet	30.260	29.918	32.451	32.345	29.786
2	Kelapa Sawit	189.663	189.663	283.652	283.573	282.682
3	Kelapa Dalam	543	546	580	570	597
4	Kelapa Hybrida	16	16	17	20	25
5	Kulit Kayu Manis					
6	Kopi Robusta	25	29	32	34	38
7	Kopi Arabica					
8	Lada	0	0	0	0	0
9	Pala					
10	Kina					
11	Cengkeh					
12	Kakao/Coklat	298	295	286	286	278
13	Pinang	17	17	11	11	10
14	Jahe					
15	Kemiri	11	11	13	13	14
16	Kapuk					
17	Kapulaga					
18	Jarak pagar					
19	Aren	34	34	29	29	28
20	Jambu Mete					
21	Vanili					
22	Teh					
23	Tebu					
24	Tembakau					
25	Nilam					
	Total	220.867	220.529	317.071	316.881	313.458

Lampiran 19. :
 Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014-
 2018 (Ton)

No	Komoditi	2018	2017	2016	2015	2014
1	Karet	3.647	3.647	3.097	6.570	2.842
2	Kelapa Sawit	47.806	47.806	57.171	55.684	56.646
3	Kelapa Dalam	51.398	51.398	50.414	54.608	51.013
4	Kelapa Hybrida	54	54	54	54	54
5	Kulit Kayu Manis					
6	Kopi Robusta	1.237	1.237	1.067	1.225	1.053
7	Kopi Arabica					
8	Lada	14	14	14	14	14
9	Pala					
10	Kina					
11	Cengkeh					
12	Kakao/Coklat	212	212	37	167	167
13	Pinang	3.207	3.207	9.433	10.518	2.751
14	Jahe					
15	Kemiri	4	4	2	2	3
16	Kapuk					
17	Kapulaga					
18	Jarak pagar					
19	Aren					
20	Jambu Mete					
21	Vanili					
22	Teh					
23	Tebu					
24	Tembakau					
25	Nilam					
	Total	107.579	107.579	121.289	128.842	114.543

Lampiran 20. :
 Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014-2018 (Ton)

No	Komoditi	2018	2017	2016	2015	2014
1	Karet	4.407	4.597	6.416	2.852	7.865
2	Kelapa Sawit	249.033	251.199	319.059	305.649	298.724
3	Kelapa Dalam	53.343	53.712	51.120	50.820	54.766
4	Kelapa Hybrida	0	0	54	54	59
5	Kulit Kayu Manis					
6	Kopi Robusta	1.354	1.079	1.067	1.049	1.468
7	Kopi Arabica					
8	Lada	0	0	9	10	11
9	Pala					
10	Kina					
11	Cengkeh					
12	Kakao/Coklat	48	47	173	84	41
13	Pinang	9.981	9.958	2.945	2.745	2.559
14	Jahe					
15	Kemiri			0	0	0
16	Kapuk					
17	Kapulaga					
18	Jarak pagar					
19	Aren					
20	Jambu Mete					
21	Vanili					
22	Teh					
23	Tebu	0	0			
24	Tembakau					
25	Nilam					
	Total	318.166	320.592	380.843	363.263	365.493

Lampiran 21. :
Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Tebo Tahun 2014-2018 (Ton)

No	Komoditi	2018	2017	2016	2015	2014
1	Karet	50.961	50.769	51.845	50.694	49.780
2	Kelapa Sawit	129.185	129.046	153.525	189.642	136.463
3	Kelapa Dalam	457	435	426	470	526
4	Kelapa Hybrida	0	0	0	0	0
5	Kulit Kayu Manis	0	0			
6	Kopi Robusta	13	9	8	86	220
7	Kopi Arabica					
8	Lada					
9	Pala					
10	Kina					
11	Cengkeh					
12	Kakao/Coklat	50	48	34	24	17
13	Pinang	28	23	25	21	20
14	Jahe					
15	Kemiri					
16	Kapuk					
17	Kapulaga					
18	Jarak pagar					
19	Aren					
20	Jambu Mete					
21	Vanili					
22	Teh					
23	Tebu					
24	Tembakau					
25	Nilam	31	30	18	17	
	Total	180.725	180.360	205.881	240.954	187.026

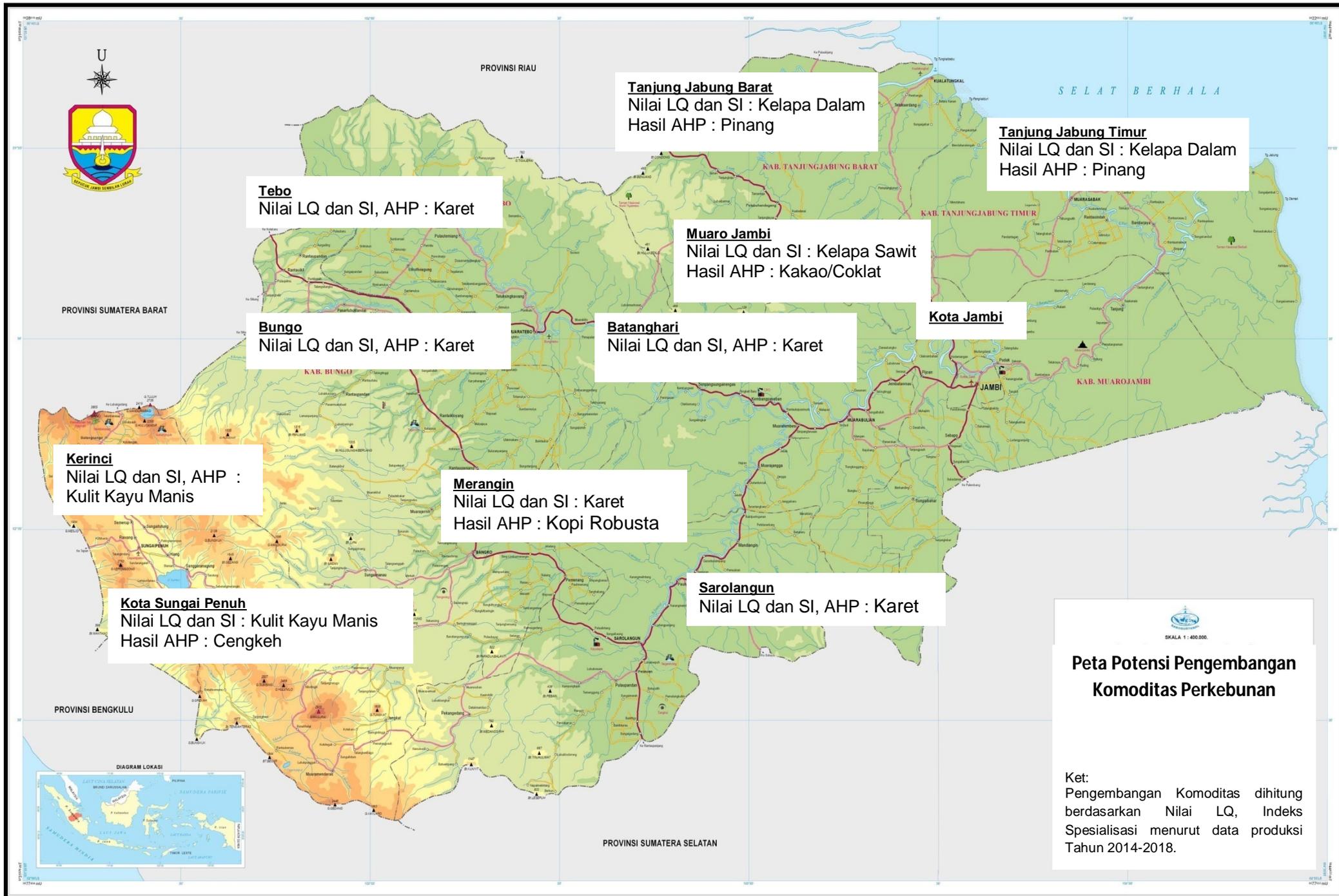
Lampiran 22. :
Produksi Komoditi Perkebunan Kabupaten Bungo Tahun 2014-2018 (Ton)

No	Komoditi	2018	2017	2016	2015	2014
1	Karet	49.192	46.548	46.550	45.337	45.037
2	Kelapa Sawit	115.222	103.424	169.163	169.361	168.092
3	Kelapa Dalam	477	479	477	472	476
4	Kelapa Hybrida	2	2	2	2	0
5	Kulit Kayu Manis	13	13	22	22	22
6	Kopi Robusta	324	103	81	81	80
7	Kopi Arabica					
8	Lada					
9	Pala					
10	Kina					
11	Cengkeh					
12	Kakao/Coklat	52	31	30	30	16
13	Pinang	38	31	33	33	10
14	Jahe					
15	Kemiri					
16	Kapuk					
17	Kapulaga					
18	Jarak pagar					
19	Aren					
20	Jambu Mete					
21	Vanili					
22	Teh					
23	Tebu					
24	Tembakau					
25	Nilam					
	Total	165.320	150.631	216.358	215.338	213.733

Lampiran 23. :
Produksi Komoditi Perkebunan Kota Sungai Penuh Tahun 2014-2018 (Ton)

No	Komoditi	2018	2017	2016	2015	2014
1	Karet					
2	Kelapa Sawit					
3	Kelapa Dalam	3	3	3	3	3
4	Kelapa Hybrida	0	0	0	0	0
5	Kulit Kayu Manis	225	225	225	225	225
6	Kopi Robusta	133	133	105	105	45
7	Kopi Arabica	94	70	70	70	53
8	Lada					
9	Pala	4	4			
10	Kina					
11	Cengkeh	6	6	6	6	6
12	Kakao/Coklat	42	39	30	27	2
13	Pinang	43	37	37	37	4
14	Jahe					
15	Kemiri	38	34	34	34	33
16	Kapuk	0	0			
17	Kapulaga					
18	Jarak pagar					
19	Aren					
20	Jambu Mete					
21	Vanili	0	0			
22	Teh			0	0	0
23	Tebu	6	6	6	6	4
24	Tembakau	56	51	45	30	13
25	Nilam					
	Total	650	608	561	543	388

PROVINSI JAMBI



Peta Potensi Pengembangan Komoditas Perkebunan

Ket:
Pengembangan Komoditas dihitung berdasarkan Nilai LQ, Indeks Spesialisasi menurut data produksi Tahun 2014-2018.